



LAPORAN TAHUNAN

PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

2024



TIM PENYUSUN

TIM PENYUSUN



PENGARAH

Ali Muharam, SIP., MSE., MA

KETUA

Andrea, ST, MAP.

WAKIL KETUA

Drg. Indah Ratnasari, M.K.M

SEKRETARIS

Anita Surya M., S.M., M.Sc.

ANGGOTA

Satria Septiadi Nugraha, S.Psi., M.Psi.
Bintang Sulastri Aruan, S.Farm., Apt.
Dewi Mustika Sari, S.Psi.
Lantioma Franita Panggabean, S.E.
Sesa Putri Ramadhani, S.Psi
Suci Atika Haryani, S.E.
Farida Sundari Putri, S.E.
Uthe Anggun Larasati, S.Ak.
Syukriati, S.E.
Fairuz Syifa, S.Psi.
Silvia Desi Wulandari, S.E.
Ibnu Marseno, A.Md.
Fiddinila., M.Psi
Ghilman Razaqa G. I., S.Farm., Apt.
Binanda Primadite, S.E.
Lia Ristiyanti, S.Si.
Asril Sapli, S.IP.
Khafidloh Tri Rusdaniati, A.Md
Setyani Dwi Wulandari, A.Md
Karis Singgih Angga P., S.I.kom

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami dengan bangga menyampaikan Laporan Tahunan Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2024. Laporan ini merupakan laporan tahunan ketiga yang disusun oleh Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM, sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kami sebagai instansi publik yang memiliki tugas strategis dalam penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia di sektor pengawasan Obat dan Makanan.

Laporan tahunan ini menyajikan informasi terkait berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan Badan POM, sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban serta target-target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu, laporan ini juga menggambarkan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja kami, serta tantangan-tantangan yang telah berhasil dilalui sepanjang tahun 2024.

Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak, baik dari sektor terkait maupun pemangku kepentingan lainnya, yang telah berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih yang tulus kami sampaikan kepada seluruh jajaran pegawai Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan atas dedikasi dan kerja kerasnya, yang telah berkontribusi terhadap pencapaian yang membanggakan selama tahun 2024.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Tahunan ini dapat memberikan kontribusi yang berarti sebagai bahan evaluasi dan refleksi untuk terus meningkatkan kinerja Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, demi tercapainya tujuan yang lebih baik di masa mendatang.

Jakarta, 18 Maret 2025

Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan



Ali Muharam.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	xiv
HIGHLIGHT KEGIATAN TAHUN 2024	xv
BAB I	1
1.1. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PPSDM POM	1
1.2. STRUKTUR ORGANISASI PPSDM POM	1
1.3. VISI DAN MISI PPSDM POM.....	2
1.4. BUDAYA ORGANISASI - <i>CORE VALUE</i>	4
BAB II	6
2.1. Sarana dan Prasarana	6
2.1.1. Status Kepemilikan Tanah	6
2.1.2. Sarana Komunikasi	6
2.1.3. Kendaraan	7
2.2. Data Kepegawaian	7
2.3. Anggaran	11
BAB III	15
3.1. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM POM	17
3.1.1. PELATIHAN PKP PERTAMA	18
3.1.2. PELATIHAN DFI JUNIOR	19
3.2. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM BADAN POM	21
3.2.1. PELATIHAN PPNS	21
3.2.2. PELATIHAN PELAYANAN PUBLIK	22

3.2.3. PELATIHAN INSPEKTUR CDOB JUNIOR	23
3.2.4. PELATIHAN INSPEKTUR CDOB SENIOR	24
3.2.5. ORIENTASI PPPK	25
3.2.6. PELATIHAN FOOD INSPECTOR MUDA.....	26
3.2.7. PELATIHAN FOOD INSPECTOR MADYA	27
3.2.8. PELATIHAN INSPEKTUR KOSMETIK JUNIOR	27
3.2.9. PELATIHAN INSPEKTUR OBASK JUNIOR	28
3.2.10. PELATIHAN LEADERSHIP DI MANDIRI UNIVERSITY	29
3.2.11. PELATIHAN BAHASA ISYARAT.....	30
3.2.12. PELATIHAN KIE MUDA	31
3.2.13. Pelatihan Teknis penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik Tingkat Dasar Tahun 2024	33
3.2.14. Pelatihan Calon Petugas Haji.....	33
3.2.15. Pelatihan Kerja Sama dengan TGA Australia	34
3.2.16. Pelatihan Masa Persiapan Pensiun (MPP)	35
3.2.17. Pelatihan Pengelolaan Keamanan Pangan Berbasis HACCP	36
3.2.18. Pelatihan Certified Risk Management Officer (CRMO).....	37
3.3. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM MELALUI PENDIDIKAN LANJUTAN	37
3.3.1. Pembahasan Evaluasi CPTB	38
3.3.2. <i>Education Expo</i>	38
3.3.3. Pendidikan Lanjutan di Luar Negeri.....	39
3.3.4. <i>Boot Camp Scholarship</i>	40
3.4. PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIHAK KETIGA.....	40
3.4.1. Praktek Kerja Profesi Apoteker	40
3.4.2. Magang Siswa/Mahasiswa.....	42
3.4.3. Kunjungan	42
3.5. PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN POM	43
3.6. PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN POM	44
3.6.1. Penyusunan Perangkat Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural	44

3.6.2. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana.....	44
3.6.3. Penyusunan Perangkat Uji Kompetensi Teknis	47
3.6.4. Kaji Ulang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Keamanan Pangan	48
3.6.5. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan kosmetik	49
3.7. PENILAIAN KOMPETENSI SDM BADAN POM.....	50
3.7.1. Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural	51
3.7.2. Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.....	55
3.7.3. Penilaian Kompetensi Teknis	56
3.8. SERTIFIKASI SDM POM	59
3.9. PENGELOLAAN SPBE PPSDM POM.....	63
3.9.1. Pengelolaan Teknologi Informasi PPSDM POM	65
3.9.2. Pengelolaan E-Learning IDEAS.....	72
3.9.3. Monitoring Pengembangan Kompetensi	73
3.9.4. Media Sosial PPSDM POM	83
3.10. PEMBINAAN PFM	85
3.10.1. Bimbingan Teknis Kompetensi SDM dan Sosialisasi Jabatan Fungsional PFM	86
3.10.2. Penyusunan Kebijakan Terkait JF PFM	97
3.10.3. Fasilitasi Organisasi Profesi PFMI	100
3.10.4. Pelatihan Karya Tulis Ilmiah	102
3.10.5. Penerbitan Jurnal Eruditio	103
3.11. PENGAKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	105
3.12. PENGELOLAAN BUDAYA BERAKHLAK DAN AGEN PERUBAHAN Badan POM	107
3.12.1. Sosialisasi dan Internalisasi Core Values Berakhlak	109
3.12.2. <i>Capacity Building</i> Pimpinan Perubahan dan Agen Perubahan.....	111
3.12.3. Penyusunan Rencana Aksi dan Monitoring Evaluasi.....	113

3.12.4. Survei Mandiri Berakhlak.....	114
3.12.5. <i>Agent Of Change (Aoc) Award</i>	115
3.12.6. <i>Leader Dialogue</i>	116
3.13. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PPSDM POM.....	117
3.14. AKIP PPSDM POM	121
3.15. INDEKS PROFESIONALITAS PPSDM POM.....	124
3.16. PENGELOLAAN BMN DAN PERSEDIAAN PPSDM POM	133
3.17. PENGELOLAAN KEARSIPAN PPSDM POM	140
3.18. LAYANAN PERPUSTAKAAN BADAN POM	150
3.18.1. Layanan Perpustakaan	151
3.18.2. Pengembangan Koleksi Perpustakaan.....	153
3.18.3. Promosi Perpustakaan	153
3.18.4. Peningkatan kompetensi.....	156
3.19. MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 PPSDM POM	160
BAB IV	174
BAB V	176
5.1. KESIMPULAN	176
5.2. SARAN	177

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rincian Kendaraan Operasional Roda Empat	7
Tabel 2. Rincian Kendaraan Operasional Roda Dua	7
Tabel 3. Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja	8
Tabel 4. Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2024	11
Tabel 5. Realisasi Anggaran berdasarkan Kegiatan Tahun 2024	13
Tabel 6. Rincian Penyelenggaraan Pelatihan PKP Pertama	18
Tabel 7. Rincian Penyelenggaraan Pelatihan PKP Pertama	20
Tabel 8. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker	41
Tabel 9. Tabel Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan.....	43
Tabel 10. Data Capaian Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural	51
Tabel 11. Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural TA 2024.....	52
Tabel 12. Jumlah Peserta UDUPKP	55
Tabel 13. Jumlah Pengguna Aplikasi LSP.....	65
Tabel 14. Monitoring dan Capaian Aplikasi PENKOMTEK Tahun 2024	66
<i>Tabel 15. Pengguna Aplikasi Sipenatemanku</i>	<i>68</i>
Tabel 16. Pelaksanaan coaching dan mentoring melalui aplikasi CMC Badan POM.....	70
Tabel 17. Jumlah Data Unit di Aplikasi SIMPHONI.....	70
Tabel 18. Kegiatan Pengembangan Kompetensi di IDEAS	72
<i>Tabel 19. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi 2024 di Badan POM.....</i>	<i>74</i>
Tabel 20. Rincian Penyelenggaraan Pelatihan KTI	103
Tabel 21. Hasil Survei Mandiri Indeks BerAKHLAK	115
Tabel 22. Hasil Penilaian Agen Perubahan Tahun 2024	116
Tabel 23. Hasil Penilaian AKIP PPSDM POM Tahun 2024	122
Tabel 24. Hasil penilaian SAKIP PPSDM POM Tahun 2024	122
Tabel 25. Indeks Profesionalitas PPSDM POM	125
Tabel 26. Perhitungan Kompetensi Sebelum Perubahan	127
Tabel 27. Perhitungan Kompetensi Setelah Perubahan	128
Tabel 28. Pengadaan BMN 2024 berupa Mesin dan Peralatan Khusus TIK	136
Tabel 29. Pengadaan BMN 2024 berupa Mesin dan Peralatan Non TIK	136



PPSDM POM
Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan

**EDUCATE
ENGAGE
EMPOWER**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Tabel 30. Jumlah Pengunjung Datang Langsung ke Perpustakaan Badan POM Tahun 2024

..... 151

Tabel 31. Jumlah Pengunjung Online ke Perpustakaan Badan POM Tahun 2024..... 152

GEDUNG BATIK

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi PPSDM POM	2
Gambar 2. Visi dan Misi Badan POM.....	3
Gambar 3. Foto-foto saat pelatihan PKP Pertama.....	19
Gambar 4. Foto-foto saat pelatihan DFI Junior	21
Gambar 5. Pelatihan Pelayanan Publik.....	23
Gambar 6. Pelatihan Inspektur CDOB Junior.....	23
Gambar 7. Pelatihan Inspektur CDOB Senior	24
Gambar 8. Orientasi PPPK.....	25
Gambar 9. Pelatihan Food Inspector Muda	26
Gambar 10. Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior	28
Gambar 11. Pelatihan Inspektur OBASK Junior.....	29
Gambar 12. Pelatihan Leadership di Mandiri University	30
Gambar 13. Pelatihan Bahasa Isyarat	31
Gambar 14. Pelatihan KIE Muda.....	32
Gambar 15. Pelatihan Calon Petugas Haji.....	34
Gambar 16. Pelatihan Kerja Sama dengan TGA.....	35
Gambar 17. Pelatihan Masa Persiapan Pensiun (MPP)	36
Gambar 18. Pelatihan Pengelolaan Keamanan Pangan Berbasis HACCP	36
Gambar 19. Pelatihan Certified Risk Management Officer (CRMO)	37
Gambar 20. Pembahasan CPTB	38
Gambar 21. Education Expo	39
Gambar 22. Pendidikan Lanjutan di Luar Negeri	39
Gambar 23. Foto kegiatan Boot Camp Scholarship	40
Gambar 24. Pelatihan Praktik Kerja Profesi Apoteker.....	42
Gambar 25. Dokumentasi FGD Finalisasi Standar Kompetensi JF PFM.....	45
Gambar 26. Buku Saku Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.....	46
Gambar 27. Penyusunan Soal Ujian Tertulis Penilaian Kompetensi Teknis.....	48

Gambar 28. FGD Penyusunan Kaji Ulang SKKNI Bidang Keamanan Pangan, Pra Konvensi, dan Konvensi	49
Gambar 29. Penyampaian Rancangan SKKNI Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik kepada Kemenaker RI	49
Gambar 30. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dan Feedback Hasil Penilaian Kompetensi.	55
Gambar 31. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	56
Gambar 32. Dokumentasi Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Teknis dan Uji Kompetensi Teknis.....	59
Gambar 33. Pelaksanaan Sertifikasi PKP Pertama/DFI Junior Tahun 2024 di Kota Jayapura, Bandung, Samarinda dan Pontianak	62
Gambar 34. Capaian Pembelajaran E-Learning IDEAS 2024.....	73
Gambar 35. Monitoring Pengembangan Kompetensi 2024 di Badan POM	74
Gambar 36. Akun Media Sosial PPSDM POM	84
Gambar 37. Data Capaian Pengelolaan Media Sosial PPSDM POM	85
Gambar 38. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Surakarta	87
Gambar 39. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi Badan POM Pusat.....	88
Gambar 40. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Denpasar	88
Gambar 41. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Palangkaraya	89
Gambar 42. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Samarinda.....	89
Gambar 43. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Banjarmasin	90
Gambar 44. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Bandung.....	90
Gambar 45. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Bengkulu	91
Gambar 46. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Palu	92
Gambar 47. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Palembang	93
Gambar 48. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Kupang.....	94
Gambar 49. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Ambon	94
Gambar 50. Kegiatan Koordinasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Dinas Kesehatan Kota Tidore.....	95
Gambar 51. Kegiatan Bimbingan Teknis Kompetensi SDM dan Sosialisasi Jabatan Fungsional PFM yang diselenggarakan di Hotel Emerald, Ternate	96

Gambar 52. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Serang	96
Gambar 53. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Tasikmalaya	97
Gambar 54. Dokumentasi FGD Revisi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 2 Tahun 2020	98
Gambar 55. Dokumentasi Kegiatan Harmonisasi Revisi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 2 Tahun 2020.....	98
Gambar 56. Dokumentasi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan	99
Gambar 57. Dokumentasi FGD Penyusunan Rancangan Petunjuk Teknis JF Pengawas Farmasi dan Makanan.....	100
Gambar 58. Dialog PFMI dengan Anggota	101
Gambar 59. Rapat Kerja Nasional Organisasi Profesi PFMI.....	102
Gambar 60. Dokumentasi Pelatihan KTI	103
Gambar 61. Tampilan Eruditio Eruditio Vol. 4, No. 1 Edisi Desember 2023 dan Eruditio Vol. 4, No. 2 Edisi Juni 2024	104
Gambar 62. Proses Akreditasi Eruditio dan Sertifikat Akreditasi Eruditio	104
Gambar 63. Visitasi ke Lembaga Pengusul Akreditasi.....	106
Gambar 64. Penyerahan sertifikat Akreditasi	107
Gambar 65. Kegiatan Sharing Session: Semangat Ramadhan.....	109
Gambar 66. Kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi BerAKHLAK	110
Gambar 67. Kegiatan Dialog Generasi Milenial bersama Kepala Badan POM	111
Gambar 68. Pembukaan Kegiatan Capacity Building oleh Kepala Badan POM	112
Gambar 69. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Agen Perubahan	114
Gambar 70. Kegiatan Leader Dialogue.....	117
Gambar 71. Kegiatan Forum Konsultasi Publik.....	119
Gambar 72. Sertifikat penghargaan Employee Of the Quarter	121
Gambar 73. Pembahasan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023.....	121
Gambar 74. Bobot Penilaian Pendidikan IP ASN	126
Gambar 75. Bobot Penilaian Diklat Struktural.....	128
Gambar 76. Bobot Penilaian Diklat Fungsional.....	129
Gambar 77. Bobot Penilaian Kinerja.....	129
Gambar 78. Bobot Penilaian Pengembangan Kompetensi	129
Gambar 79. Bobot Penilaian Diklat Teknis (untuk pelaksana)	130

Gambar 80. Bobot Penilaian Kinerja	131
Gambar 81. IP ASN PPSDM POM Tahun 2024	132
Gambar 82. Rencana kebutuhan BMN - Pengadaan	134
Gambar 83. Rencana kebutuhan BMN - Pemeliharaan	135
Gambar 84. Laporan BMN.....	138
Gambar 85. Sosialisasi Pengelolaan BMN.....	140
Gambar 86. Aplikasi Sipanda Sistem Penomoran Naskah Dinas.....	142
Gambar 87. Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Digital)	142
Gambar 88. Nilai hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2024.....	143
Gambar 89. Sarana dan prasarana pengolahan Arsip di PPSDM POM.....	143
Gambar 90. Peminjaman dan pengembalian arsip dengan Scan Barcode	144
Gambar 91. Daftar Arsip Substantif 2024	145
Gambar 92. Daftar Arsip Aktif	145
Gambar 93. Berita Acara pemindahan arsip inaktif Tahun 2024	146
Gambar 94. Keikutsertaan Bimbingan Teknis Pemantapan Tertib Arsip menuju Transformasi Digital Badan POM tanggal 19 – 23 Februari 2024	147
Gambar 95. Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Digitalisasi Arsip Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Tanggal 4 s.d 6 September 2024 Tahun 2024	148
Gambar 96. Keikutsertaan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keterampilan Angkatan III dan Sertifikasi Pengelolaan Arsip Dinamis Tahun 2024.....	148
Gambar 97. Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 11 Desember 2024	149
Gambar 98. Kunjungan Ke Arsip Nasional Republik Indonesia tanggal 02 September 2024	150
Gambar 99. Kunjungan ke PT. Sigma Cipta Utama tanggal 26 April 2024	150
Gambar 100. Sosialisasi ISBN dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	154
Gambar 101. Dokumentasi Kegiatan Bedah Buku.....	155
Gambar 102. Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Pemustaka	155
Gambar 103. Promosi layanan perpustakaan di Media Sosial.....	156
Gambar 104. Dokumentasi Rapat Kerja dan Seminar IPI.....	157
Gambar 105. Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke 15	158
Gambar 106. Dokumentasi Kegiatan Sertifikasi Pustakawan.....	159



PPSDM POM
Pusat Pengembangan
Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan

**EDUCATE
ENGAGE
EMPOWER**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Gambar 107. Dokumentasi Diskusi Pengembangan Aplikasi Repositori.....	160
Gambar 108. Kegiatan Sosialisasi QMS Awareness ISO 9001:2015.....	160
Gambar 109. Kegiatan RTM 20 dan 21 Mei 2024	161
Gambar 110. Kegiatan RTM 22 Juli 2024	167

PERNYATAAN TELAH DIREVIU PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Tahunan Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) untuk tahun anggaran 2024. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Tahunan menjadi tanggung jawab bersama TIM Penyusun dan Auditor Internal pada PPSDM POM.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan tahunan telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan tahunan ini.

Jakarta, 16 Maret 2025

Auditor Internal



Perdhana Ari Sudewo, S.Psi., MAB

Highlight Kegiatan PPSDM POM Tahun 2024



JANUARI



Koordinasi Pelaksanaan Sertifikasi LSP Badan POM

Pada tanggal 25 Januari 2024, PSDM POM melakukan audiensi ke BNSP terkait penambahan ruang lingkup sertifikasi kompetensi LSP Badan POM dan strategi penguatan sertifikasi kompetensi di sektor Obat dan Makanan.



FEBRUARI



Capacity Building Pimpinan Perubahan dan AOC

Capacity Building Pimpinan Perubahan dan Agen Perubahan dibuka oleh Ibu Plt.Kepala Badan POM pada 26 Februari 2024 secara online. Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kompetensi Pimpinan Perubahan dan mewujudkan Badan POM menuju World Class Berucracy dengan memaksimalkan transformasi digital.



MARET
🔍
👤
🔔
☰

🏠

Bimbingan Teknis Leadership

Bekerja sama dengan Mandiri University Nawasena, PPSDM POM mengadakan Bimbingan Teknis Leadership untuk Kepala UPT di seluruh Indonesia pada 4-7 Maret 2024.

APRIL
🔍
👤
🔔
☰

🏠

Kegiatan Leader Dialogue

PPSDM POM menyelenggarakan kegiatan Leader Dialogue dengan mengundang Bapak Ignasius Jonan, pada tanggal 30 April 2025 secara hybrid.

Total peserta yang mengikuti kegiatan yaitu 225 peserta luring dan 477 daring.

MEI
🔍
👤
🔔
☰

🏠

Workshop Sinergitas Penguatan SDM Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Kompetensi

Workshop Sinergitas Penguatan SDM Pengawasan Obat dan Makanan Berbasis Kompetensi di Instansi Daerah, Balikpapan 6 Mei 2024 Hotel Swissbell Balikpapan.

JUNI
🔍
👤
🔔
☰

🏠

Pelatihan Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Pelatihan Pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Pusdik Reskrim Lemdikpol POLRI, Megamendung, Cipayung, Kab. Bogor.

Tujuan pelatihan ini untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas melakukan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana terkait Obat dan Makanan.



JULI
🔍
👤
🔔
☰

🏠

Pelatihan Inspektur CDOB Senior

Tujuan diselenggarakan pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap calon Inspektur CDOB Senior dalam melaksanakan pengawasan fasilitas distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor serta fasilitas pelayanan kefarmasian.



AGUSTUS
🔍
👤
🔔
☰

🏠

Pameran *Education Expo*

Pameran ini diselenggarakan pada tanggal 19-20 Agustus 2024. Selain tersedia pameran pendidikan lanjutan dari berbagai negara, tersedia pula Sharing Session dari berbagai lembaga penyedia beasiswa



LAPORAN TAHUNAN PPSDM POM TAHUN 2024

SEPTEMBER



Pelatihan Dengan TGA

Pada tanggal 17-20 September 2024 dilaksanakan pelatihan bersama TGA Australia di aula Gedung Merah Putih.

Training dibuka oleh Kepala Badan POM dengan Nara sumber Dr. Karen Loft dan Dr Greg Tredwell.



OKTOBER



Dialog Lintas Generasi

Dialog Generasi Milenial bersama Kepala Badan POM, dengan tema Brainstorming Agen Perubahan dalam membangun Budaya BerAKHLAK di Lingkungan Badan POM.

Kegiatan dilaksanakan pada 2 Oktober 2024 secara hybrid.



NOVEMBER



RAKERNAS Pengurus Organisasi Profesi PFMI

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) diselenggarakan oleh Pengurus Organisasi Profesi PFMI bekerjasama dengan PPSDM POM selaku unit kerja pembina, pada tanggal 7 s.d 8 November 2024.



DESEMBER



Penyampaian Sertifikat Akreditasi

Penyampaian sertifikat akreditasi kepada lembaga penyelenggara program pelatihan teknis bidang pengawasan Obat dan Makanan, pada tanggal 12 Desember 2024.



Konvensi SKKNI Bidang Keamanan

Konvensi diadakan pada 11 Desember 2024 di Jakarta. Konvensi ini dihadiri oleh Kementerian Ketenagakerjaan, Komite SKKNI, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan POM, Organisasi Profesi, Industri, dan Akademisi di bidang keamanan pangan.

Konvensi ini diselenggarakan untuk membakukan Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKN) bidang keamanan pangan serta mendapatkan pengakuan dan legalitas dari stakeholder terkait.



GEDUNG BATIK

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI PPSDM POM

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM membentuk Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) sebagai upaya mendukung visi dan misi Badan POM dalam meningkatkan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam menjalankan tugasnya, PPSDM POM memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan;
2. Pelaksanaan penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan sertifikasi kompetensi, perencanaan dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan, dan pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan;
4. Pelaksanaan administrasi pusat; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan POM

1.2. STRUKTUR ORGANISASI PPSDM POM

Secara struktural, PPSDM POM merupakan unit pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan POM melalui Sekretaris Utama. PPSDM POM dipimpin oleh seorang Kepala, dan memiliki struktur organisasi yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur organisasi PPSDM POM dapat dilihat pada Gambar 1.

Struktur Organisasi PPSDM POM



Gambar 1. Struktur Organisasi PPSDM POM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, PPSDM POM berpedoman pada berbagai regulasi, antara lain Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Kerja pada Badan POM. Mengacu pada peraturan-peraturan tersebut, PPSDM POM berupaya mengimplementasikan strategi pembagian sistem kerja yang fleksibel, dengan membentuk Tim Kerja yang dapat disesuaikan setiap tahunnya, berdasarkan dinamika dan kebutuhan organisasi yang terus berkembang.

1.3. VISI DAN MISI PPSDM POM

Visi dan Misi PPSDM POM mengikuti visi dan misi Badan POM tahun 2020-2024 sebagaimana dilihat dalam Gambar 2. Untuk mencapai visi dan melaksanakan misi tersebut, Badan POM memerlukan sumber daya yang memadai dan berkualitas sebagai modal utama dalam mendorong tercapainya tujuan serta sasaran strategis organisasi. Dalam konteks ini, PPSDM POM berperan penting dalam pengembangan sumber daya, terutama Sumber Daya Manusia (SDM), secara optimal untuk mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan.



Gambar 2. Visi dan Misi Badan POM

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh PPSDM POM pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Kapasitas SDM:** Meningkatkan kapasitas SDM Badan POM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.; dan
2. **Kelembagaan Pengawasan yang Kredibel dan Akuntabel:** Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Untuk mencapai tujuan tersebut, PPSDM POM telah menyusun kebijakan strategis sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi SDM Badan POM dan pemangku kepentingan; dan
2. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Penyusunan Sasaran dan Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis PPSDM POM telah mempertimbangkan berbagai potensi, peluang, serta tantangan yang ada. Penyusunan ini juga disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PPSDM POM, serta dengan latar belakang

dan dinamika perubahan lingkungan yang terjadi. Hal ini diharapkan mampu mengakomodasi berbagai kebijakan yang berkembang dalam bidang pengembangan SDM.

Sejalan dengan penetapan Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Peraturan Badan POM No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, PPSDM POM telah melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

1.4. BUDAYA ORGANISASI -CORE VALUE

Nilai-nilai dasar atau yang dikenal sebagai Core Values ASN “BerAKHLAK” merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif dan diluncurkan dengan tujuan menyeragamkan nilai-nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia. Secara umum hal-hal penting yang menjadi akronim dari nilai-nilai dasar ASN tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Berorientasi Pelayanan

Nilai-nilai yang tidak hanya dipahami tetapi juga diimplementasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selalu bersikap ramah kepada siapa saja, terutama kepada masyarakat. Dapat diandalkan serta cekatan dan dapat memberikan solusi atas masalah-masalah yang ada di masyarakat.

2. Akuntabel

Nilai-nilai yang mengedepankan sikap dan perilaku akuntabel yang diwujudkan dalam bersikap jujur dan bertanggung jawab, memiliki disiplin dan berintegritas yang tinggi dalam setiap pelaksanaan tugas. Berkaitan dengan hal ini dalam tugas-tugas kedinasan, ASN dituntut untuk menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.

3. Kompeten

Nilai-nilai yang diwujudkan dengan bersikap dan berperilaku positif untuk dalam meningkatkan kapabilitas sebagai individu untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai ASN.

4. Harmonis

Nilai-nilai yang menuntut ASN untuk dapat menciptakan dan membangun lingkungan kerja yang kondusif dan harmonis. Kenyamanan dan keharmonisan lingkungan kerja mendorong atau memotivasi ASN untuk lebih produktif dalam bekerja.

5. Loyal

Nilai-nilai dengan nilai dasar ini ASN harus dapat menjaga nama baik sesama ASN, nama baik pimpinan, nama baik instansi dan tentu saja harus selalu dapat menjaga nama baik negara. Konsekuensi logis dari adanya loyalitas dan kesetiaan adalah setiap ASN harus selalu menjaga rahasia jabatan dan negara.

6. Adaptif

Nilai dasar yang diharapkan dari setiap ASN untuk bersikap adaptif dalam segala situasi dan dapat terus menerus berinovasi dengan mengembangkan kreativitas. Bersikap proaktif dan tidak hanya berpangku tangan namun harus responsif dengan berbagai masalah yang berkembang serta mampu menjadi bagian dari solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi organisasi.

7. Kolaboratif

Dengan nilai dasar ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya diharapkan ASN mampu berkolaborasi dengan berbagai unsur baik dalam organisasi maupun diluar organisasi. Keterbukaan dalam bekerja sama, dan mencari solusi bersama akan dapat menghasilkan nilai tambah, dan mempercepat mencapai tujuan bersama.

Internalisasi Core Values ASN “BerAKHLAK” menjadi bagian yang tidak terpisahkan pada diri ASN Badan POM. Core Values ASN menjadi pedoman untuk seluruh SDM Badan POM untuk menunjang hadirnya produktivitas, disiplin, loyalitas, moral dan budaya kerja dalam lingkup organisasi birokrasi.

BAB II PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan organisasi dan menjamin keberlanjutan operasional. Sumber daya yang dimiliki oleh sebuah organisasi terdiri dari berbagai elemen yang saling berhubungan, termasuk sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta anggaran. Setiap elemen ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kegiatan dan program yang dilaksanakan.

Pertama, pengelolaan sarana dan prasarana mencakup fasilitas dan infrastruktur yang digunakan untuk mendukung aktivitas operasional. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan bertempat di Badan Pengawas Obat dan Makanan, Gedung Batik Lantai 5, Jalan Percetakan Negara No.23, Jakarta Pusat. Selain itu terdapat beberapa ruang yang dimiliki oleh PPSDM seperti ruang Perpustakaan yang bertempat di Gedung Pelayanan Publik lantai.2 serta ruang LSP dan Pelatihan yang berada pada Gedung Panacea di lantai 1 dan lantai.4; Kedua, pengelolaan Sumber Daya Manusia yang mencakup proses perencanaan, pengembangan, dan pemeliharaan kualitas tenaga kerja yang ada; dan Ketiga, pengelolaan anggaran yang berfokus pada perencanaan, alokasi, dan pemanfaatan dana yang mendukung seluruh kegiatan organisasi.

Secara keseluruhan, pengelolaan yang baik atas ketiga sumber daya tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

2.1. SARANA DAN PRASARANA

2.1.1. STATUS KEPEMILIKAN TANAH

Status bangunan PPSDM POM adalah milik Badan POM

2.1.2. SARANA KOMUNIKASI

Adapun sarana komunikasi yang dapat digunakan stakeholder untuk berkoordinasi dengan PPSDM POM adalah melalui :

- a. Nomor Telepon : 021 – 4264094
- b. Nomor Faximile : 021 – 4264094
- c. Nomor Whatsapp : 0811-130533
- d. Alamat email : ppsdm@pom.go.id/ppsdm.pom@gmail.com
- e. Twitter : @ppsdm_bpom
- f. Facebook : fb.me/ppsdm.bpom
- g. Instagram : @ppsdm.bpom

2.1.3. KENDARAAN

Kendaraan operasional roda empat Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia berjumlah 2 (dua) buah, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Kendaraan Operasional Roda Empat

No	Merk/Type	Nomor Polisi	Jenis	Tahun Pembuatan	Kondisi
1.	Toyota Innova Venturer	B 1297 PQT	Mini Bus	2018	Baik
2.	Daihatsu Terios	B 1765 PQN	Mini Bus	2009	Baik

Selain kendaraan operasional roda empat, PPSDM POM juga memiliki 1 (satu) buah kendaraan operasional roda dua dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. Rincian Kendaraan Operasional Roda Dua

No	Merk/Type	Nomor Polisi	Jenis	Tahun Pembuatan	Kondisi
1.	Honda Vario	B 6076 PNQ	Sepeda Motor	2010	Rusak

2.2. DATA KEPEGAWAIAN

Kekuatan Sumber daya manusia PPSDM POM per 31 Desember 2024 berjumlah 73 pegawai dengan rincian sebagai berikut:

- a. PNS : 56 orang
- b. Pramubakti : 7 orang
- c. TAD : 10 orang

Jumlah ASN PPSDM POM tahun 2024 sebanyak 56 (lima puluh enam) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala PPSDM POM (Pejabat Struktural Eselon II), 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha PPSDM POM (Pejabat Struktural Eselon IV), serta Jabatan Fungsional dan Pelaksana, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sebanyak 14 (empat belas) Widyaiswara, terdiri atas 3 (tiga) Widyaiswara Madya (dimana 1 (satu) diantaranya sedang menjalani tugas belajar tanpa lepas jabatan), 3 (tiga) Widyaiswara Muda, serta 8 (delapan) Widyaiswara Pertama (dimana diantaranya merupakan 2 (dua) orang PPPK, 2 (dua) orang tugas belajar lepas jabatan, dan 1 (satu) orang akan diangkat kembali setelah lulus tugas belajar tanpa lepas jabatan yang sementara saat ini sebagai pelaksana);

- b. Sebanyak 11 (sebelas) Asesor SDMA, terdiri atas 2 (dua) Asesor SDMA Madya, 1 (satu) Asesor SDMA Muda, dan 8 (delapan) Asesor SDMA Pertama;
- c. Sebanyak 11 (sebelas) Analis SDM Aparatur, terdiri atas 1 (satu) Analis SDMA Madya, 4 (empat) Analis SDMA Muda (dimana 1 (satu) diantaranya sedang dalam proses kenaikan jabatan), 5 (lima) Analis SDMA Pertama, dan 1 (satu) calon Analis SDMA Pertama yang berasal dari pelaksana;
- d. Sebanyak 1 (satu) Pranata SDM Aparatur Mahir;
- e. Sebanyak 1 (satu) Analis Kebijakan Pertama;
- f. Sebanyak 3 (tiga) Pranata Komputer Pertama;
- g. Sebanyak 4 (empat) Arsiparis, terdiri atas 1 (satu) Arsiparis Mahir, dan 3 (tiga) Arsiparis Terampil (dimana 1 (satu) orang diantaranya merupakan PPPK);
- h. Sebanyak 1 (satu) Analis Anggaran Pertama;
- i. Sebanyak 2 (dua) Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama;
- j. Sebanyak 2 (dua) Pranata Keuangan APBN Terampil;
- k. Sebanyak 2 (dua) Penata Laksana Barang; dan
- l. Sebanyak 2 (dua) Pustakawan, terdiri atas 1 (satu) Pustakawan Ahli Pertama dan 1 (satu) Pustakawan Mahir.

Tabel 3. Jumlah Pegawai Dibandingkan dengan Analisis Beban Kerja

No.	Jabatan	ABK	Bazzeting	Calon Pemangku	Gap
1.	Widyaiswara Ahli Madya	10	3	0	7
2.	Widyaiswara Ahli Muda	13	3	0	10
3.	Widyaiswara Ahli Pertama	16	7	1	8
4.	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	5	2	0	3
5.	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	9	1	0	8

No.	Jabatan	ABK	Bazzeting	Calon Pemangku	Gap
6.	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	22	8	0	14
7.	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	4	1	0	3
8.	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	6	4	0	2
9.	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	11	5	1	5
10.	Pranata SDM Aparatur Penyelia	2	0	0	2
11.	Pranata SDM Aparatur Mahir	2	1	0	1
12.	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	0	0	1
13.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	1	1	0	0
14.	Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	0	1
15.	Pranata Komputer Ahli Pertama	3	3	0	0
16.	Pranata Komputer Terampil	1	0	0	0
17.	Arsiparis Ahli Pertama	1	0	0	1
18.	Arsiparis Penyelia	2	0	0	2
19.	Arsiparis Mahir	2	1	0	1
20.	Arsiparis Terampil	4	3	0	1
21.	Analisis Anggaran Ahli Pertama	1	1	0	0
22.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	1	0	0	1

No.	Jabatan	ABK	Bazzeting	Calon Pemangku	Gap
23.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	0	1
24.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	2	0	0
25.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	0	0	1
26.	Pranata Keuangan APBN Terampil	2	2	0	0
27.	Penata Laksana Barang Terampil	2	2	0	0
28.	Pustakawan Ahli Muda	1	0	0	1
29.	Pustakawan Ahli Pertama	2	1	0	1
30.	Pustakawan Mahir	2	1	0	1
31.	Pustakawan Terampil	2	0	0	2
32.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	1	0	0	1
33.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	1	0	0	1
34.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Madya	5	0	0	5
35.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Muda	6	0	0	6
36.	Analisis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama	7	0	0	7

No.	Jabatan	ABK	Bazzeting	Calon Pemangku	Gap
37.	Perencana Ahli Madya	1	0	0	1
38.	Perencana Ahli Muda	1	0	0	1
39.	Perencana Ahli Pertama	2	0	0	2

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pegawai ASN PPSDM POM per 31 Desember adalah 56 (lima puluh enam) orang terdiri dari 2 (dua orang struktural dan pegawai yang sudah menduduki Jabatan Fungsional maupun pelaksana yang masih calon menduduki Jabatan Fungsional, sedangkan total kebutuhan pegawai PPSDM POM adalah 159 (seratus lima puluh sembilan orang). Dapat disimpulkan bahwa total gap antara kebutuhan dan jumlah pegawai yang ada saat ini adalah 103 (seratus tiga orang) yang berarti pemenuhan pegawai PPSDM POM baru mencapai 35,22%.

2.3. ANGGARAN

PPSDM POM memperoleh alokasi pagu anggaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) awal Tahun 2024 sebesar Rp 54.638.513.000,00 yang terdiri dari komponen Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Revisi DIPA Tahun 2024 telah dilakukan beberapa kali sejalan dengan adanya Automatic Adjustment Belanja Kementerian/Lembaga TA 2024, pemenuhan kebutuhan Belanja Pegawai TA 2024, dan Automatic Adjustment Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Badan POM TA 2024, sehingga alokasi pagu DIPA akhir yang dapat dikelola oleh PPSDM POM sebesar Rp 47.979.654.000,00. Realisasi anggaran PPSDM POM sampai dengan akhir tahun 2024 sebesar Rp 47.969.742.292 atau sebesar 99,98% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Realisasi Anggaran berdasarkan Sasaran Strategis Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Kompetensi SDM	Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi.	2.856.002.000	2.854.323.030	99,94

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Pengawasan Obat dan Makanan.	Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan tersertifikasi sesuai Standar.	18.343.423.000	18.342.618.839	100,00
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK sesuai dengan Road Map Reformasi Birokrasi Badan POM 2020- 2024.	Indeks Reformasi Birokrasi Badan POM Core Values BerAKHLAK.	1.131.315.000	1.131.311.971	100,00
3	Meningkatnya SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.	Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.	8.624.754.000	8.624.737.584	100,00
		Persentase kerja sama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.	479.658.000	479.654.461	100,00
4	Meningkatnya Kualitas Pengembangan Kompetensi SDM.	Nilai Kepuasan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.	116.475.000	116.473.116	100,00
		Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi.	3.930.181.000	3.930.151.479	100,00
5	Meningkatnya Kualitas Layanan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM).	Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu.	1.329.083.000	1.329.080.251	100,00
		Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM.	1.329.083.000	1.329.080.251	100,00
6	Terlaksananya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK.	Persentase Realisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan POM terkait Core Values BerAKHLAK.	377.105.000	377.103.990	100,00
7	Terwujudnya Organisasi PPSDM POM yang efektif.	Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM.	252.978.020	252.976.826	100,00
		Nilai AKIP PPSDM POM.	66.645.750	66.645.317	100,00
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	66.645.750	66.645.317	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Indeks Pelayanan Publik	245.537.490	245.536.331	100,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	245.537.490	245.536.331	100,00
8	Tersedianya SDM PPSDM POM yang Berkinerja optimal.	Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM.	204.964.000	204.960.361	100,00
9	Terbangunnya Sistem operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal.	198.801.000	198.800.990	100,00
10	Terkelolanya Keuangan PPSDM POM secara akuntabel.	Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM.	7.452.233.000	7.445.857.043	99,91
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	66.645.750	66.645.317	100,00
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	75.230.750	75.227.978	100,00
		Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri	587.356.000	586.375.510	99,83
Total			47.979.654.000	47.969.742.292	99,98%

Tabel 5. Realisasi Anggaran berdasarkan Kegiatan Tahun 2024

No	Output/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4113.CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi				
051	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	363.730.000	362.707.910	99,99
4113.EBA.956 Layanan BMN				
054	Penatausahaan BMN	8.585.000	8.582.661	99,97
4113.EBA.994 Layanan Perkantoran				
001	Gaji dan Tunjangan	5.199.870.000	5.193.513.261	99,88
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.457.327.000	2.457.304.143	100,00
4113.EBB.951 Layanan Sarana Internal				
051	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	384.791.000	383.832.600	99,75
4113.EBC.996 Layanan Pendidikan dan Pelatihan				

No	Output/Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
051	Review dan Penyusunan Standar / Peraturan / Pedoman / Dokumen Pengembangan Pegawai	1.980.476.000	1.980.403.121	100,00
052	Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan Lanjutan	4.016.792.000	4.016.786.324	100,00
053	Peningkatan Kompetensi Pegawai melalui Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) / Workshop / Bimtek / Seminar / Penugasan	8.001.174.000	8.001.154.239	100,00
054	Penilaian dan Pemetaan Kompetensi	1.930.789.000	1.929.158.860	99,92
055	Akreditasi / Mutu yang Diperoleh (Sistem / Lembaga / Per Entitas Diklat)	383.058.000	383.054.382	100,00
056	Reformasi Birokrasi	2.252.473.000	2.252.465.450	100,00
4113.PDI.001 Pengawas Obat dan Makanan yang tersertifikasi sesuai Standar				
051	Sertifikasi Pengawas Obat dan Makanan	7.005.293.000	7.004.509.169	99,99
052	Peningkatan Kompetensi Pengawas Obat dan Makanan	13.996.296.000	13.996.270.172	100,00
Total		47.979.654.000	47.969.742.292	99,98%

BAB III PENGELOLAAN SUMBER DAYA

Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa setiap pegawai ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi. Pengembangan kompetensi yang dilakukan oleh pegawai ASN merupakan salah satu dasar dalam pengangkatan jabatan dan pengembangan karier dalam rangka menerapkan merit sistem. Merit sistem merupakan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.

Sebagai informasi tambahan yang ingin kami sampaikan, sesuai dengan SK Kepala Badan POM Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) telah berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip PUG dalam setiap aspek kegiatannya. Sebagai wujud nyata dari komitmen ini, PPSDM POM membuka kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh pegawai, tanpa memandang jenis kelamin, untuk mengikuti berbagai program pengembangan kompetensi yang diselenggarakan. Selain itu, dalam setiap kegiatan yang diadakan, PPSDM POM juga memastikan untuk mencantumkan kolom terpisah bagi peserta pria dan wanita dalam daftar kehadiran, sebagai bentuk pengakuan terhadap pentingnya kesetaraan gender. Lebih lanjut, dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang inklusif, PPSDM POM tidak membedakan perlakuan terhadap kaum rentan, seperti penyandang disabilitas maupun peserta yang berusia lanjut, dengan memberikan mereka kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada misi Badan POM, yakni:

- a. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
- c. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara

Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.

- d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mencapai misi tersebut diperlukan sumber daya yang memadai dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut diperlukan sumber daya sebagai modal penggerak organisasi, baik yang *tangible* maupun yang *intangible*. Sumber daya di sini termasuk Sumber Daya Manusia, PPSDM POM berperan dalam pengembangan sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya pengembangan SDM yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh PPSDM POM sebagaimana yang diamanatkan dalam Sasaran Strategis Badan POM tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam 10 (sepuluh) sasaran Strategis PPSDM POM 2020-2024, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan dengan 2 indikator kegiatan:
 - a. Persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi
 - b. Jumlah SDM Pengawas Obat Dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar
2. Terwujudnya Reformasi Birokrasi Badan POM terkait manajemen perubahan sesuai dengan Roadmap Reformasi Badan POM 2020-2024 dengan 1 indikator kegiatan:
 - a. Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan
3. Meningkatnya SDM Pengawas Obat dan Makanan yang dikembangkan kompetensinya dengan 2 indikator kegiatan:
 - a. Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM.
 - b. Persentase Kerjasama Pengembangan Kompetensi yang ditindaklanjuti.
4. Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM dengan 2 indikator kegiatan:
 - a. Nilai Kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi
 - b. Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi
5. Meningkatnya kualitas layanan pembinaan jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dengan 2 indikator kegiatan:

- a. Persentase Layanan pembinaan PFM yang dilakukan tepat waktu
 - b. Nilai Kepuasan layanan pembinaan PFM
6. Terlaksananya rencana aksi reformasi birokrasi Badan POM terkait manajemen Perubahan sesuai Roadmap dengan 1 indikator kegiatan:
- a. Persentase realisasi rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan POM Manajemen Perubahan
7. Terwujudnya organisasi PPSDM POM yang efektif dengan 2 indikator kegiatan:
- a. Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM
 - b. Nilai AKIP PPSDM POM
8. Tersedianya SDM PPSDM POM yang berkinerja optimal dengan 1 indikator kegiatan:
- a. Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM
9. Terbangunnya sistem operasional termasuk TIK PPSDM POM terintegrasi dan adaptif dengan 1 indikator kegiatan:
- a. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di PPSDM POM yang optimal
10. Terkelolanya keuangan PPSDM POM yang akuntabel dengan 2 indikator kegiatan:
- a. Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM
 - b. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran PPSDM POM

Hasil kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh PPSDM POM di tahun dapat diuraikan sebagai berikut:

3.1. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM POM

PPSDM POM melakukan pengembangan kompetensi melalui pelatihan berbasis kompetensi Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dan District Food Inspector (DFI) Junior bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai perpanjangan tangan Badan POM dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan di daerah sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Pelatihan tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten / Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan. Pelatihan PKP Pertama dan DFI Junior ini mendukung pencapaian pencapaian sasaran strategis PPSDM POM Ke-1 yaitu meningkatnya kompetensi SDM

pengawasan Obat dan Makanan dengan indikator kinerja Jumlah SDM POM yang tersertifikasi sesuai Standar. Kegiatan ini juga mendukung pencapaian sasaran strategis PPSDM POM Ke-4 yaitu meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM dengan indikator kegiatan yakni 1. Nilai Kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan 2. Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi.

3.1.1. PELATIHAN PKP PERTAMA

Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama Tahun 2024 dilaksanakan untuk 300 peserta. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, telah dilaksanakan Pelatihan PKP Pertama sebanyak masing-masing 10 (sepuluh) angkatan dengan total 300 (tiga ratus) peserta dari target 300 (tiga ratus) peserta. Peserta terdiri dari 80 (delapan puluh) orang laki - laki dan 220 (dua ratus dua puluh) orang perempuan. Adapun rincian pelaksanaan pelatihan sebagaimana dalam Tabel berikut:

Tabel 6. Rincian Penyelenggaraan Pelatihan PKP Pertama

Pelaksanaan	Lokasi	Target (orang)	Realisasi (orang)
		PKP	PKP
29 Jan s.d 1 Feb 2024	Solo	30	30
19 s.d 22 Februari 2024	Makassar	30	30
4 s.d 7 Maret 2024	Denpasar	30	30
23 s.d 26 April 2024	Palangkaraya	30	30
13 s.d 16 Mei 2024	Yogyakarta	30	30
10 s.d 13 Juni 2024	Batam	30	30
15 s.d 18 Juli 2024	Surabaya	30	30
6 s.d 9 Agustus 2024	Padang	30	30
9 s.d 12 September 2024	Banten	30	30
21 sd. 24 Oktober 2024	Jakarta	30	30
Total		300	300

Pelatihan Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama Tahun 2024 terselenggara dengan Baik. Hal tersebut dapat dilihat dari rata - rata keseluruhan evaluasi penyelenggaraan dan fasilitas Pelatihan yang diisi oleh peserta pelatihan dan memperoleh nilai 4,71. Peserta merasa senang mengikuti pelatihan dan dapat memperoleh banyak hal dan ilmu baru yang dapat mereka gunakan ketika melakukan penyuluhan kepada pelaku usaha Industri Rumah Tangga Pangan olahan (IRTP). Pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan juga Baik, dilihat dari nilai rata - rata kelulusan seluruh peserta PKP Pertama Tahun 2024 adalah 87,06.

Selama proses penyelenggaraan pelatihan mulai dari perencanaan sampai dengan selesai, tentunya ada hambatan yang dilalui. Adapun salah satu hambatan yang dialami adalah adanya peserta yang telah terpilih mengundurkan diri karena alasan pribadi. Dalam menangani hambatan tersebut, diharapkan kedepannya *Training Officer Course* (TOC) pelatihan dapat melakukan daftar ulang guna mengkonfirmasi kehadiran peserta beberapa minggu sebelum pelatihan dimulai. Sehingga dapat mencari peserta pengganti yang dapat mengikuti pelatihan PKP Pertama.



Gambar 3. Foto-foto saat pelatihan PKP Pertama

3.1.2. PELATIHAN DFI JUNIOR

Pelatihan *District Food Inspector* (DFI) Junior Tahun 2024 dilaksanakan untuk 300 peserta. Sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, telah dilaksanakan Pelatihan DFI *Junior* sebanyak masing-masing 10 (sepuluh) angkatan dengan

total 300 (tiga ratus) peserta dari target 300 (tiga ratus) peserta. Peserta terdiri dari 71 (tujuh puluh satu) orang laki - laki dan 229 (dua ratus dua puluh sembilan) orang perempuan. Adapun rincian pelaksanaan pelatihan sebagaimana dalam Tabel berikut:

Tabel 7. Rincian Penyelenggaraan Pelatihan PKP Pertama

Pelaksanaan	Lokasi	Target (orang)	Realisasi (orang)
		DFI	DFI
30 Jan s.d 2 Feb 2024	Solo	30	30
20 s.d 23 Februari 2024	Makassar	30	30
5 s.d 8 Maret 2024	Denpasar	30	30
22 s.d 25 April 2024	Palangkaraya	30	30
14 s.d 17 Mei 2024	Yogyakarta	30	30
11 s.d 14 Juni 2024	Batam	30	30
16 s.d 19 Juli 2024	Surabaya	30	30
5 s.d 8 Agustus 2024	Padang	30	30
10 s.d 13 September 2024	Banten	30	30
14 sd. 17 Oktober 2024	Jakarta	30	30
Total		300	300

Pelatihan *District Food Inspector* (DFI) Junior Tahun 2024 terselenggara dengan Baik. Hal tersebut dapat dilihat dari rata - rata keseluruhan evaluasi penyelenggaraan dan fasilitas Pelatihan yang diisi oleh peserta pelatihan dan memperoleh nilai 4,75. Peserta merasa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan mereka di instansi kerjanya. Portofolio dokumen - dokumen pengawasan makanan yang diajarkan dapat dijadikan panduan dalam melakukan inspeksi atau pengawasan IRTP di daerahnya masing - masing. Adapun nilai rata - rata kelulusan seluruh peserta DFI Junior Tahun 2024 adalah 92,82 atau masuk dalam kategori memuaskan.

Guna memudahkan pemahaman pelatihan DFI Junior, peserta diminta untuk bermain peran (*role play*) ketika melakukan inspeksi ke IRTP. Hal tersebut membutuhkan perubahan set ruangan mendadak di tengah-tengah pembelajaran. Adapun rekomendasi kedepannya dapat memastikan kepada Widyaiswara kapan akan melakukan *role play*. Sehingga TOC dapat berkoordinasi dengan tim perlengkapan untuk merubah layout atau tatanan ruang kelas yang digunakan oleh peserta.



Gambar 4. Foto-foto saat pelatihan DFI Junior

3.2. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM BADAN POM

Pengembangan kompetensi SDM Badan POM meliputi pengembangan kompetensi manajerial, sosial dan kultural serta pengembangan kompetensi teknis. Kegiatan pengembangan kompetensi SDM Badan POM ini masuk dalam Sasaran Kinerja Ke-4 yaitu Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM dan mendukung indikator kinerja utama PPSDM POM dalam indikator (1) Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM, (2) Persentase kerja sama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti, (3) Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan (4) Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi.

3.2.1. PELATIHAN PPNS

Tujuan diselenggarakan pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap calon Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana terkait Obat dan Makanan. pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 1

angkatan (pola 400 JP) dengan peserta berjumlah 30 orang (21 pria dan 9 wanita) yang berasal dari 1 unit Badan POM Pusat, 6 unit Balai Besar POM, 10 unit Balai POM, dan 12 unit Loka POM. Pelatihan dilaksanakan pada 23 April s.d. 21 Juni 2024 bertempat di Pusdik Reskrim Lemdikpol POLRI, Megamendung, Cipayung Bogor. Keseluruhan peserta dinyatakan lulus dari pelatihan ini. Kendala dalam pelatihan ini yaitu Keterbatasan Waktu dan Materi, dengan pola 400 JP, beberapa materi masih terasa padat, sehingga peserta kesulitan dalam memahami seluruh aspek penyidikan secara mendalam, rekomendasi perbaikannya yaitu menyesuaikan distribusi waktu antar materi agar lebih seimbang, dengan menambahkan sesi diskusi interaktif untuk memperdalam pemahaman peserta.

3.2.2. PELATIHAN PELAYANAN PUBLIK

Tujuan diselenggarakannya pelatihan ini bagi petugas pelayanan publik Badan POM adalah petugas diharapkan mampu :

- a. Menguasai diri atau memiliki *self control* dalam memberikan layanan kepada *customer*
- b. Memiliki kesadaran dan mentalitas pelayanan prima dalam menghadapi komplain
- c. Memiliki *skill set* dalam memecahkan masalah
- d. Melakukan *service recovery* sesuai dengan standar yang telah ditetapkan
- e. Mampu menganalisa dan melakukan *benchmarking* serta membuat rencana layanan yang dapat diterapkan di unit masing-masing

Pelatihan dilaksanakan oleh ESAY sebanyak 1 angkatan secara luring di Jakarta pada 5-7 Februari 2024 dengan jumlah peserta 35 orang (5 pria dan 30 wanita) yang berasal dari 2 unit Badan POM Pusat, 4 unit Balai Besar POM, 4 unit Balai POM, dan 14 unit Loka POM. Keseluruhan peserta dinyatakan lulus dari pelatihan ini. Kendala dari pelatihan ini adalah Peserta belum sepenuhnya memiliki waktu untuk menganalisis, melakukan benchmarking, dan menyusun rencana layanan yang konkret untuk diterapkan di unit masing-masing, rekomendasi perbaikannya yaitu Mengadakan sesi follow-up atau pendampingan setelah pelatihan untuk memastikan implementasi hasil pelatihan di unit masing-masing.



Gambar 5. Pelatihan Pelayanan Publik

3.2.3. PELATIHAN INSPEKTUR CDOB JUNIOR

Tujuan diselenggarakan pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap calon Inspektur CDOB Junior dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan fasilitas distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor serta fasilitas pelayanan kefarmasian. pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 1 angkatan dengan peserta berjumlah 40 orang (8 pria dan 32 wanita) yang berasal dari 1 unit Badan POM Pusat, 3 unit Balai Besar POM, 6 unit Balai POM, dan 24 unit Loka POM. Pelatihan dilaksanakan pada 19 Februari 2024 - 22 Maret 2024 secara blended learning (daring melalui aplikasi SiPandai dan luring di Makassar serta off campus di unit kerja masing-masing peserta) . Keseluruhan peserta dinyatakan lulus dari pelatihan ini. Kendala dalam pelatihan yaitu beberapa peserta mengalami kendala teknis saat mengikuti sesi daring melalui aplikasi SiPandai, seperti koneksi internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat yang digunakan, rekomendasi perbaikan untuk kendala diatas yaitu melakukan mentoring untuk penggunaan aplikasi sebelum pelatihan dimulai untuk mengurangi kendala teknis.



Gambar 6. Pelatihan Inspektur CDOB Junior

3.2.4. PELATIHAN INSPEKTUR CDOB SENIOR

Tujuan diselenggarakan pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap calon Inspektur CDOB Senior dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan fasilitas distribusi Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor serta fasilitas pelayanan kefarmasian. pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 1 angkatan dengan peserta berjumlah 32 orang (6 pria dan 26 wanita) yang berasal dari 1 unit Badan POM Pusat, 11 unit Balai Besar POM, 8 unit Balai POM, dan 8 unit Loka POM. Pelatihan dilaksanakan pada 24 Juni - 23 Juli 2024 secara blended learning (daring melalui aplikasi SiPandai dan luring di Semarang serta off campus di unit kerja masing-masing peserta). Keseluruhan peserta dinyatakan lulus dari pelatihan ini. kendala dalam pelatihan ini yaitu Pada sesi off-campus di unit masing-masing, beberapa peserta mengalami kendala dalam menerapkan teori yang telah dipelajari karena kurangnya bimbingan langsung dari fasilitator dan beberapa peserta masih harus menjalankan tugas rutin di unit kerja mereka selama sesi off-campus, yang dapat mengurangi fokus mereka terhadap pelatihan, rekomendasi perbaikan pada permasalahan diatas yaitu menyediakan sesi konsultasi jarak jauh dengan fasilitator selama periode off-campus agar peserta mendapatkan bimbingan dalam menerapkan materi pelatihan dan Memberikan panduan yang lebih jelas kepada peserta dan unit kerja mereka agar dapat mengalokasikan waktu yang cukup untuk pelatihan tanpa terganggu oleh tugas rutin.



Gambar 7. Pelatihan Inspektur CDOB Senior

3.2.5. ORIENTASI PPPK

Tujuan diselenggarakan Orientasi PPPK ini adalah untuk memperkenalkan nilai - nilai, tugas dan fungsi ASN kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Orientasi PPPK ini mendukung Indikator Kinerja Utama PPSDM POM yaitu Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan Pengembangan Kompetensi. Orientasi ini dilaksanakan mengingat PPPK memerlukan pemahaman tentang nilai dan fungsi ASN sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintahan. Orientasi PPPK dilaksanakan sebanyak 1 angkatan dengan peserta berjumlah 159 peserta dimana terdiri dari 91 orang yang berasal dari Unit Kerja Pusat, 28 orang dari Balai Besar POM, 17 orang dari Balai POM dan 23 orang dari Loka POM yang dilaksanakan pada tanggal 22 s.d 24 April 2025 dimana setara dengan 23 Jam Pelajaran secara *blended learning* (daring melalui Zoom Meeting bagi peserta Unit Pelaksana Teknis) dan Luring di Aula Merah Putih Lantai 8 bagi peserta unit kerja pusat. Peserta setelah melaksanakan Orientasi PPPK selanjutnya mengikuti Materi Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN oleh Lembaga Administrasi Negara melalui pembelajaran mandiri *Massive Open Online Course (MOOC)* setara dengan 45 Jam Pelajaran. kendala dalam kegiatan yaitu beberapa peserta mengalami kendala teknis saat menggunakan aplikasi IDEAS dan juga koneksi internet yang tidak stabil, rekomendasi perbaikan pada permasalahan diatas yaitu Melakukan uji coba aplikasi sebelum pelatihan untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi masalah teknis dan Meng-upgrade bandwidth internet atau menambah akses poin (*router*) untuk mendukung jumlah pengguna yang lebih banyak secara bersamaan.



Gambar 8. Orientasi PPPK

3.2.6. PELATIHAN FOOD INSPECTOR MUDA

Tujuan diselenggarakan pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap calon Food Inspector Muda dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan fasilitas produksi pangan olahan risiko menengah tinggi dan fasilitas peredaran pangan olahan. pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 1 angkatan dengan peserta berjumlah 34 orang (8 pria dan 26 wanita) yang berasal dari 2 unit Badan POM Pusat, 11 unit Balai Besar POM, 6 unit Balai POM, dan 10 unit Loka POM. Pelatihan dilaksanakan pada 13 s.d 31 Mei 2024 secara *blended learning* (daring melalui aplikasi SiPandai dan luring di Medan). Keseluruhan peserta dinyatakan lulus dari pelatihan ini. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan ini adalah keterbatasan interaksi dan diskusi mendalam selama sesi daring, yang dapat mempengaruhi pemahaman peserta terhadap materi. Sebagai rekomendasi perbaikan, ke depannya dapat ditingkatkan penggunaan metode pembelajaran interaktif dalam sesi daring, seperti studi kasus, simulasi, atau diskusi kelompok kecil, untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman peserta.



Gambar 9. Pelatihan Food Inspector Muda

3.2.7. PELATIHAN FOOD INSPECTOR MADYA

Tujuan diselenggarakan pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap calon Food Inspector Madya dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan fasilitas produksi Air Minum dalam Kemasan (AMDK). pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 1 angkatan dengan peserta berjumlah 30 orang (6 pria dan 24 wanita) yang berasal dari 2 unit Badan POM Pusat, 11 unit Balai Besar POM, 8 unit Balai POM, dan 3 unit Loka POM. Pelatihan dilaksanakan pada 4 - 22 Maret 2024 secara *blended learning* (daring melalui aplikasi SiPandai dan luring di Surabaya). Keseluruhan peserta dinyatakan lulus dari pelatihan ini. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelatihan ini adalah keterbatasan waktu untuk praktik lapangan, sehingga peserta belum sepenuhnya mendalami aspek teknis pengawasan di fasilitas produksi AMDK. Sebagai rekomendasi perbaikan, ke depannya durasi atau jadwal praktik lapangan dapat diperpanjang atau disusun lebih efektif agar peserta memiliki waktu yang cukup untuk memahami proses produksi dan pengawasan secara langsung.

3.2.8. PELATIHAN INSPEKTUR KOSMETIK JUNIOR

Tujuan diselenggarakan pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap calon Inspektur Kosmetik Junior dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan fasilitas produksi dan fasilitas distribusi kosmetik. pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 1 angkatan dengan peserta berjumlah 34 orang (4 pria dan 30 wanita) yang berasal dari 1 unit Badan POM Pusat, 10 unit Balai Besar POM, 13 unit Balai POM, dan 6 unit Loka POM. Pelatihan dilaksanakan pada 27 Mei – 6 Juni 2024 secara *blended learning* (daring melalui aplikasi SiPandai dan luring di Denpasar). Keseluruhan peserta dinyatakan lulus dari pelatihan ini. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelatihan ini adalah beberapa peserta mengalami kesulitan teknis dalam mengakses materi dan menyelesaikan tugas di aplikasi SiPandai, yang menghambat kelancaran pembelajaran daring. Sebagai rekomendasi perbaikan, ke depannya perlu dilakukan sosialisasi atau pendampingan teknis sebelum pelatihan dimulai, serta memastikan sistem SiPandai berjalan optimal dengan dukungan teknis yang responsif selama pelatihan berlangsung.



Gambar 10. Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior

3.2.9. PELATIHAN INSPEKTUR OBASK JUNIOR

Tujuan diselenggarakan pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap calon Inspektur Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan (OBASK) Junior dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan pengawasan fasilitas produksi dan fasilitas distribusi OBASK. pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 1 angkatan dengan peserta berjumlah 34 orang (10 pria dan 24 wanita) yang berasal dari 1 unit Badan POM Pusat, 13 unit Balai Besar POM, 6 unit Balai POM, dan 10 unit Loka POM. Pelatihan dilaksanakan pada 19 - 30 Agustus 2024 secara blended learning (daring melalui aplikasi SiPandai dan luring di Surakarta). Keseluruhan peserta dinyatakan lulus dari pelatihan ini. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelatihan ini adalah tempat praktik yang digunakan sudah memiliki sistem yang sangat baik, sehingga peserta kurang mendapatkan pengalaman dalam menangani permasalahan nyata yang mungkin mereka temui di daerah masing-masing. Sebagai rekomendasi perbaikan, ke depannya dapat dipilih atau ditambahkan tempat praktik dengan variasi kondisi fasilitas yang lebih beragam, termasuk yang masih memiliki

tantangan dalam kepatuhan, agar peserta dapat berlatih mengidentifikasi dan menangani permasalahan yang lebih relevan dengan kondisi di daerah mereka.



Gambar 11. Pelatihan Inspektur OBASK Junior

3.2.10. PELATIHAN LEADERSHIP DI MANDIRI UNIVERSITY

Tujuan diselenggarakan pelatihan *Leadership Batch* 1 dan 2 ini adalah untuk memberikan bekal dan memperkuat kepala unit kerja di Badan POM sebagai pimpinan satuan kerja (satker) terhadap pengelolaan manajemen, sehingga semua Kepala Unit Kerja di Badan POM memiliki kemampuan dalam pengelolaan manajemen yang sama, serta mampu meningkatkan profesionalitas. Pelatihan ini mendukung Indikator Kinerja Utama PPSDM POM yaitu Presentasi SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya. Pelatihan *Leadership Batch* 1 dilaksanakan pada Tanggal 26 Februari sd 1 Maret 2024 pembelajaran secara mandiri dan 4 sd 6 Maret 2024 pembelajaran secara klasikal/luring di Mandiri University Nawasena. Peserta terdiri dari Seluruh Kepala UPT Badan POM sebanyak 76 (tujuh puluh enam) orang peserta, namun ada 1 (satu) orang peserta berhalangan hadir sehingga Pelatihan di hadiri sebanyak 75 (tujuh puluh lima) orang peserta. Pelatihan *Leadership Batch* 2 dilaksanakan secara klasikal/ luring di Mandiri University Nawasena pada tanggal 6 - 7 Agustus 2024 dengan arahan oleh Ibu Plt. Kepala Badan POM dan Narasumber dari Mandiri University. Peserta terdiri dari

Kepala Unit Kerja Pusat (Eselon I dan II) sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang dan Kepala Balai PPPOMN sebanyak 3 (tiga) orang, namun 4 orang berhalangan hadir sehingga Pelatihan dihadiri sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang.



Gambar 12. Pelatihan Leadership di Mandiri University

3.2.11. PELATIHAN BAHASA ISYARAT

PPSDM POM bekerja sama dengan Lembaga Bahasa Universitas Indonesia mengadakan Pelatihan Bahasa Isyarat. Peserta pelatihan ini terdiri dari 30 orang yang merupakan bagian *Front Office* atau pun bagian pelayanan publik yang dirasa perlu untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam bidang pelayanan publik, salah satunya terkait bahasa isyarat, mengingat *stakeholder* ataupun konsumen Badan POM bisa saja ditemui dari teman – teman disabilitas, sehingga informasi dari Badan POM dapat tersampaikan dengan baik, baik itu kepada *stakeholder* ataupun konsumen yang berkonsultasi ke Badan POM sehingga terjadi komunikasi yang efektif. Pelatihan diselenggarakan untuk memperkenalkan dunia Tuli sehingga para peserta memiliki pemahaman yang baik tentang masyarakat Tuli, bahasa isyarat, dan hal lainnya dari sudut pandang sosial-budaya. Selain itu, peserta ditargetkan mampu memberikan layanan yang aksesibel bagi masyarakat Tuli, khususnya terkait obat-obatan, makanan, alat kecantikan, dan hal terkait sehingga dapat meningkatkan Pelayanan Publik Badan POM di semua lini. Pelatihan ini mendukung Indikator Kinerja Utama PPSDM POM yaitu Presentasi SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya.

Pelatihan dilaksanakan secara *blended learning* (pembekalan secara luring di Jakarta dan pembelajaran secara daring) pada tanggal 12 Agustus - 17 Oktober 2024. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelatihan ini adalah adanya peserta yang membawa anak, dan anak tersebut rewel sehingga mengganggu jalannya sesi pelatihan. Sebagai rekomendasi perbaikan, ke depannya dapat dibuat kebijakan yang lebih jelas mengenai kehadiran keluarga selama pelatihan atau menyediakan fasilitas khusus bagi peserta yang membawa anak agar tidak mengganggu jalannya kegiatan.



Gambar 13. Pelatihan Bahasa Isyarat

3.2.12. PELATIHAN KIE MUDA

Tujuan diselenggarakan pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap Pengawas Farmasi dan Makanan dalam melaksanakan tugasnya yaitu Menyusun rancangan materi penyuluhan/ produk Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Tingkat Kesulitan II, Melakukan perbaikan terhadap review rancangan materi penyuluhan/ produk KIE, Melakukan penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dalam bentuk kelompok masyarakat terbatas (organisasi kemasyarakatan dan murid SD), pertanyaan bersifat spesifik, mendalam dan memerlukan analisis lebih lanjut; Melakukan layanan informasi/penanganan pengaduan dalam bentuk tatap muka perorangan atau melalui telepon/SMS, fax, atau email untuk pertanyaan dengan tingkat kesulitan II (bersifat spesifik,

mendalam, dan memerlukan analisis lebih lanjut); dan Melakukan Penyuluhan dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui pameran sebagai pramujaga. pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 1 angkatan dengan peserta berjumlah 30 orang (7 pria dan 23 wanita) yang berasal dari 1 unit Badan POM Pusat, 12 unit Balai Besar POM, 10 unit Balai POM, dan 5 unit Loka POM. Pelatihan dilaksanakan pada 3-13 September 2024 secara blended learning (daring melalui aplikasi SiPandai dan luring di Bandung). Keseluruhan peserta dinyatakan lulus dari pelatihan ini. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelatihan ini adalah keterbatasan waktu dalam sesi praktik penyuluhan, sehingga peserta belum sepenuhnya mendapatkan pengalaman yang mendalam dalam menghadapi berbagai jenis audiens. Sebagai rekomendasi perbaikan, ke depannya durasi atau frekuensi sesi praktik dapat ditambah, serta diberikan variasi skenario penyuluhan agar peserta lebih siap menghadapi situasi nyata di lapangan.



Gambar 14. Pelatihan KIE Muda

3.2.13. PELATIHAN TEKNIS PENILAIAN DOKUMEN INFORMASI PRODUK (DIP) KOSMETIK TINGKAT DASAR TAHUN 2024

Tujuan diselenggarakan pelatihan ini adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap calon Penilai Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetik dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan penilaian DIP mandiri untuk produk-produk kosmetik yang berada dalam cakupan pengawasan. pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 2 angkatan dengan angkatan 1 pesertanya berjumlah 34 orang (1 pria dan 33 wanita) yang berasal dari 1 unit Badan POM Pusat, 14 unit Balai Besar POM, 6 unit Balai POM, dan 1 unit Loka POM. Pelatihan dilaksanakan pada 26 Februari 2024 – 8 Maret 2024 secara blended learning (daring melalui aplikasi SiPandai dan luring di Jakarta) . Sedangkan angkatan 2 pesertanya berjumlah 32 orang (4 pria dan 28 wanita) yang berasal dari 1 unit Badan POM Pusat, 8 unit Balai Besar POM, 7 unit Balai POM, dan 7 unit Loka POM. Pelatihan dilaksanakan pada 24 September 2024 – 3 Oktober 2024 secara daring penuh. Keseluruhan peserta dinyatakan lulus dari pelatihan ini. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelatihan ini adalah kesulitan peserta dalam memahami materi penilaian DIP secara mendalam saat pelatihan dilakukan sepenuhnya daring, karena keterbatasan interaksi langsung dengan instruktur. Sebagai rekomendasi perbaikan, ke depannya dapat ditambahkan sesi diskusi atau bimbingan teknis secara sinkron melalui video conference, sehingga peserta dapat lebih mudah berdiskusi dan mendapatkan penjelasan langsung dari instruktur.

3.2.14. PELATIHAN CALON PETUGAS HAJI

Kegiatan Pelatihan Calon Petugas Haji Badan POM Tahun 2024 ini bertujuan untuk mempersiapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja (kompetensi) untuk melaksanakan tugas dalam rangka memenuhi kebutuhan internal dari Badan POM sebagai Petugas Haji dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Pelatihan ini mendukung Indikator Kinerja Utama PPSDM yaitu Presentasi SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM. Kegiatan ini mempertimbangkan kebutuhan Pengembangan Kompetensi untuk Pegawai Badan POM yang akan mengikuti Petugas Haji, dengan jumlah peserta sebanyak 30 (tiga puluh) orang pegawai di bidang Pengawasan Obat, Pengawasan Pangan, Pengujian Obat dan Makanan serta Sekretariat di lingkungan Badan POM. Rincian peserta yaitu terdiri dari 18 pria dan 12 wanita yang berasal dari 15 unit Badan POM Pusat, 11 unit Balai Besar

POM dan 2 unit Balai POM. Pelatihan Pelaksanaan Pelatihan Calon Petugas Haji Tahun 2024 ini dilaksanakan secara luring setara dengan 41 Jam Pelajaran, selama 4 (empat) hari pada tanggal 22 - 25 Oktober 2024 di Surakarta. Keseluruhan peserta dinyatakan lulus dari pelatihan ini. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelatihan ini adalah padatnya jadwal pelatihan dalam waktu yang relatif singkat, sehingga peserta mengalami keterbatasan waktu untuk mendalami setiap materi secara optimal. Sebagai rekomendasi perbaikan, ke depannya dapat dipertimbangkan penyesuaian durasi pelatihan atau pengaturan jadwal yang lebih fleksibel, sehingga peserta memiliki waktu yang cukup untuk memahami dan mempraktikkan materi dengan lebih baik.



Gambar 15. Pelatihan Calon Petugas Haji

3.2.15. PELATIHAN KERJA SAMA DENGAN TGA AUSTRALIA

Pada tanggal 17-20 September 2024 dilaksanakan pelatihan terkait teknis pengawasan obat bersama *Therapeutic Goods Administration* (TGA) Australia untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan teknis pegawai Badan POM dalam melakukan asesmen bahan aktif obat dan menggunakan pendekatan berbasis risiko dalam evaluasi API. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid yakni luring di aula Gedung Merah Putih Badan POM Lt. 8 dan daring melalui aplikasi zoom webinar. Training dibuka oleh Kepala Badan POM dan Nara sumber yang mengisi materi ini adalah Dr. Karen Loft dan Dr Greg Tredwell dari TGA Australia. pelatihan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis pegawai Badan POM, tetapi juga untuk

memastikan bahwa sistem pengawasan obat di Indonesia terus berkembang dan sejajar dengan standar internasional, sehingga dapat memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa obat yang beredar bermutu, aman dan berkhasiat. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelatihan ini adalah perbedaan zona waktu dengan narasumber dari TGA Australia, yang menyebabkan keterbatasan waktu interaksi langsung dan diskusi mendalam. Sebagai rekomendasi perbaikan, ke depannya dapat dilakukan penyesuaian jadwal sesi atau menyediakan rekaman materi dengan sesi tanya jawab terjadwal agar peserta tetap dapat berinteraksi optimal dengan narasumber.



Gambar 16. Pelatihan Kerja Sama dengan TGA

3.2.16. PELATIHAN MASA PERSIAPAN PENSIUN (MPP)

Pelatihan ini diberikan kepada pegawai Badan POM yang akan memasuki masa purnabakti dengan tujuan untuk menyiapkan aspek mental (mindset) sebagai pondasi, finansial, kesehatan serta aktivitas yang akan direncanakan untuk mengisi waktu setelah memasuki purnabakti dari Badan POM. Pelatihan diselenggarakan bekerjasama dengan ESQ MPP dengan jumlah peserta sebanyak 80 peserta (16 pria dan 64 wanita) yang berasal dari 6 unit Badan POM Pusat, 19 unit Balai Besar POM dan 9 unit Balai POM. Pelatihan dilaksanakan tanggal 5 – 7 November secara luring di Kota Bogor. Salah satu kendala yang dihadapi dalam pelatihan ini adalah adanya perbedaan kebutuhan dan minat peserta terkait perencanaan purnabakti, sehingga tidak semua materi yang disampaikan relevan bagi seluruh peserta. Sebagai rekomendasi perbaikan, ke depannya dapat dilakukan asesmen awal terhadap minat dan kebutuhan peserta, sehingga materi pelatihan dapat lebih disesuaikan dan memberikan manfaat yang lebih optimal.



Gambar 17. Pelatihan Masa Persiapan Pensiun (MPP)

3.2.17. PELATIHAN PENGELOLAAN KEAMANAN PANGAN BERBASIS HACCP

Tujuan utama dari pelatihan ini adalah untuk Meningkatkan Kompetensi Peserta dalam menyusun dan mengimplementasikan rencana HACCP yang sesuai dengan standar keamanan pangan nasional dan internasional; mendukung kepatuhan regulasi melalui pemahaman mendalam tentang peraturan yang relevan di tingkat nasional maupun global; serta memastikan keamanan produk pangan dengan mengurangi risiko bahaya terhadap konsumen. Dilaksanakan secara luring pada tanggal 4 - 6 Desember 2024 di Jakarta dan diikuti oleh 10 peserta (2 pria dan 8 wanita) yang berasal dari 2 unit Badan POM Pusat. Keseluruhan peserta dinyatakan lulus dari pelatihan ini. Salah satu kendala dalam pelatihan ini adalah adanya kesamaan antara tugas yang diberikan selama pelatihan dengan tugas yang harus disusun untuk sertifikasi, namun tugas tersebut tidak dapat diklaim saat proses sertifikasi. Hal ini mengakibatkan peserta perlu menyusun ulang tugas, sehingga waktu yang tersedia menjadi terbatas dan prosesnya lebih menuntut. Sebagai rekomendasi perbaikan, ke depannya perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait agar tugas yang dikerjakan selama pelatihan dapat diselaraskan dengan persyaratan sertifikasi, sehingga peserta dapat mengoptimalkan waktu dan fokus pada pemahaman serta implementasi materi.



Gambar 18. Pelatihan Pengelolaan Keamanan Pangan Berbasis HACCP

3.2.18. PELATIHAN CERTIFIED RISK MANAGEMENT OFFICER (CRMO)

Program pelatihan ini bertujuan untuk menghasilkan staf yang menguasai teknik dan proses manajemen risiko secara utuh, rinci, aplikatif dan mandiri. Dilaksanakan secara luring pada tanggal 16 – 18 Desember 2024 di Jakarta dan diikuti oleh 20 peserta (6 pria dan 14 wanita) yang seluruhnya berasal dari PPSDM POM. Keseluruhan peserta dinyatakan lulus dari pelatihan ini. Salah satu kendala dalam pelatihan ini adalah beberapa peserta yang belum memiliki pemahaman awal mengenai Certified Risk Management Officer (CRMO) dan materi yang disampaikan tidak sepenuhnya relevan dengan tugas yang mereka jalankan, sehingga pemahaman dan implementasi menjadi kurang optimal.

Sebagai rekomendasi perbaikan, ke depannya dapat dilakukan asesmen awal terhadap latar belakang peserta untuk memastikan kesesuaian materi dengan kebutuhan mereka, serta menyediakan sesi pengenalan konsep dasar sebelum pelatihan utama dimulai agar peserta dapat lebih mudah memahami materi.



Gambar 19. Pelatihan Certified Risk Management Officer (CRMO)

3.3. PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM MELALUI PENDIDIKAN LANJUTAN

PPSDM POM melakukan pengembangan kompetensi Dalam rangka mempersiapkan ASN yang handal dalam menghadapi tantangan global, maka Badan POM melalui PPSDM POM berupaya untuk dapat mengembangkan kompetensi pegawai melalui Pendidikan Lanjutan dan Pelatihan baik di dalam maupun di Luar Negeri. Dalam hal ini, dilakukan berbagai kegiatan mulai dari pembahasan usulan pegawai Badan POM yang akan melanjutkan pendidikan, *Education Expo* untuk memperluas informasi studi luar negeri hingga *Boot Camp Scholarship* untuk meningkatkan peluang pegawai Badan

POM dalam mendapatkan Scholarship. Kegiatan ini masuk dalam Sasaran Kinerja Ke-4 yaitu Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM serta mendukung indikator kinerja utama PPSDM POM yakni indikator (1) Persentase SDM Badan POM yang dikembangkan kompetensinya oleh PPSDM POM, (2) Persentase kerja sama pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti, (3) Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi dan (4) Persentase SDM Pengawas Obat dan Makanan yang meningkat pengetahuannya setelah mendapatkan pengembangan kompetensi. Uraian untuk masing-masing kegiatannya dijelaskan lebih detail sebagaimana tercantum di bawah ini.

3.3.1. PEMBAHASAN EVALUASI CPTB

Selama tahun 2024, telah dilaksanakan kegiatan Pembahasan Evaluasi CPTB sebanyak 4 (empat) kali di masing-masing tri wulan. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dengan menyertakan Tim terkait dari seluruh unit terkait. Selain dilakukan pembahasan CPTB, terdapat sharing session dari Narasumber antara lain Bapak Tyas Wida Handoko S.I.A, M.Sc, dari Internasional FIA, Universitas Indonesia serta Ibu Ponti Caroline, selaku Representative of University of Groningen and Wageningen University. Selama tahun 2024 ini pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar berjumlah 77 orang untuk PFM (62 Perempuan dan 15 Laki-Laki) dan 91 orang untuk Non PFM (35 Perempuan dan 56 Laki-laki). Sedangkan yang melaksanakan Tugas Belajar Mandiri atau Beasiswa Non Badan POM adalah sejumlah 124 Orang (76 Perempuan dan 46 Laki-laki). Dari data ini tampak bahwa untuk pendidikan lanjutan telah terbuka kesempatan yang sama untuk semua sesuai dengan prinsip Pengarusutamaan Gender.



Gambar 20. Pembahasan CPTB

3.3.2. EDUCATION EXPO

Dalam rangka mewujudkan Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan SDM unggul untuk menuju Birokrasi Kelas Dunia serta sebagai bagian dari kegiatan menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79 PPSDM menyelenggarakan

kegiatan Education Expo pada tanggal 19-20 Agustus 2024. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid sehingga melibatkan pegawai Badan POM baik dari Unit Kerja Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis di Daerah. Selain pameran pendidikan dari berbagai negara, secara paralel tersedia pula Sharing Session dari lembaga penyedia beasiswa antara lain LPDP dan Uni-Italia Indonesia. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Kepala Badan POM Bapak Dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., MD., Ph.D.



Gambar 21. Education Expo

3.3.3. PENDIDIKAN LANJUTAN DI LUAR NEGERI

Badan POM tidak hanya berupaya meningkatkan pendidikan pegawainya di dalam negeri namun juga luar negeri, melalui program scholarship. Selama tahun 2024 ini, guna mendukung Badan POM agar menuju Birokrasi kelas dunia dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan minat dan motivasi pegawai melanjutkan pendidikan di luar negeri. Hingga akhir Tahun 2024 capaian pegawai Badan POM yang mendapatkan beasiswa untuk studi di luar negeri adalah sbb:

No	Nama Universitas dan Negara	Jumlah Pegawai	Sumber Pendanaan
1.	Yonsei University, Korea	1	KOICA
2.	Wageningen University, Belanda	6	LPDP
3.	Monash University, Australia	2	AAS dan LPDP
4.	Melbourne University, Australia	4	LPDP
5.	Leiden University, Belanda	1	LPDP
6.	Mae Fah Luang University, Thailand	1	Thailand International Postgraduate Program (TIPP)
7.	School of Pharmacy University of Washington, USA	1	LPDP
8.	Charite, Universitätsmedizin, German	1	Mandiri
9.	University of Technology Sydney, Australia	1	LPDP
10.	University of Auckland, New Zealand	1	LPDP
11.	Auckland University of Technology, Selandia Baru	1	Manaaki New Zealand Scholarship

Gambar 22. Pendidikan Lanjutan di Luar Negeri

3.3.4. BOOT CAMP SCHOLARSHIP

Badan POM melalui PPSDM POM terus mendorong pegawai untuk melakukan pengembangan kompetensi termasuk dengan melakukan Pendidikan lanjutan. Oleh sebab itu, pegawai perlu dibekali kemampuan untuk melihat peluang beasiswa. Selain itu pegawai perlu diberikan bimbingan dalam melengkapi persyaratan beasiswa. Boot Camp Scholarship ini bertujuan untuk memfasilitasi pegawai Badan POM yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk melanjutkan Pendidikan luar negeri dengan jalur beasiswa. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 Batch secara luring yakni tanggal 1 s.d 4 Oktober 2024 dan 14 s.d 18 Oktober 2024.



Gambar 23. Foto kegiatan Boot Camp Scholarship

3.4. PENGEMBANGAN KOMPETENSI PIHAK KETIGA

Dalam rangka peningkatan kualitas manusia untuk membangun Sumber Daya Manusia yang unggul terkait Obat dan Makanan PPSDM POM juga membuka pengembangan kompetensi untuk stakeholder di bidang pengawasan Obat dan Makanan, stakeholder pihak ketiga yang terlibat diantaranya Universitas, SMK/SMA, dan SMP/ sederajat, bentuk penyelenggaraan yang dilakukan seperti praktek kerja profesi apoteker (PKPA), Magang siswa/mahasiswa, dan Kunjungan.

3.4.1. PRAKTEK KERJA PROFESI APOTEKER

Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) merupakan media yang sangat penting bagi mahasiswa profesi apoteker untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian. PKPA merupakan pelatihan yang sangat strategis bagi mahasiswa profesi apoteker untuk menjadi calon apoteker yang handal di masa depan. Pada tahun 2024, PKPA di Badan POM

dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) periode, yaitu pada bulan Maret, September, dan Desember 2024, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 8. Pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Periode	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta
Maret 2024	4 s.d 29 Maret 2024	Institut Teknologi Bandung (10) Universitas Ahmad Dahlan (13) Universitas Brawijaya (1) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (7) Universitas Padjadjaran (5) Universitas Pancasila (10) Universitas Sumatera Utara (30) Universitas Wahid Hasyim (5) Total 81 peserta
September 2024	2 s.d 27 September 2024	Institut Teknologi Bandung (10) Universitas Ahmad Dahlan (10) Universitas Pancasila (10) Universitas Sumatera Utara (10) Universitas Islam Bandung (10) Universitas Brawijaya (9) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (8) Universitas Padjadjaran (7) Universitas Wahid Hasyim (5) Institut Sains Teknologi Nasional Jakarta (4) Total 83 peserta
Desember	9 s.d 20 Desember 2024	Universitas Pertahanan (10)

Dalam pelaksanaannya, Peserta PKPA dibagi menjadi beberapa kelompok dan ditempatkan di unit teknis Badan POM Pusat. Setiap kelompok dibimbing oleh seorang pembimbing dari masing-masing unit kerja sesuai dengan penempatannya. Rangkaian kegiatan berupa pembekalan umum, praktek kerja di unit kerja, dan presentasi hasil serta pengumpulan laporan PKPA. Penilaian kepada peserta PKPA diberikan oleh masing-masing pembimbing dan oleh

PPSDM POM yang kemudian hasilnya dilaporkan kepada masing-masing universitas.



Gambar 24. Pelatihan Praktik Kerja Profesi Apoteker

3.4.2. MAGANG SISWA/MAHASISWA

PPSDM POM sebagai koordinator kegiatan penyelenggaraan pendidikan di Badan POM memfasilitasi pengembangan kompetensi yang melibatkan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Salah satu kegiatan utama yang dilakukan adalah program Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau Magang. Area Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah pekerjaan yang bersifat administrasi atau operasional yang tidak bersifat rahasia. Pada tahun 2024 sebanyak 185 pengajuan PKL/Magang diterima dan 412 pengajuan PKL/Magang ditolak.

3.4.3. KUNJUNGAN

Dalam meningkatkan pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Salah satu kegiatan yang diselenggarakan adalah kunjungan edukatif yang melibatkan mahasiswa dan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Kunjungan ini memberikan kesempatan bagi para peserta untuk mengenal lebih dalam mengenai proses pengawasan Obat dan

Makanan, memahami prosedur layanan publik, mendapatkan informasi terkait kebijakan tertentu, atau keperluan studi, serta memahami peran, tugas dan fungsi Badan POM. Di tahun 2024 PPSDM POM melaksanakan 8 kunjungan sebagai berikut:

Tabel 9. Tabel Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan

No	Nama Sekolah/ Universitas	Jumlah Peserta	Tanggal
1	SMK Kesehatan Bhakti Kencana Cimahi	116 Orang	Selasa, 20 Februari 2024
2	SMK Ma'arif NU 2 Ajibarang	43 Orang	Rabu, 08 Mei 2024
3	ISMAFARSI	30 Orang	Kamis, 20 Juni 2024
4	SMK Sentosa Cilawu Garut	110 Orang	Rabu, 26 Juni 2024
5	BEM UNPAD, UI, dan UIN Jakarta	8 Orang	Jum'at, 20 September 2024
6	Poltekkes Kemenkes Banten	105 Orang	Jum'at, 04 Oktober 2024
7	SMP Garuda Cendekia Jakarta	93 Orang	Rabu, 06 November 2024
8	BEM FMIPA UI	50 Orang	Selasa, 12 November 2024

3.5. PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN POM

Penyusunan kurikulum pelatihan merupakan langkah penting dalam menstandarisasi penyelenggaraan suatu pelatihan agar tujuan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi peserta pelatihan dapat tercapai. Kurikulum pelatihan disusun dengan mempertimbangkan standar kompetensi dan kebutuhan kerja saat ini. PPSDM POM telah menetapkan beberapa kurikulum pelatihan teknis jabatan fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan pada tahun 2024 melalui keputusan Kepala PPSDM POM, diantaranya:

- a. Kurikulum Pelatihan Inspektur Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) Dasar
- b. Kurikulum Pelatihan Inspektur CPOB Junior
- c. Kurikulum Pelatihan Inspektur CPOB Senior
- d. Perubahan Kurikulum Pelatihan Inspektur Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Junior
- e. Kurikulum Pelatihan Inspektur CDOB Senior
- f. Kurikulum Pelatihan Inspektur CDOB Kepala
- g. Kurikulum Pelatihan Inspektur Kosmetik Junior
- h. Kurikulum Pelatihan Inspektur Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan Junior
- i. Kurikulum Pelatihan Calon Petugas Haji Badan POM

3.6. PENYUSUNAN KURIKULUM PELATIHAN DI LINGKUNGAN BADAN POM

Kegiatan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional dan perangkat uji penilaian kompetensi (manajerial, sosial kultural, dan teknis) berdasarkan standar kompetensi jabatan dalam rangka mendukung Sasaran Strategis 1 PPSDM POM yakni meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan, dalam hal ini persentase SDM Badan POM yang memenuhi standar kompetensi. Standar kompetensi dilakukan penyusunan dan review dalam rangka memastikan relevansi dengan situasi dan kebutuhan organisasi saat ini. Sedangkan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dalam rangka mendukung Sasaran Strategis 1, dalam hal ini Jumlah SDM Pengawas Obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar.

3.6.1. PENYUSUNAN PERANGKAT UJI KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL

Penyusunan perangkat uji kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah langkah penting dalam mengukur dan mengembangkan kemampuan individu dalam menjalankan peran mereka di lingkungan kerja yang semakin kompleks. Dengan adanya perangkat uji yang komprehensif, organisasi dapat memastikan bahwa setiap individu memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk bekerja secara efektif dalam tim yang multikultural dan beragam. Penyusunan yang teliti dan evaluasi yang berkelanjutan akan memastikan kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul dan siap menghadapi tantangan dalam pelaksanaan tugas.

Pada tahun 2024 telah dikembangkan 2 dokumen perangkat penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural dan 1 dashboard pelaporan hasil penilaian potensi. Keduanya digunakan untuk mendukung pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural terutama dalam mengawal pencapaian IKU SDM POM yang memenuhi standar kompetensi.

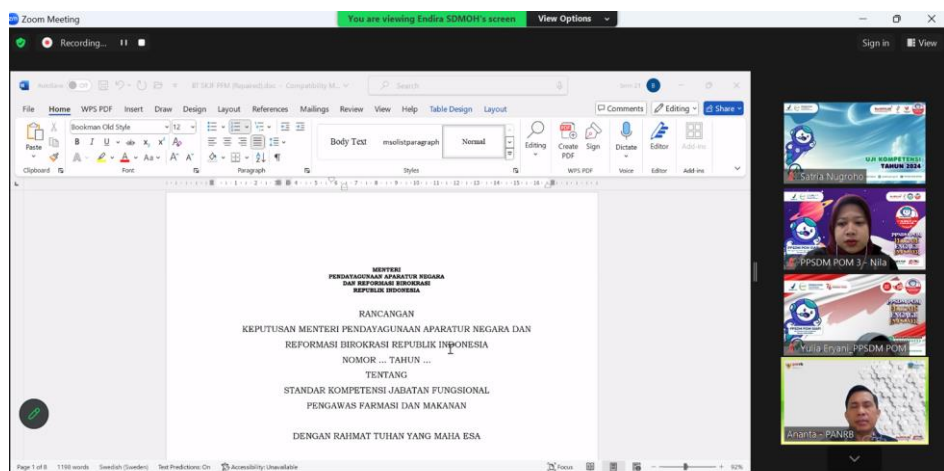
3.6.2. STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN DAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PELAKSANA

Sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan dilakukan sebagai upaya untuk menegakkan prinsip meritokrasi serta meningkatkan kapasitas pejabat fungsional yang dibina oleh Badan POM.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, Standar Kompetensi Jabatan ASN meliputi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan teknis. Adapun khusus kompetensi teknis, Instansi Pembina wajib merumuskan kamus kompetensi teknis terkait jabatan fungsional yang dibinanya sesuai Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi ASN yang baru dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Oleh karena itu, Badan POM perlu mengkaji relevansi Kamus Kompetensi Teknis Jabatan Urusan Pemerintah Bidang Pengawasan Farmasi dan Makanan yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan proses bisnis dan ruang lingkup pengawasan farmasi dan makanan terkini.

Setelah melalui tahapan perumusan dan penyusunan kamus kompetensi teknis dan rancangan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui *Focus Group Discussion* (FGD), verifikasi serta validasi dengan perwakilan dari seluruh unit kerja teknis pada tahun 2022-2023, pada tanggal 2 Februari 2024, Badan POM telah mendapatkan Persetujuan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/111/M.SM.02.00/2024 tentang Persetujuan Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Berdasarkan surat persetujuan di atas, Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dinyatakan telah disetujui untuk dilanjutkan ke dalam proses penetapan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan sudah dapat digunakan dalam



Gambar 25. Dokumentasi FGD Finalisasi Standar Kompetensi JF PFM

manajemen ASN di lingkungan Badan POM. Dalam rangka upaya percepatan penetapan Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, Badan POM juga melakukan upaya proaktif untuk melakukan kegiatan Finalisasi Legal Drafting Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dengan Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum serta Deputy Perancangan Jabatan, Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada 7 Juni 2024.

Dari pertemuan tersebut, Badan POM melakukan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait *legal drafting* dan secara paralel melakukan persiapan pengembangan perangkat uji dalam hal ini perangkat penilaian kompetensi teknis sesuai dengan rancangan standar kompetensi teknis yang telah disetujui. Kemudian pada bulan desember 2024, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor SKJ.24 Tahun 2024 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan. Aturan ini yang nantinya akan merubah Standar Kompetensi yang selama ini digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan baik dalam rangka pemetaan maupun uji kompetensi.

Dalam rangka meningkatkan kelancaran proses implementasi Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, PPSDM POM juga melakukan sosialisasi terkait Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. Sosialisasi dilakukan melalui penyusunan dan penyampaian Buku Saku Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada



Gambar 26. Buku Saku Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

agent of change di seluruh unit kerja untuk didesiminasikan kepada pejabat fungsional terkait.

Selain membina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah, terdapat 2 jabatan pelaksana yang dibina oleh Badan POM yaitu Penata Kelola Obat dan Makanan dan Asisten Kelola Obat dan Makanan. Sebagai Instansi Pembina, Badan POM juga wajib menyusun dan menyampaikan standar kompetensi jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Rancangan Standar Kompetensi Jabatan Pelaksana juga telah kami sampaikan kepada Plt. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada November 2024 melalui Surat Sekretaris Utama Nomor B-PB.01.01.2.11.24.909 tanggal 28 November 2024 perihal Penyampaian Rancangan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) Pelaksana di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk selanjutnya menunggu penetapannya oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

3.6.3. PENYUSUNAN PERANGKAT UJI KOMPETENSI TEKNIS

PPSDM POM melakukan penyusunan perangkat uji kompetensi teknis yang akan digunakan untuk pelaksanaan Seleksi Kompetensi Bidang untuk Rekrutmen CPNS dan PPPK Tahun Anggaran 2024. Penyusunan perangkat uji dilakukan pada Februari 2024 dengan terlebih dahulu dilakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Soal oleh Badan Kepegawaian Negara dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi kepada Tim Penyusun Soal.

Selain penyusunan soal untuk Rekrutmen CPNS dan PPPK TA 2024, PPSDM POM juga secara paralel melakukan penyusunan soal ujian tertulis penilaian kompetensi teknis dengan bentuk Pilihan Ganda untuk jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Makanan Non Ahli Madya dan bentuk studi kasus untuk jenjang Ahli Madya. Setelah bank soal ujian tertulis disusun juga dilakukan uji coba keterbacaan soal dalam rangka validasi soal penilaian kompetensi teknis baik untuk uji kompetensi maupun pemetaan kompetensi.



Gambar 27. Penyusunan Soal Ujian Tertulis Penilaian Kompetensi Teknis

3.6.4. KAJI ULANG STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG KEAMANAN PANGAN

PPSDM POM melakukan kaji ulang terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 618 Tahun 2016 Bidang Keamanan Pangan pada tahun 2024 dengan melibatkan seluruh *stakeholder* bidang keamanan pangan meliputi kementerian/lembaga terkait, akademisi dan praktisi, lembaga sertifikasi profesi, dan lembaga pelatihan. Tujuan dari kaji ulang dan pembaruan SKKNI di bidang keamanan pangan untuk memastikan bahwa standar kompetensi kerja yang ada relevan dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar. Selain itu, proses kaji ulang SKKNI Bidang Keamanan Pangan juga dilakukan dalam rangka memastikan tenaga kerja di bidang keamanan pangan memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar nasional dan internasional, meningkatkan kualitas produk pangan yang dihasilkan industri Indonesia, serta mendukung upaya pemerintah dalam menjamin keamanan pangan bagi masyarakat.

Adapun pelaksanaan kaji ulang SKKNI Bidang Keamanan Pangan bekerja sama dengan konsultan melalui jasa konsultansi dengan praktisi yang memiliki pengalaman dalam pengembangan dan penyusunan SKKNI pada Agustus 2024 sampai dengan akhir tahun 2024. Sampai akhir tahun 2024 sudah dilakukan verifikasi internal, pra konvensi, verifikasi eksternal, konvensi, serta finalisasi dokumen rancangan kaji ulang SKKNI Bidang Keamanan Pangan untuk selanjutnya dilakukan proses pengesahannya oleh pihak berwenang yakni Kementerian Ketenagakerjaan.



Gambar 28. FGD Penyusunan Kaji Ulang SKKNI Bidang Keamanan Pangan, Pra Konvensi, dan Konvensi

3.6.5. STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA OBAT BAHAN ALAM, OBAT KUASI, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

PPSDM POM juga mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Tahapan penyusunan SKKNI tersebut sudah dilakukan pada tahun 2023 meliputi pembentukan tim penyusun dan verifikasi, FGD (Focus Group Discussion) terkait penyusunan rancangan SKKNI, verifikasi internal, pra konvensi, verifikasi eksternal, dan konvensi. Proses finalisasi dokumen rancangan SKKNI dilakukan pada awal januari 2024 serta diserahkan secara langsung pada 25 Januari 2024.



Gambar 29. Penyampaian Rancangan SKKNI Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik kepada Kemenaker RI

Sementara itu proses pengesahan SKKNI telah ditetapkan pada bulan September tahun 2024 melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 234 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Aktivitas Kantor Pusat dan Konsultasi Manajemen Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik.

3.7. PENILAIAN KOMPETENSI SDM BADAN POM

Sesuai mandatori dari Kepala Badan POM tahun 2024 tentang Rencana Kinerja PPSDM POM, 2 (dua) indikator ditetapkan sebagai Indikator Kinerja untuk sasaran kegiatan “Meningkatnya kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan” dengan periode pelaporan bulanan. Capaian Sasaran Strategis ini diukur menggunakan indikator, salah satunya diperoleh dari program kerja penilaian kompetensi, Adapun dalam program ini sasaran kegiatannya bertujuan untuk mencapai target “Persentase SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi”.

Proses identifikasi SDM Badan POM yang memenuhi Standar Kompetensi dilakukan melalui Penilaian Kompetensi dengan membandingkan antara nilai capaian kompetensi pegawai dengan persyaratan dengan standar kompetensi. Adapun standar kompetensi yang digunakan dalam penilaian kompetensi pada tahun 2024 adalah:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, dan rekomendasi *Job Person Match* yang mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil.
- b. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Keahlian.
- c. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Keterampilan

3.7.1. PENILAIAN KOMPETENSI MANAJERIAL DAN SOSIAL KULTURAL

Kegiatan Penilaian / Pemetaan Kompetensi Teknis, Manajerial, dan Sosial Kultural pegawai Badan POM bertujuan untuk re assessment / Penilaian Ulang dalam rangka pemutakhiran data kompetensi yang secara Peraturan Badan Kepegawaian Negara Tahun 26 Tahun 2019 bahwa hasil penilaian kompetensi berlaku paling lama 3 tahun sejak data terakhir di update. Pemutakhiran data kompetensi sangat berperan penting dalam pelaksanaan manajemen ASN di lingkungan Badan POM, terutama dalam pengembangan kompetensi pegawai dan manajemen karir sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Kegiatan pemutakhiran data kompetensi di tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Secara keseluruhan kegiatan dapat dilaksanakan dan dapat melebihi target baik dari sisi capaian jumlah SDM POM yang dimutakhirkan data kompetensinya dan persentase SDM POM yang memenuhi standar kompetensi. Realisasi Capaian Persentase SDM POM yang memenuhi standar kompetensi sampai dengan Akhir periode RPJMN di Tahun 2024, sebagai berikut:

Tabel 10. Data Capaian Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural

Keterangan	Data Capaian 31/12/2024	
	Jumlah	Persentase
Memenuhi Standar Kompetensi	4405	83,05%
Belum Memenuhi Standar	899	16,95%

Dalam Rencana Strategis (Renstra) PPSDM POM 2020-2024, persentase pegawai Badan POM yang memenuhi standar kompetensi tahun 2024 ditargetkan sebesar **83%**. Berdasarkan tabel di atas dari yang telah memiliki data kompetensi sampai akhir tahun 2024, persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi sebesar **83.05%**. Sedangkan dari sisi jumlah SDM POM yang dipetakan kompetensi di tahun 2024 sebanyak **2.006 (dua ribu enam) pegawai** dari **1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) pegawai** yang ditargetkan. Adapun kegiatan penilaian kompetensi manajerial sosiokultural yang telah direncanakan di tahun 2024 telah dilaksanakan dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 11. Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural TA 2024

PELAKSANAAN		KEGIATAN PENILAIAN KOMPETENSI	METODE		KETERANGAN
TW	TGL/BULAN		SJT	AC	
1	10 Januari	Uji Kompetensi Pengangkatan Kembali		1	
1	5 Februari	Uji Kompetensi Pengangkatan Kembali		1	
1	29 Januari	Pemetaan Kompetensi Balai Besar POM di Medan, Loka POM di Kab. Toba, dan Loka POM di Kota Tanjung Balai	64		
1	12 Februari			13	
1	29 Januari	Pemetaan Kompetensi Balai POM di Jambi dan Loka POM di Kab. Bungo	53		
1	19 Maret			3	
1	29 Januari	Pemetaan Kompetensi Balai POM di Pangkal Pinang dan Loka POM di Kab. Belitung	38		
1	19 Maret			2	
1	27 Maret	Pemetaan Kompetensi Pusat	55		
1	23 Februari	Uji Kompetensi Batch 1	56		
1	22-29 Februari			20	
1	20 Maret	Penilaian Pihak ketiga		2	
1	20 Maret	Uji Kompetensi Arsiparis	1		
TOTAL CAPAIAN TW 1			309		TARGET : 383

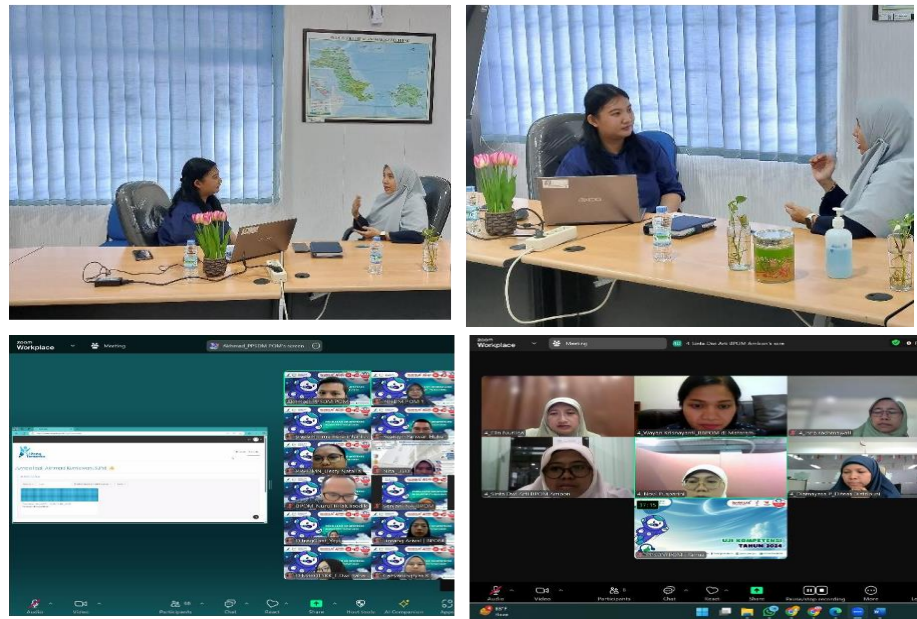
PELAKSANAAN		KEGIATAN PENILAIAN KOMPETENSI	METODE		KETERANGAN
TW	TGL/BULAN		SJT	AC	
2	28 Mei	Pemetaan Kompetensi Badan POM di Batam, Loka POM di Kota Tanjung Pinang, BBadan POM di Pekanbaru, Loka POM	103		
2	13-27 Juni	di Kota Dumai, Loka POM di Kab. Indragiri Hulu, dan Badan POM di Mamuju		10	
2	29 April	Uji Kompetensi (Pemenuhan data talenta)	2		
2	15-17 Mei	Penilaian Pihak ketiga		32	
2	3 Juni	Uji Kom. Batch 2	52		
2	3-7 Juni			49	
2	19 Juni	Pemetaan Kompetensi PPPK	77		
2	24 Juni	Selter JPT (Biro SDM)		21	
TOTAL CAPAIAN TW 2			345		TARGET : 331
3	5 Agustus	Pemetaan Kompetensi Badan POM di Kupang, Loka POM di Kab. Manggarai Barat, Loka POM di Kab. Belu, Loka POM di Kab. Sumba Timur, dan Loka POM di Kab. Ende	63		
3	11 September			3	
3	16 Juli	Pemetaan Kompetensi Badan POM di Gorontalo, BBPOM di Samarinda, Balai POM di Tarakan, Loka POM di Kota Balikpapan	185		

PELAKSANAAN		KEGIATAN PENILAIAN KOMPETENSI	METODE		KETERANGAN
TW	TGL/BULAN		SJT	AC	
3	11 September	Balickpapan, BBPOM di Serang, Balai POM di Tangerang, Balai POM di Palu & Loka POM di Kab. Banggai		15	
3	30-31 Juli	Pemetaan Kompetensi Susulan dan PPPK Juli	279		
3	1 Agustus	Pemetaan PPPK Agustus	184		
3	17,23,24 Juli	Penilaian Pihak ketiga		32	
3	3 September	Uji Kom. Batch 3	58		
3	4 September			30	
TOTAL CAPAIAN TW 3			849		TARGET : 497
4	13-14 November	Pemetaan Kompetensi Pusat	269		
4	18 November	Pemetaan Kompetensi Pusat (susulan)	99		
4	4 Desember	Uji Kom. Batch 4	47	30	
4	17-23 Oktober	Penilaian Pihak ketiga		43	
4	2, 9 Desember	Penilaian Pihak ketiga JF Administrator (Kepala Balai)		15	
TOTAL CAPAIAN TW 4			503		TARGET TW 4 : 539
TOTAL AKUMULASI TAHUN 2024			2006		TARGET TAHUN 2024 : 1750

Pada tahun 2024 program penilaian kompetensi SDM Aparatur di lingkungan Badan POM diperkuat dengan dilaksanakannya kegiatan pemberian umpan balik (feedback) hasil penilaian kompetensi sebagai bentuk pendampingan kepada unit kerja maupun pegawai untuk memahami dan mengoptimalkan hasil dari pemetaan kompetensi dan potensi yang telah dilaksanakan. Kegiatan pemberian umpan balik (feedback) di tahun 2024 dilakukan 2 kali dengan target peserta pegawai yang telah memiliki data kompetensi dan peserta yang akan mengikuti uji kompetensi ulang.

Adapun kendala dan hambatan pelaksanaan penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural adalah pelaksanaan yang dilakukan secara penuh melalui daring sehingga masih terdapat potensi kebocoran pada soal penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural. Rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan selanjutnya adalah dengan memperbanyak bank soal yang dapat

digunakan secara acak pada saat pelaksanaan penilaian kompetensi. Sedangkan kendala terkait pelaksanaan feedback adalah permintaan yang tinggi dari pegawai dengan jumlah asesor feedback yang terbatas. Adapun rekomendasi perbaikan pada pelaksanaan selanjutnya dilakukan dengan group feedback dan pemberian manajemen feedback di tingkat unit kerja.



Gambar 30. Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural dan Feedback Hasil Penilaian Kompetensi.

3.7.2. UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UDUPKP) Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan dengan menggunakan pembiayaan PNBK ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai penyelenggara UDUPKP. PPSDM POM mengirimkan peserta UDUPKP ke BKN dilaksanakan pada tahap yaitu pada Triwulan II s.d Triwulan III, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 12. Jumlah Peserta UDUPKP

Periode	Peserta	Lulus	Tidak Lulus
15 Mei 2024	8	8	-
29 Agustus 2024	52	49	3



Gambar 31. Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

3.7.3. PENILAIAN KOMPETENSI TEKNIS

Penilaian Kompetensi teknis dilaksanakan dalam rangka pemetaan kompetensi dan uji kompetensi. Penilaian Kompetensi dalam dilaksanakan pada Bulan Januari - Desember 2024 terhadap sebanyak 996 pegawai dengan rincian terlampir pada tabel berikut. Pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi dilaksanakan secara daring dan luring, untuk memfasilitasi pelaksanaan penilaian kompetensi secara daring telah dibangun sistem penilaian kompetensi Pemetaan Kompetensi Teknis yang dilakukan lewat aplikasi Penilaian Kompetensi Teknis (PENKOMTEK).

Penilaian Kompetensi teknis dilakukan dengan menggunakan metode tidak langsung berupa:

- a. Tes tertulis Pilihan Ganda atau *Essay*
- b. Portofolio dan Wawancara Konfirmasi
- c. Penyusunan Makalah serta Wawancara Kompetensi Teknis

Tata cara penilaian kompetensi teknis mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Jenjang Keahlian, dimana standar kelulusan disampaikan jika memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Kompetensi umum dengan nilai minimal 75
- b. Kompetensi inti dengan nilai minimal 70

Adapun kendala dan hambatan terhadap pelaksanaan penilaian kompetensi teknis yaitu perubahan kebijakan supra sistem khususnya terkait penyusunan

standar kompetensi jabatan teknis menyebabkan perlunya melakukan perubahan pada seluruh ketentuan teknis dan perangkat uji secara komprehensif. Selain itu perubahan kebijakan pengawasan obat dan makanan di Badan POM yang juga bersifat dinamis menyebabkan beberapa aspek kompetensi sudah tidak relevan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

Adanya perubahan tersebut, menyebabkan beberapa permasalahan memerlukan perubahan pada dasar hukum penilaian kompetensi teknis yakni perubahan Peraturan Kepala Badan POM terkait Pedoman Penilaian Kompetensi Teknis sehingga tidak dapat dilakukan dalam waktu yang cepat. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan untuk pelaksanaan penilaian kompetensi teknis selanjutnya dapat segera dilakukan perbaikan terhadap pedoman penilaian kompetensi teknis dan secara paralel menetapkan Surat Keputusan Kepala BPOM maupun Surat Edaran Sestama untuk mengatur pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi teknis yang bersifat agile sehingga jika sewaktu-waktu diperlukan dapat segera dilakukan penyesuaian dengan lebih cepat.

No	Pelaksanaan	Jabatan		Jumlah
		Ahli	Terampil	
Triwulan I				
1	Balai POM di Jambi dan Loka POM di Kab. Bungo	27	5	32
2	Balai Besar POM di Medan, Loka POM di Tanjung Balai dan Loka POM di Toba Samosir	58	13	71
3	Badan POM di Pangkal Pinang dan Loka POM di Kab. Belitung	21	4	25
4	a.Uji Kompetensi Batch I	111	2	113
	b.Uji Kompetensi Khusus Januari	2	-	2
	c.Uji Kompetensi Khusus Februari	1	-	1
Triwulan II				
5.	Balai POM di Batam dan Loka POM di Kota Tanjung Pinang	34	0	34

No	Pelaksanaan	Jabatan		Jumlah
		Ahli	Terampil	
6.	Balai Besar POM di Pekanbaru, Loka POM di Kota Dumai, dan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	48	11	59
7.	Balai POM di Mamuju	13	-	13
8.	Uji Kompetensi Batch II	156	1	157
Triwulan III				
9.	Balai POM di Kupang, Loka POM di Kab. Manggarai Barat, Loka POM di Kab. Belu, Loka POM di Kab. Sumba Timur, dan Loka POM di Kab. Ende	46	3	49
10.	Balai POM di Gorontalo	21	5	26
11.	Balai Besar POM di Samarinda, Balai POM di Tarakan, dan Loka POM di Kota Balikpapan	41	5	46
12.	Balai Besar POM di Serang dan Balai POM di Tangerang	44	5	49
13.	Balai POM di Palu dan Loka POM di Kab. Banggai	42	5	47
14.	Uji Kompetensi Batch 3	118	1	119
Triwulan IV				
15.	Uji Kompetensi Batch 4	149	4	153
Total 2024				996



Gambar 32. Dokumentasi Pelaksanaan Pemetaan Kompetensi Teknis dan Uji Kompetensi Teknis

3.8. SERTIFIKASI SDM POM

Kegiatan Sertifikasi SDM POM dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis PPSDM POM pada Sasaran Strategis **Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan** dengan indikator kinerja **Jumlah SDM Pengawas Obat dan Makanan tersertifikasi sesuai Standar**. Sertifikasi SDM POM dilakukan oleh LSP Badan POM dengan tujuan untuk memberikan pengakuan kompetensi bagi SDM di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sertifikasi Kompetensi SDM POM merupakan program yang diinisiasi oleh Badan POM untuk meningkatkan pengawasan melalui perkuatan SDM internal serta tenaga profesional fungsi terkait pengawasan Obat dan Makanan. Sertifikasi SDM POM dilakukan melalui Program Prioritas Nasional, yang dilakukan melalui kegiatan:

1. Sertifikasi kompetensi melalui LSP Badan POM

Skema Sertifikasi Kompetensi yang dilakukan oleh LSP Badan POM meliputi skema Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dan *District Food Inspector (DFI) Junior* sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Keamanan

Pangan Nomor 618 tahun 2016. Pada tahun 2024 jumlah yang peserta pelatihan berbasis kompetensi yang disertifikasi sebanyak 596 orang.

2. Sertifikasi Melalui Pelatihan bagi Pejabat Fungsional dan Pelatihan Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan

PPSDM POM sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya berkomitmen melaksanakan program Sertifikasi Kompetensi SDM Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung optimalisasi SDM Badan POM. Pengawasan komoditas dan objek sarana harus dilakukan oleh SDM yang kompeten, dibuktikan dengan sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pada tahun 2024 kegiatan sertifikasi melalui pelatihan bagi Pejabat Fungsional dan Pelatihan Teknis Pengawas Farmasi dan Makanan sebanyak 408 orang.

3. Layanan Sertifikasi

Menyelenggarakan Sertifikasi bagi Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan (PKP) Pertama dan District Food Inspector (DFI) Junior Kabupaten/Kota yang telah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi sebanyak 466 (empat ratus enam puluh enam) orang dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Jumlah	
		PKP Pertama	DFI Junior
1	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Papua	8	12
2	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Kalimantan Barat	16	15
Total Triwulan I		24	27
1	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Jawa Barat	9	14
2	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi DI Yogyakarta	8	12
3	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Kalimantan Timur	12	13
4	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Jambi	12	18

No.	Kegiatan	Jumlah	
		PKP Pertama	DFI Junior
5	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Kepulauan Riau	10	15
6	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Kalimantan Tengah	15	15
7	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Kalimantan Selatan	8	9
Total Triwulan II		74	96
1	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Jawa Timur	15	16
2	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Lampung	18	9
3	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Jawa Tengah	9	19
4	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Sumatera Utara	10	11
5	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Aceh	7	13
6	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	10	9
Total Triwulan III		69	78
1	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Junior Provinsi Nusa Tenggara Barat	13	15
2	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama PAGC dan Fasnas Pusat	36	-
3	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Junior Provinsi Bali	10	8

No.	Kegiatan	Jumlah	
		PKP Pertama	DFI Junior
4	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama dan DFI Junior Provinsi Bengkulu	4	13
Total Triwulan IV		63	36
Total Tahun 2024		230	236



Gambar 33. Pelaksanaan Sertifikasi PKP Pertama/DFI Junior Tahun 2024 di Kota Jayapura, Bandung, Samarinda dan Pontianak

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan sertifikasi kompetensi SDM POM pada tahun 2024 didukung oleh:

- a. Tersedianya standar kompetensi yang menjadi acuan dalam pelaksanaan sertifikasi yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 618 Tahun 2016 Bidang Keamanan Pangan
- b. Adanya lisensi dari BNSP untuk 4 skema sertifikasi bagi LSP BPOM, yang menjadi ruang lingkup pelaksanaan sertifikasi kompetensi

- c. Tersedianya pedoman pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan
- d. Tersedianya standar kompetensi teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dalam Peraturan Kepala BPOM nomor 15 dan nomor 18 Tahun 2017
- e. Dukungan manajemen dan kepemimpinan, yaitu komitmen dari manajemen untuk mendukung proses sertifikasi SDM POM, baik dari segi anggaran dan sumber daya.
- f. Adanya perencanaan yang terukur serta pemanfaatan teknologi informasi dalam melaksanakan Sertifikasi Kompetensi juga meningkatkan kualitas dan kuantitas sertifikasi yang dilaksanakan.

Untuk peningkatan kinerja dan mendukung Indikator SDM POM yang tersertifikasi sesuai standar, akan dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan kaji ulang standar kompetensi yang digunakan sebagai acuan pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi SDM Pengawasan Obat dan Makanan.
- b. Memperluas ruang lingkup skema sertifikasi yang dimiliki LSP BPOM, untuk meningkatkan efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan
- c. Mengembangkan materi uji yang terkini sesuai standar dan relevan dengan perkembangan pengawasan Obat dan Makanan
- d. Melakukan perpanjangan lisensi LSP BPOM yang akan berakhir pada bulan Januari 2025 dan mempersiapkan pengajuan lisensi Asesmen Jarak Jauh (AJJ) untuk kemudahan jangkauan dan fleksibilitas waktu pelaksanaan sertifikasi, agar bisa menjangkau SDM Pengawasan Obat dan Makanan yang lebih luas.

3.9. PENGELOLAAN SPBE PPSDM POM

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pelaku usaha, masyarakat, dan instansi lain. SPBE bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dengan menerapkan sistem digital dalam berbagai aspek administrasi

dan pelayanan publik. Dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Badan POM sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, sekaligus mendukung transformasi digital pengawasan Obat dan Makanan. Pemanfaatan teknologi informasi ini tidak hanya mempercepat proses kerja, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas serta integrasi data yang lebih baik antar unit kerja.

Pengelolaan SPBE di PPSDM POM sekaligus juga mendukung sasaran kinerja pada point terbangunnya sistem operasional TIK PPSDM POM yang terintegrasi dan adaptif, dalam penerapan indikator kinerjanya Indeks pengelolaan data dan informasi di PPSDM POM juga mendapat point 3.00 atau point optimal dari Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan, point tersebut dihasilkan berdasarkan penilaian melalui penggunaan e-mail Badan POM dan *Dashboard* Badan POM *Operational Center*. PPSDM POM juga melakukan Pengelolaan SPBE dan dibagi dalam beberapa sub kelompok sebagai berikut:

- a. Pengelolaan teknologi informasi PPSDM POM
- b. Pengelolaan E-Learning IDEAS
- c. Monitoring Pengembangan Kompetensi
- d. Media Sosial PPSDM POM

Kendala dan hambatan utama dalam pengelolaan SPBE di lingkungan PPSDM POM terutama mencakup keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kondisi ini menyebabkan kesulitan dalam pengelolaan dan pengembangan sistem elektronik secara optimal. Selain itu, PPSDM POM juga menghadapi kendala terkait keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan, pemeliharaan, serta peningkatan kapasitas sistem elektronik. Infrastruktur digital yang kurang memadai turut menjadi hambatan, sehingga mengurangi efisiensi layanan dan koordinasi antar bagian. Sebagai rekomendasi perbaikan ke depan, PPSDM POM perlu secara bertahap mengembangkan kompetensi SDM melalui pelatihan khusus yang berkaitan dengan pengelolaan TIK. Selain itu, rekrutmen pegawai baru yang memiliki latar belakang pendidikan atau keahlian di bidang TIK dapat diprioritaskan untuk mengisi kebutuhan kompetensi tersebut. Dari sisi anggaran, PPSDM POM perlu menyusun perencanaan anggaran yang lebih strategis, dengan fokus pada investasi teknologi yang berkelanjutan serta pengalokasian dana khusus untuk pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur digital. Dalam hal infrastruktur, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kondisi perangkat keras, perangkat lunak, serta jaringan digital di lingkungan PPSDM POM. Dalam monitoring dan evaluasi aplikasi di PPSDM POM dilakukan secara

berkala setiap triwulan, khususnya monitoring terkait dengan data aplikasi, dan juga penggunaan aplikasi Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada seluruh Unit Kerja di BPOM sebagai bahan masukan perbaikan sekaligus optimalisasi penggunaan aplikasi dalam mendukung pengembangan SDM di BPOM.

3.9.1. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI PPSDM POM

Untuk mendukung kegiatan dan layanan sertifikasi kompetensi, uji kompetensi, pengembangan kompetensi, pengelolaan pengetahuan organisasi, serta pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), PPSDM POM mengembangkan 8 (Delapan) aplikasi. 8 Aplikasi tersebut antara lain:

a. Aplikasi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Badan POM

LSP Badan POM selaku unit pelaksana sertifikasi melakukan sertifikasi kompetensi di bidang keamanan pangan bagi Penyuluh Keamanan Pangan Pertama (PKP Pertama) dan Inspektur Muda Keamanan Pangan (District Food Inspector Junior) pada Pemerintah Daerah dan pegawai Badan POM. Dalam kegiatan tersebut, aplikasi LSP Badan POM merupakan tools untuk pengelolaan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi profesi yang diselenggarakan oleh tim LSP Badan POM. Adapun penggunaan aplikasi LSP Badan POM selama bulan Januari s.d Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 13. Jumlah Pengguna Aplikasi LSP

No	Uraian	Jumlah	Kompeten		Belum Kompeten	
			Jumlah	Jumlah	Jumlah	%
1	Sertifikasi Kompetensi PKP Pertama	161	160	99%	1	1%
2	Sertifikasi Kompetensi DFI Junior	171	167	98%	4	2%
	Total	332	327	99%	5	2%

b. Aplikasi Penilaian Kompetensi Teknis (PENKOMTEK)

PENKOMTEK merupakan aplikasi yang digunakan dalam penilaian kompetensi berbasis web. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dengan mencapai sasaran ketepatan, kecepatan, serta kemudahan monitoring dalam mengelola penilaian kompetensi

sebagai bahan dalam pengembangan kompetensi pegawai. Sistem yang dikembangkan juga diharapkan mampu menghasilkan data dan informasi penting yang diperlukan dalam pengambilan kebijakan dalam manajemen Sumber Daya Manusia dan manajemen karir organisasi Badan POM. Penggunaan aplikasi ini sebagai berikut:

- a. Menyediakan pengajuan pendaftaran uji kompetensi yang jelas dan mudah sehingga peserta dapat mengakses maupun melakukan pendaftaran dimanapun.
- b. Mempermudah para asesor untuk melakukan penilaian kompetensi dimana nilai saat wawancara konfirmasi portofolio dapat diakses langsung di aplikasi, sehingga mencegah kesalahan input dan hasil uji kompetensi dapat segera diumumkan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
- c. Memberikan akses kepada masing masing pegawai serta atasan langsung untuk melihat dan memanfaatkan profil kompetensi untuk kepentingan pengembangan kompetensi dan karir yang bersangkutan dengan tetap menjaga kerahasiaan dan batasan akses sesuai kewenangan masing masing pegawai sesuai dengan peran dan fungsinya.
- d. Menyediakan akses bagi pengelola penilaian kompetensi maupun asesor untuk mencetak sertifikat hasil penilaian kompetensi.

Pada tahun 2024 pelaksanaan penilaian kompetensi, pemberian umpan balik dan penggunaan Aplikasi Penilaian Kompetensi Teknis (PENKOMTEK) (<https://penkomtek.pom.go.id/>) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 14. Monitoring dan Capaian Aplikasi PENKOMTEK Tahun 2024

No	Keterangan	Periode	Peserta yang diterima	Peserta Yang ditolak
1	Pemetaan Kompetensi	Februari	110	0
2	Uji Kompetensi	Februari	119	18
3	Pemetaan Kompetensi	Maret	25	0
4	Pemetaan Kompetensi	Mei	40	0

No	Keterangan	Periode	Peserta yang diterima	Peserta Yang ditolak
5	Uji Kompetensi	Mei	159	7
6	Pemetaan Kompetensi	Juni	57	0
7	Pemetaan Kompetensi	Juli	5	0
8	Pemetaan Kompetensi	Agustus	95	0
9	Uji Kompetensi	Agustus	121	9
10	Pemetaan Kompetensi	September	136	0
11	Uji Kompetensi	November	156	10
12	Pemetaan Kompetensi	Desember	13	0
TOTAL			1.036	44

c. Aplikasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural, serta Psikotes Online (Sipenatemanku)

Sipenatemanku adalah aplikasi media pengambilan data kompetensi pegawai di lingkungan Badan POM dan UPT yang dapat disesuaikan soal-soalnya setiap saat tanpa masuk ke server. Aplikasi ini membantu PPSDM POM dalam melaksanakan asesmen secara daring kepada seluruh pegawai Badan POM di seluruh Indonesia. Penilaian kompetensi yang selama ini dilakukan oleh PPSDM POM yaitu Uji Kompetensi dan Pemetaan kompetensi.

Uji Kompetensi dan Pemetaan kompetensi secara online dengan menggunakan Aplikasi Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural,

serta Psikotes Online (Sipenatemanku) (link <https://asesmen.pom.go.id>) dari bulan Januari s.d Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 15. Pengguna Aplikasi Sipenatemanku

No	Uraian	Jumlah Peserta		Pelaksanaan
		SJT	AC	
1.	Ukom Pengangkatan Kembali	-	1	10 Jan 2024
2.	Ukom Pengangkatan Kembali	-	1	5 Februari 2024
3.	Pemetaan BBadan POM di Medan, Loka POM di Kab. Toba, dan Loka POM di Kota Tanjung Balai	64	-	29 Januari 2024
		-	13	12 Februari 2024
4.	Pemetaan Badan POM di Jambi dan Loka POM di Kab. Bungo	53	-	29 Januari 2024
		-	3	19 Maret 2024
5.	Pemetaan Badan POM di Pangkal Pinang dan Loka POM di Kab. Belitung	38	-	29 Januari 2024
		-	2	19 Maret 2024
6.	Pemetaan Pusat Batch 1	55	-	27 Maret 2024
7.	Ukom Batch 1	56	-	23 Februari 2024
		-	20	22-29 Feb 2024
8	Pemetaan Badan POM di Batam dan Loka POM di Kota Tanjung Pinang	27		28 Mei 2024
			1	13-27 Juni 2024
9	Pemetaan BBadan POM di Pekanbaru, Loka POM di Kota Dumai, dan Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	55		28 Mei 2024
			8	13-27 Juni 2024
10	Pemetaan Badan POM di Mamuju	20		28 Mei 2024
			1	13-27 Juni 2024
11	Ukom April (Pemenuhan data talenta)	2		29 April 2024
12	Ukom Batch 2	52		3 Juni 2024
			49	3-7 Juni 2024
13	Pemetaan Balai POM di Kupang, Loka POM di Kab. Manggarai Barat, Loka POM di Kab. Belu,	63		5 Agustus 2024

No	Uraian	Jumlah Peserta		Pelaksanaan
		SJT	AC	
	Loka POM di Kab. Sumba Timur, dan Loka POM di Kab. Ende		3	11 September 2024
14	Pemetaan Balai POM di Gorontalo	28		16 Juli 2024
15	Pemetaan Balai Besar POM di Samarinda, Balai POM di Tarakan, dan Loka POM di Kota Balikpapan	48		16 Juli 2024
			3	11 Sept 2024
16	Pemetaan Balai Besar POM di Serang dan Balai POM di Tangerang	58		16 Juli 2024
			5	11 Sept 2024
17	Pemetaan Balai POM di Palu & Loka POM di Kab. Banggai	51		16 Juli 2024
			7	11 Sept 2024
18	Pemetaan Susulan & PPPK Juli	279		30-31 Juli 2024
19	Pemetaan PPPK Agustus	184		1 Agustus 2024
20	Ukom Batch 3	58		3 Sept 2024
			30	4 Sept 2024
21	Pemetaan Pusat Batch 4	269		13-14 November
22	Pemetaan Pusat Th 2024 (susulan)	99		18 November 2024
23	UKOM Batch 4	47	30	4 Desember 2024

d. Aplikasi Jurnal Pengawasan Obat dan Makanan (Eruditio)

Aplikasi Pengelolaan Jurnal Ilmiah Elektronik Eruditio Badan POM. Di dalam aplikasi ini dilakukan pengelolaan jurnal secara daring mulai dari proses pengumpulan jurnal, penyuntingan jurnal, hingga publikasi jurnalnya. Adapun jurnal dan artikel yang sudah diterbitkan dari Tahun 2020 sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 berjumlah 8 Jurnal dan 52 artikel.

e. Aplikasi CMC Badan POM

Coaching and Mentoring (CMC) adalah aplikasi untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi pegawai dalam bentuk *coaching dan mentoring* antar pegawai Badan POM secara daring. Seorang pegawai bisa memohon/meminta *request* kepada atasan atau sesama pegawai lainnya

untuk membimbing dan memberikan pengetahuan terkait suatu topik tertentu di dunia pekerjaan.

Selma tahun 2024 ini, pelaksanaan coaching dan mentoring melalui aplikasi CMC Badan POM (<https://ppsdm.pom.go.id/panel/cmc>) sebagai berikut:

Tabel 16. Pelaksanaan coaching dan mentoring melalui aplikasi CMC Badan POM

No	Uraian	Jumlah			
		TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Kegiatan Coaching	15 Kegiatan	3 Kegiatan	23 Kegiatan	14 Kegiatan
2	Kegiatan Mentoring	9 Kegiatan	9 Kegiatan	3 Kegiatan	1 Kegiatan

f. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengetahuan dan Informasi (Simphoni)

SIMPHONI Badan POM adalah aplikasi Manajemen Pengetahuan di Badan POM meliputi penciptaan, penyimpanan, sharing, serta penggunaan data dan pengetahuan di Badan POM yang terintegrasi dengan aplikasi lain di Badan POM.

Pengelolaan pengetahuan organisasi melalui publikasi data, pengetahuan, atau informasi pada aplikasi SIMPHONI (<https://ppsdm.pom.go.id/simponi>), jumlah total data yang disajikan sebagai berikut:

Tabel 17. Jumlah Data Unit di Aplikasi SIMPHONI

NO	UNIT KERJA	TOTAL
1	Biro Sumber Daya Manusia	1
2	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	4
3	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	7
4	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	2
5	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	48
6	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	6

NO	UNIT KERJA	TOTAL
7	Balai Besar POM di Bandar Lampung	2
8	Balai POM di Batam	20
9	Balai Besar POM di Jakarta	18
10	Balai Besar POM di Yogyakarta	3
11	Balai POM di Mamuju	1
12	Loka POM di Kab. Banyumas	92
13	Loka POM di Kab. Mimika	11
14	Loka POM di Kab. Merauke	3
15	Loka POM di Kab. Tulangbawang	150
16	Balai POM di Tangerang	8
17	Loka POM di Kota Baubau	31
18	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	1

g. Aplikasi pembelajaran daring Integrated Development and Training Information System (IDEAS):

IDEAS adalah *platform* pengembangan kompetensi daring (e-learning) yang terintegrasi dengan siasn.pom.go.id dengan menu utama pembelajaran online terjadwal, pembelajaran online tidak terjadwal, webinar/diskusi online, dan ujian online. IDEAS dibuat untuk memfasilitasi para pegawai Badan POM untuk bisa memaksimalkan waktu belajar di mana pegawai dapat belajar di manapun dan kapanpun, selama pegawai bisa mengakses internet. Di dalam IDEAS dikembangkan berbagai modul pembelajaran baik untuk mendukung kompetensi teknis pengawasan Obat dan Makanan, ataupun kompetensi non-teknis (seperti manajerial dan sosial kultural).

pada tahun 2024, IDEAS mulai difokuskan untuk bisa menjangkau para pegawai Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) non-Badan POM yang berasal dari Dinas Kesehatan di daerah. Selain PFM non-Badan POM, IDEAS juga mendukung daya saing pelaku usaha dan UMKM di bidang Obat dan

Makanan dengan menghadirkan modul pembelajaran yang relevan kepada para pelaku usaha.

Kegiatan pengembangan kompetensi melalui fitur *online shopping training*, fitur pelatihan terjadwal, dan fitur webinar/diskusi online pada aplikasi IDEAS Badan POM (<https://ppsdm.pom.go.id/ideas>) sebagai berikut:

Tabel 18. Kegiatan Pengembangan Kompetensi di IDEAS

No	Uraian	Total
1	Pegawai Badan POM yang belajar IDEAS	3944 (81,7%)
2	ASN Non Badan POM yang belajar IDEAS	224
3	Pelaku usaha yang belajar di IDEAS	103
4	Akun eksternal yang belajar di IDEAS	1073
5	Modul terbaru yang diupload	55
6	Webinar yang dilaksanakan	53

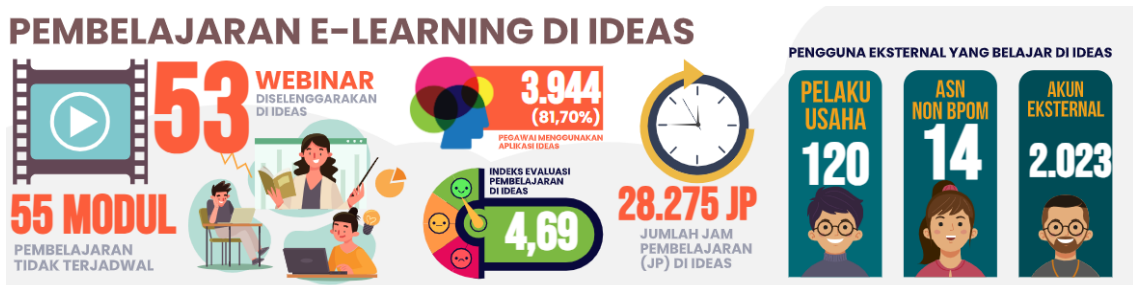
3.9.2. PENGELOLAAN E-LEARNING IDEAS

Salah satu upaya untuk membangun *learning ecosystem* untuk mewujudkan Badan POM sebagai *learning organization* sekaligus transformasi pengembangan kompetensi Badan POM menuju Badan POM Digital Corporate University, PPSDM POM meluncurkan aplikasi IDEAS sebagai salah satu pilar utama *Learning Management System* terintegrasi. *Integrated Development and Training Information System* atau Aplikasi IDEAS pada <https://ppsdm.pom.go.id/ideas> sebagai salah satu media pembelajaran mandiri di Badan POM, sebagai *platform* pembelajaran *online* terintegrasi yang mengantarkan Badan POM pada era baru pembelajaran (*new learning culture*). Fitur utama yaitu Pelatihan Tidak Terjadwal / *Online Shopping Training* dan Webinar/Diskusi Online, IDEAS hadir untuk mendukung pegawai belajar kapanpun dan di manapun dengan data hasil pembelajaran tercatat sebagai capaian pembelajaran.

Pada Tahun 2024 IDEAS dikembangkan dengan penambahan fitur terbarunya dengan membuka akses pelatihan untuk pelaku usaha di bidang Obat dan Makanan, ada 8 pelatihan tidak terjadwal yang dapat diakses diantaranya:

1. Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB)
2. Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB)
3. Denah Sarana Produksi UMKM Obat dan Bahan Alam
4. Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)
5. Denah Industri Kosmetik
6. Registrasi Pangan Olahan pada Sistem E-Reg RBA
7. Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)
8. Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahap I Bagi UMKM OBA

Sampai dengan akhir 2024 sudah ada 120 akun pelaku usaha yang melakukan pembelajaran di IDEAS dan sampai dengan TW IV tahun 2024 total pembelajaran e-learning pelatihan tidak terjadwal yang telah ditambahkan di berjumlah 55 e-learning sehingga total tersedia 244 pelatihan tidak terjadwal, telah dilakukan 53 webinar secara online dan dengan total capaian 3944 pegawai atau 81.70% pegawai Badan POM yang mengakses IDEAS pada tahun 2024.

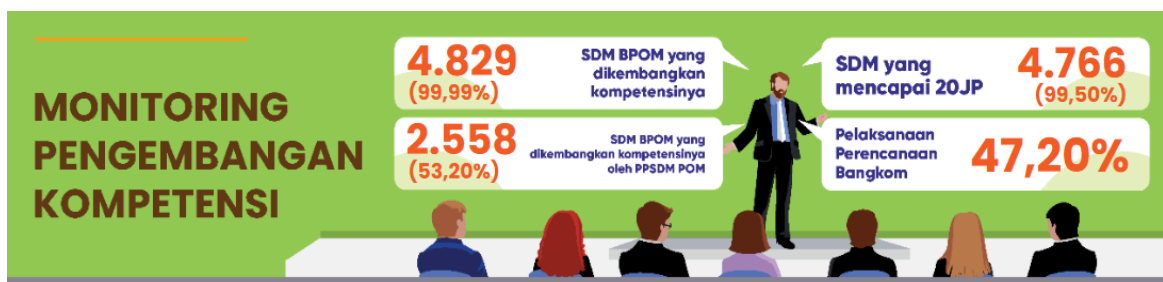


Gambar 34. Capaian Pembelajaran E-Learning IDEAS 2024

3.9.3. MONITORING PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Sesuai dengan Undang-Undang tentang ASN, pengembangan kompetensi pegawai ASN merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan setiap pegawai ASN melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. Sebagai upaya dalam memberikan kesempatan kepada pegawai ASN dalam pengembangan kompetensi, Badan POM melalui PPSDM POM telah menyusun perencanaan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai ASN Badan POM tahun 2024 yang tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 115 Tahun 2024 Tentang Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi Di Lingkungan Badan

Pengawas Obat dan Makanan didapatkan 717 kegiatan pengembangan kompetensi yang direncanakan di Badan POM. Berdasarkan Keputusan tersebut dilaksanakan pengembangan kompetensi baik di PPSDM POM dan di setiap unit kerja di Badan POM, kemudian dilakukan monitoring oleh PPSDM POM, hasil monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai ASN di Badan POM pada tahun 2024, sampai dengan Triwulan IV tahun 2024, dari 717 kegiatan pengembangan kompetensi yang direncanakan di Badan POM tahun 2024, sebesar 52,86% yang terlaksana sesuai dengan rencana. Data lengkap di lampirkan sebagai berikut.



Gambar 35. Monitoring Pengembangan Kompetensi 2024 di Badan POM

Tabel 19. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kompetensi 2024 di Badan POM

NO	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang direncanakan	Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah dilaksanakan		Presentase realisasi Perencanaan		Jumlah Revisi Perencanaan Pengembangan Kompetensi yang telah dilakukan
			Sesuai Perencanaan	Tidak Sesuai Perencanaan	Terlaksana	Belum Terlaksana	
1	Inspektorat Utama	17	6	5	6	3	8
2	Biro Perencanaan dan Keuangan	1	1	3	1	0	0
3	Biro Hukum dan Organisasi	9	8	7	8	0	1
4	Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	4	4	4	4	0	0
5	Biro Sumber Daya Manusia	11	2	2	2	6	3

NO	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang direncanakan	Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah dilaksanakan		Presentase realisasi Perencanaan		Jumlah Revisi Perencanaan Pengembangan Kompetensi yang telah dilakukan
			Sesuai Perencanaan	Tidak Sesuai Perencanaan	Terlaksana	Belum Terlaksana	
6	Biro Umum	0	0	0	0	0	0
7	Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	11	3	1	3	0	8
8	Direktorat Registrasi Obat	4	0	5	0	4	0
9	Direktorat Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	5	3	2	3	2	0
10	Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor	5	3	4	3	0	2
11	Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif	18	14	11	14	0	4
12	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen	2	2	14	2	0	0

NO	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang direncanakan	Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah dilaksanakan		Presentase realisasi Perencanaan		Jumlah Revisi Perencanaan Pengembangan Kompetensi yang telah dilakukan
			Sesuai Perencanaan	Tidak Sesuai Perencanaan	Terlaksana	Belum Terlaksana	
	Kesehatan, dan Kosmetik						
13	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	5	5	11	5	0	0
14	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	6	5	7	5	1	0
15	Direktorat Pengawasan Kosmetik	2	2	4	2	0	0
16	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	11	4	5	4	3	4
17	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	5	5	7	5	0	0
18	Direktorat Registrasi Pangan Olahan	5	2	5	2	0	3
19	Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan	12	3	3	3	0	9
20	Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3	3	8	3	0	0

NO	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang direncanakan	Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah dilaksanakan		Presentase realisasi Perencanaan		Jumlah Revisi Perencanaan Pengembangan Kompetensi yang telah dilakukan
			Sesuai Perencanaan	Tidak Sesuai Perencanaan	Terlaksana	Belum Terlaksana	
21	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	8	7	10	7	0	1
22	Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional	33	15	22	15	17	1
23	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	67	27	55	27	40	0
24	Pusat Analisis Kebijakan Obat dan Makanan	4	2	5	2	0	2
25	Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan	1	1	5	1	0	0
26	Direktorat Cegah Tangkal	8	6	0	6	1	1
27	Direktorat Intelijen Obat dan Makanan	3	1	0	1	1	1
28	Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan	6	4	0	4	0	2
29	Direktorat Siber Obat dan Makanan	5	4	2	4	0	1
30	Balai Besar POM di Banda Aceh	12	6	0	6	6	0
31	Balai Besar POM di Medan	7	2	7	2	1	4

NO	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang direncanakan	Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah dilaksanakan		Presentase realisasi Perencanaan		Jumlah Revisi Perencanaan Pengembangan Kompetensi yang telah dilakukan
			Sesuai Perencanaan	Tidak Sesuai Perencanaan	Terlaksana	Belum Terlaksana	
32	Balai Besar POM di Padang	6	2	2	2	1	3
33	Balai Besar POM di Pekanbaru	3	2	0	2	0	1
34	Balai Besar POM di Palembang	1	1	2	1	0	0
35	Balai Besar POM di Bandar Lampung	14	13	5	13	0	1
36	Balai Besar POM di Jakarta	24	23	1	23	0	1
37	Balai Besar POM di Bandung	18	11	1	11	1	6
38	Balai Besar POM di Semarang	11	8	0	8	2	1
39	Balai Besar POM di Yogyakarta	12	11	4	11	0	1
40	Balai Besar POM di Surabaya	11	7	6	7	0	4
41	Balai Besar POM di Serang	10	8	3	8	0	2
42	Balai Besar POM di Denpasar	7	7	4	7	0	0
43	Balai Besar POM di Mataram	10	8	8	8	0	2
44	Balai Besar POM di Pontianak	9	9	2	9	0	0

NO	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang direncanakan	Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah dilaksanakan		Presentase realisasi Perencanaan		Jumlah Revisi Perencanaan Pengembangan Kompetensi yang telah dilakukan
			Sesuai Perencanaan	Tidak Sesuai Perencanaan	Terlaksana	Belum Terlaksana	
45	Balai Besar POM di Palangkaraya	4	2	3	2	0	2
46	Balai Besar POM di Banjarmasin	10	8	1	8	0	2
47	Balai Besar POM di Samarinda	9	9	6	9	0	0
48	Balai Besar POM di Manado	7	7	5	7	0	0
49	Balai Besar POM di Makassar	17	5	3	5	4	8
50	Balai POM di Pangkalpinang	7	5	0	5	2	0
51	Balai POM di Kupang	17	2	5	2	7	8
52	Balai POM di Bengkulu	5	3	3	3	2	0
53	Balai POM di Jambi	2	2	7	2	0	0
54	Balai POM di Batam	13	4	3	4	1	8
55	Balai POM di Palu	5	2	2	2	3	0
56	Balai POM di Kendari	7	7	0	7	0	0
57	Balai POM di Gorontalo	8	5	0	5	3	0

NO	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang direncanakan	Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah dilaksanakan		Presentase realisasi Perencanaan		Jumlah Revisi Perencanaan Pengembangan Kompetensi yang telah dilakukan
			Sesuai Perencanaan	Tidak Sesuai Perencanaan	Terlaksana	Belum Terlaksana	
58	Balai POM di Ambon	5	5	4	5	0	0
59	Balai Besar POM di Jayapura	9	8	0	8	0	1
60	Balai POM di Manokwari	15	1	5	1	6	8
61	Balai POM di Sofifi	4	0	1	0	2	2
62	Balai POM di Mamuju	12	9	3	9	3	0
63	Balai POM di Bogor	4	4	0	4	0	0
64	Balai POM di Tasikmalaya	2	1	0	1	1	0
65	Balai POM di Surakarta	6	1	0	1	0	5
66	Balai POM di Jember	4	4	0	4	0	0
67	Balai POM di Kediri	4	0	0	0	0	4
68	Balai POM di Palopo	6	0	0	0	6	0
69	Balai POM di Payakumbuh	1	1	0	1	0	0
70	Balai POM di Tarakan	10	0	0	0	4	6

NO	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang direncanakan	Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah dilaksanakan		Presentase realisasi Perencanaan		Jumlah Revisi Perencanaan Pengembangan Kompetensi yang telah dilakukan
			Sesuai Perencanaan	Tidak Sesuai Perencanaan	Terlaksana	Belum Terlaksana	
71	Balai POM di Tangerang	2	0	0	0	1	1
72	Loka POM di Kab. Aceh Selatan	1	1	0	1	0	0
73	Loka POM di Kab. Aceh Tengah	3	1	0	1	2	0
74	Loka POM di Kota Tanjung Balai	4	0	0	0	4	0
75	Loka POM di Kab. Toba	17	0	0	0	0	17
76	Loka POM di Kota Lubuklinggau	5	3	0	3	0	2
77	Loka POM di Kab. Banyumas	3	0	1	0	3	0
78	Loka POM di Kab. Buleleng	3	0	0	0	3	0
79	Loka POM di Kab. Mimika	1	0	0	0	0	1
80	Loka POM di Kab. Merauke	1	0	0	0	1	0
81	Loka POM di Kab. Dharmasraya	1	0	2	0	1	0
82	Loka POM di Kota Dumai	3	0	0	0	3	0
83	Loka POM di Kab. Indragiri Hulu	1	0	0	0	0	1

NO	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang direncanakan	Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah dilaksanakan		Presentase realisasi Perencanaan		Jumlah Revisi Perencanaan Pengembangan Kompetensi yang telah dilakukan
			Sesuai Perencanaan	Tidak Sesuai Perencanaan	Terlaksana	Belum Terlaksana	
84	Loka POM di Kab. Tulangbawang	1	1	0	1	0	0
85	Loka POM di Kab. Bima	3	0	0	0	3	0
86	Loka POM di Kab. Sanggau	6	4	1	4	1	1
87	Loka POM di Kab. Tabalong	4	3	0	3	1	0
88	Loka POM di Kab. Tanah Bumbu	1	0	1	0	1	0
89	Loka POM di Kota Balikpapan	0	0	0	0	0	0
90	Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe	2	2	0	2	0	0
91	Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat	2	0	0	0	2	0
92	Loka POM di Kab. Bungo	1	0	0	0	1	0
93	Loka POM di Kab. Rejang Lebong	1	1	0	1	0	0
94	Loka POM di Kab. Ende	2	2	0	2	0	0
95	Loka POM di Kab. Manggarai Barat	3	1	1	1	0	2
96	Loka POM di Kab. Banggai	1	0	0	0	0	1

NO	Unit Kerja	Jumlah Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang direncanakan	Kegiatan Pengembangan Kompetensi yang telah dilaksanakan		Presentase realisasi Perencanaan		Jumlah Revisi Perencanaan Pengembangan Kompetensi yang telah dilakukan
			Sesuai Perencanaan	Tidak Sesuai Perencanaan	Terlaksana	Belum Terlaksana	
97	Loka POM di Kota Baubau	3	0	0	0	3	0
98	Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar	4	2	0	2	2	0
99	Loka POM di Kota Tanjung Pinang	2	1	0	1	0	1
100	Loka POM di Kab. Belitung	5	0	0	0	5	0
101	Loka POM di Kab. Sorong	5	2	0	2	3	0
102	Loka POM di Kab. Pulau Morotai	1	0	0	0	1	0
103	Loka POM di Kab. Sambas	0	0	0	0	0	0
104	Loka POM di Kab. Belu	0	0	0	0	0	0
105	Loka POM di Kab. Sumba Timur	6	0	0	0	1	5
	Jumlah	717	379	309	379	175	163

3.9.4. MEDIA SOSIAL PPSDM POM

Sosial media adalah salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan memberikan layanan kepada para stakeholder PPSDM POM. Informasi yang dipublikasikan di media sosial mulai dari program kerja, pengumuman kegiatan, laporan kegiatan (berita), edukasi, dan informasi lain yang berhubungan dengan PPSDM POM atau Badan POM RI secara umum.

Karakteristik media sosial yang interaktif dan mudah digunakan oleh semua kalangan dan membuatnya menjadi salah satu media penyampai pesan dan konsultasi yang cepat serta efektif. PPSDM POM memiliki beberapa akun media sosial yang aktif digunakan. Akun media sosial tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 36. Akun Media Sosial PPSDM POM

Dari 4 akun media sosial di atas, pada awal tahun 2024 dilakukan diskusi oleh tim media sosial bersama dengan ketua tim SPBE dan Kepala PPSDM POM terkait rencana penonaktifan media sosial Twitter PPSDM POM. Berdasarkan hasil diskusi tim media sosial dan pimpinan di PPSDM POM, memutuskan untuk menonaktifkan akun media sosial Twitter (atau saat ini bernama X).

Penonaktifan ini dilakukan dikarenakan tidak ada interaksi dan view sama sekali di media sosial Twitter di tahun 2023. Selain itu, tipikal media sosial Twitter lebih berfokus ke teks yang tidak terlalu panjang, membuat penyampaian pesan tidak maksimal. Penonaktifan ini juga memberikan dampak positif kepada tim media sosial. Dengan dinonaktifkannya media sosial Twitter, beban kerja pengelolaan akun media sosial menjadi berkurang sehingga tim bisa fokus kepada hal lain yang lebih berdampak. Dengan dinonaktifkannya Twitter, maka akun media sosial PPSDM POM kini ada 3, yaitu Instagram, Facebook Fanpage, dan Youtube. Pada tahun 2024, capaian pengelolaan media sosial dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 37. Data Capaian Pengelolaan Media Sosial PPSDM POM

Hingga akhir tahun 2024 akun Instagram PPSDM POM memiliki 4.978 follower. Konten yang telah dipublikasikan di Instagram PPSDM POM berjumlah total 142 konten. Sementara itu untuk akun Facebook Fanpage PPSDM POM memiliki 826 *follower*. Konten yang dipublikasikan berjumlah 140 konten. 2 perbedaan konten ini karena ada 2 konten instagram yang memang hanya ditampilkan khusus di Instagram dan tidak dipublikasikan di TikTok atau Facebook Fanpage. Akun TikTok PPSDM POM memiliki 136 *follower* dan telah mempublikasikan 48 konten. Media sosial terakhir dari PPSDM POM, akun Youtube telah memiliki 829 subscriber, dengan 27 konten video.

3.10. PEMBINAAN PFM

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional dan sebagai bagian dari upaya peningkatan profesionalisme dan kompetensi ASN di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) terus berkomitmen dalam melakukan pembinaan terhadap Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (JF PFM). Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan bertujuan untuk memastikan bahwa pejabat fungsional memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap tugas dan tanggung jawabnya, memperoleh kesempatan pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, profesionalisme, serta dapat berkontribusi dalam peningkatan kualitas pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.

Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan ini mendukung indikator kinerja utama PPSDM POM dalam indikator (1) Persentase Layanan Pembinaan PFM yang dilaksanakan tepat waktu., (2) Nilai Kepuasan Layanan Pembinaan PFM. Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, PPSDM POM menyelenggarakan berbagai kegiatan strategis untuk mendukung dan mewujudkan pejabat fungsional PFM yang dapat menjalankan peran dan fungsi secara optimal serta berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas sistem pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, antara lain:

- a. Bimbingan Teknis Kompetensi SDM dan Sosialisasi Jabatan Fungsional PFM
- b. Penyusunan kebijakan terkait JF PFM
- c. Fasilitasi Organisasi Profesi PFMI
- d. Pelatihan Karya Tulis Ilmiah
- e. Penerbitan Jurnal Eruditio

3.10.1. BIMBINGAN TEKNIS KOMPETENSI SDM DAN SOSIALISASI JABATAN FUNSIONAL PFM

Bimbingan Teknis Kompetensi SDM dan Sosialisasi Jabatan Fungsional PFM dilakukan kepada seluruh Pejabat Fungsional Farmasi dan Makanan serta pihak terkait, dengan penyampaian materi dan diskusi peraturan dan kebijakan terbaru tentang kebijakan pengembangan kompetensi serta Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan, guna meningkatkan fasilitas layanan dari Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM). Materi Bimbingan Teknis sebagai berikut:

1. Sosialisasi Pemetaan Kompetensi dan Uji Kompetensi
2. Sosialisasi Pengembangan Kompetensi
3. Sosialisasi Draft Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 2 Tahun 2020 dan Petunjuk Teknis PFM
4. Sosialisasi Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional PFM Untuk Pemerintah Daerah

Kegiatan Bimbingan Teknis Kompetensi SDM dan Sosialisasi Jabatan Fungsional PFM kepada pemangku Jabatan Fungsional PFM pada Tahun

2024 dilakukan secara *Hybrid* sebanyak 14 (empat belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

1) Balai POM di Surakarta

Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 29 Januari 2024, yang diikuti oleh 31 (tiga puluh satu) orang peserta yang berasal dari Balai POM di Surakarta dan Dinas Kesehatan antara lain: Dinas Kesehatan Kab. Blora, Dinas Kesehatan Kab. Temanggung, Dinas Kesehatan Kab. Pati, Dinas Kesehatan Kab. Karanganyar, Dinas Kesehatan Kab. Kudus, Dinas Kesehatan Kab. Magelang, Dinas Kesehatan Kab. Sragen, Dinas Kesehatan Kab. Tegal, Dinas Kesehatan Kab. Wonosobo, Dinas Kesehatan Kota Surakarta yang hadir secara *online* maupun *offline*.



Gambar 38. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Surakarta

2) Badan POM Pusat

Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 2024, yang diikuti oleh 53 (lima puluh tiga) orang peserta yang berasal dari Unit Kerja di lingkungan Badan POM dan Dinas Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta antara lain: Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Dinas Kesehatan Jakarta Pusat, Dinas Kesehatan Jakarta Selatan Dinas Kesehatan Jakarta Timur, Dinas Kesehatan Jakarta Utara, Dinas Kesehatan Kepulauan Seribu yang hadir secara *online* maupun *offline*.



Gambar 39. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi Badan POM Pusat

3) Balai Besar POM di Denpasar

Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024, yang diikuti oleh 64 (enam puluh empat) orang peserta yang berasal dari Balai Besar POM di Denpasar, Loka POM di Kabupaten Buleleng dan Dinas Kesehatan di Lingkungan Provinsi Bali, yang hadir secara *online* maupun *offline*.



Gambar 40. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Denpasar

4) Balai Besar POM di Palangka Raya

Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 2024, yang diikuti oleh 67 (enam puluh tujuh) orang peserta yang berasal dari Balai Besar POM di Palangka Raya, Loka POM di Kotawaringin Barat, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, yang hadir secara *online* maupun *offline*.



Gambar 41. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Palangkaraya

5) Balai Besar POM di Samarinda

Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 25 April 2024, yang diikuti oleh 72 (tujuh puluh dua) orang peserta yang berasal dari Balai Besar POM di Samarinda dan Loka POM di Kota Balikpapan yang hadir secara *online* maupun *offline*.



Gambar 42. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Samarinda

6) Balai Besar POM di Banjarmasin

Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2024, yang diikuti oleh 70 (tujuh puluh) orang peserta yang berasal dari Balai Besar POM di Banjarmasin, Loka POM di Tabalong, Loka POM di Tanah Bumbu dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan yang hadir secara *online* maupun *offline*.



Gambar 43. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Banjarmasin

7) Balai Besar POM di Bandung

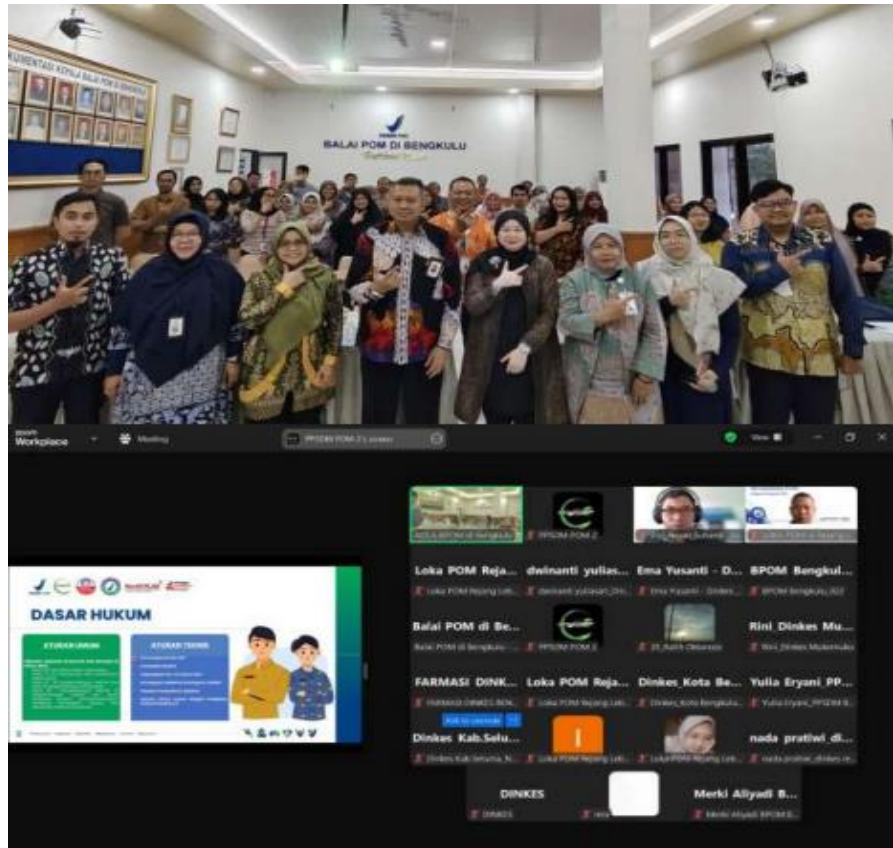
Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2024, yang diikuti oleh 138 (seratus tiga puluh delapan) orang peserta yang berasal dari Balai Besar POM di Bandung, Balai POM di Tasikmalaya, Balai POM di Bogor dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Jawa Barat yang hadir secara *online* maupun *offline*.



Gambar 44. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Bandung

8) Balai POM di Bengkulu

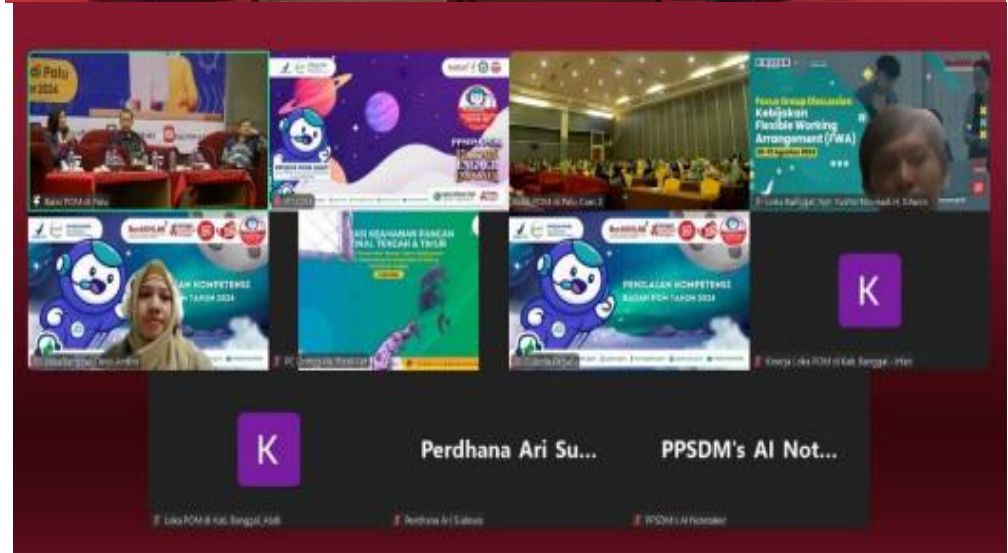
Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2024, yang diikuti oleh 66 (enam puluh enam) orang peserta yang berasal dari Balai POM di Bengkulu dan Dinas Kesehatan di Lingkungan Provinsi Bengkulu yang hadir secara *online* maupun *offline*.



Gambar 45. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Bengkulu

9) Balai POM di Palu

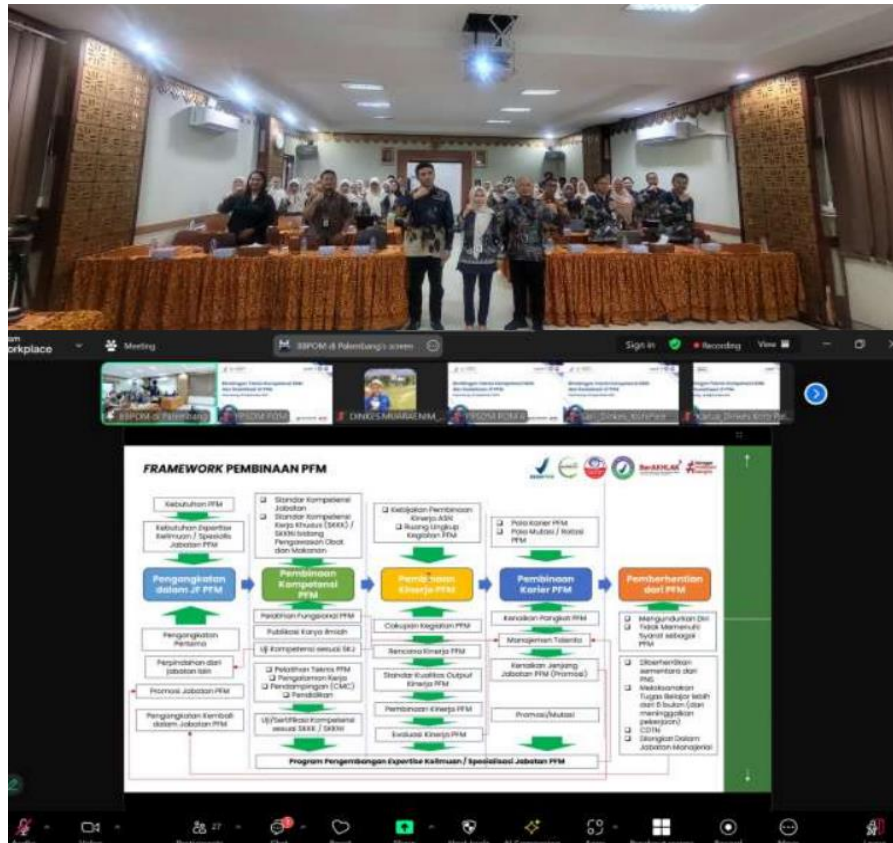
Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 12 September 2024, yang diikuti oleh 67 (enam puluh tujuh) orang peserta yang berasal dari Balai POM di Palu dan Dinas Kesehatan di Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah yang hadir secara *online* maupun *offline*.



Gambar 46. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Palu

10) Balai Besar POM di Palembang

Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 26 September 2024, yang diikuti oleh 97 (sembilan puluh tujuh) orang peserta yang berasal dari Balai Besar POM di Palembang, Loka POM di Lubuklinggau dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan yang hadir secara *online* maupun *offline*.



Gambar 47. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Palembang

11) Balai POM di Kupang

Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2024, yang diikuti oleh 60 (enam puluh) orang peserta yang berasal dari Balai POM di Kupang dan Dinas Kesehatan di Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang hadir secara *online* maupun *offline*.



Gambar 48. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Kupang

12) Balai POM di Ambon

Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 15 November 2024, yang diikuti oleh 97 (sembilan puluh tujuh) orang peserta yang berasal dari Balai POM di Ambon dan Dinas Kesehatan di Lingkungan Provinsi Maluku yang hadir secara *online* maupun *offline*.



Gambar 49. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Ambon

13) Balai POM di Sofifi

Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 20 s.d 22 November 2024, dengan agenda kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Dinas Kesehatan Kota Tidore yang dilaksanakan pada tanggal 20 November 2024.
- b. Koordinasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Dinas Kesehatan Kota Ternate yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024, dan
- c. Bimbingan Teknis Kompetensi SDM dan Sosialisasi Jabatan Fungsional PFM yang diselenggarakan pada tanggal 22 November 2024 di Hotel Emerald, Ternate. yang diikuti oleh 34 (tiga puluh empat) orang peserta yang berasal dari Balai POM di Sofifi, Dinas Kesehatan Kota Ternate, dan Dinas Kesehatan Kota Tidore yang hadir secara *online* maupun *offline*.



Gambar 50. Kegiatan Koordinasi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan di Dinas Kesehatan Kota Tidore



Gambar 51. Kegiatan Bimbingan Teknis Kompetensi SDM dan Sosialisasi Jabatan Fungsional PFM yang diselenggarakan di Hotel Emerald, Ternate

14) Balai Besar POM di Serang

Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024, yang diikuti oleh 78 (tujuh puluh delapan) orang peserta yang berasal dari Balai Besar POM di Serang, Dinas Kesehatan Kota Cilegon, Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak, Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Dinas Kesehatan Kota Serang, Dinas Kesehatan Kabupaten Serang yang hadir secara *online* maupun *offline*.



Gambar 52. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Serang

15) Balai POM di Tasikmalaya

Kegiatan Bimbingan Teknis dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2024, yang diikuti oleh 42 (empat puluh dua) orang peserta yang berasal dari Balai POM di Tasikmalaya dan Dinas Kesehatan di Lingkungan Kabupaten/Kota Tasikmalaya serta Kota Banjar yang hadir secara *online* maupun *offline*.



Gambar 53. Kegiatan Bimtek SDM dan Sosialisasi JF PFM di Tasikmalaya

3.10.2. PENYUSUNAN KEBIJAKAN TERKAIT JF PFM

Sebagai unit kerja pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan (JF PFM), Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan terkait JF PFM selalu relevan dan sesuai dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan organisasi. Dalam rangka

memperkuat tata kelola jabatan fungsional ini, PPSDM POM telah melaksanakan serangkaian kegiatan penyusunan kebijakan yang mencakup:

1. Revisi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 2 Tahun 2020

PPSDM POM berkontribusi dalam proses revisi Permenpan RB No. 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional PFM. Revisi ini bertujuan untuk menyempurnakan regulasi yang mengatur kedudukan, tugas, jenjang, angka kredit, serta mekanisme pembinaan dan pengembangan karier pejabat fungsional PFM, sehingga lebih sesuai dengan dinamika dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan saat ini.



Gambar 54. Dokumentasi FGD Revisi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 2 Tahun 2020

Kegiatan Penyusunan Revisi Permenpan RB No. 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional PFM berproses mulai tahun 2023 yang melibatkan Unit Kerja di lingkungan BPOM, Balai Besar/Balai/Loka POM, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2024 dilakukan kegiatan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Jabatan Fungsional PFM yang dihadiri oleh Tim Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-



Gambar 55. Dokumentasi Kegiatan Harmonisasi Revisi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 2 Tahun 2020

undangan Kemenkumham RI, Tim KemenPAN RB, Tim Biro Hukum dan Organisasi BPOM, Tim Biro SDM BPOM. Setelah rangkaian kegiatan tersebut, maka ditetapkan Permenpan RB No. 13 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional PFM pada tanggal 17 Oktober 2024.

RANCANGAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil serta untuk meningkatkan kinerja organisasi, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenai Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan;
b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengawas Farmasi dan Makanan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu dilakukan perubahan;



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan: H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: <http://ditjenpp.kemkumham.go.id> Surel: harmonisasi@gmail.com

Nomor : PPE.PP.01.05-2133
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi

Yth. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
di
Jakarta

Menindaklanjuti surat permohonan Harmonisasi dari Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi nomor B/201/S.HK.01/2024 tanggal 20 Juni 2024, dengan hormat kami sampaikan hal berikut ini.



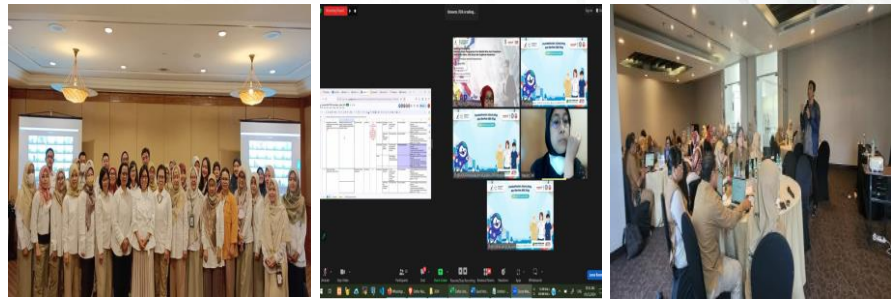
SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Gambar 56. Dokumentasi Peraturan Menteri PAN RB Nomor 13 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

2. Penyusunan Rancangan Petunjuk Teknis (Juknis) JF PFM

Dalam upaya mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif, PPSDM POM juga menyusun rancangan petunjuk teknis (juknis) bagi pemangku JF PFM. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi panduan operasional bagi pejabat fungsional dalam menjalankan tugas dan fungsinya, baik terkait mekanisme penghitungan angka kredit, tata cara penilaian kinerja, maupun aspek pembinaan dan pengembangan kompetensi.



Gambar 57. Dokumentasi FGD Penyusunan Rancangan Petunjuk Teknis JF Pengawas Farmasi dan Makanan

3.10.3. FASILITASI ORGANISASI PROFESI PFMI

BPOM sebagai lembaga pemerintah yang memiliki tugas kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan di bidang Obat dan Makanan, harus dapat menjamin mutu, keamanan, dan kemanfaatan produk Obat dan Makanan yang beredar. Untuk menjalankan fungsi di bidang pengawasan Obat dan Makanan tersebut, Pengawas Farmasi dan Makanan BPOM dituntut untuk bersikap dan bertindak profesional serta memiliki kompetensi yang memadai. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dengan baik dan benar diperlukan wadah atau organisasi untuk Pengawas Farmasi dan Makanan. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu, untuk mengembangkan profesionalitas serta mencapai tujuan bersama. Tujuan umum dari sebuah organisasi profesi yaitu:

- a. Meningkatkan dan/atau mengembangkan karier anggota.
- b. Meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan anggota.
- c. Meningkatkan dan/atau mengembangkan kewenangan profesional anggota.
- d. Meningkatkan dan/atau mengembangkan kesejahteraan.

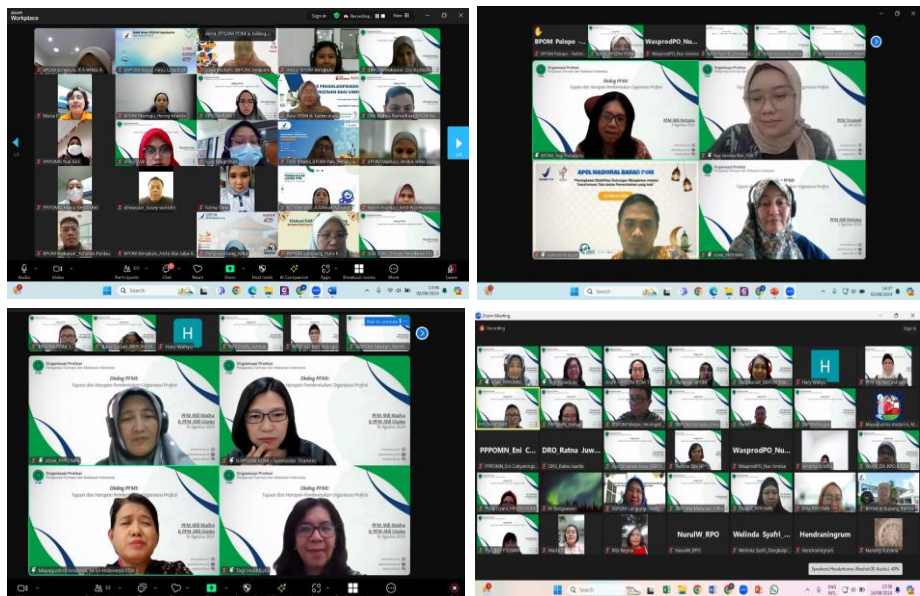
Untuk mencapai tujuan tersebut, BPOM sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan telah membuat wadah berupa Organisasi Profesi Pengawas Farmasi dan Makanan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.03.21.146 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pembentukan Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

Indonesia (PFMI) dan berbadan hukum sesuai dengan Akta Notaris Nomor 06 tanggal 13 Maret 2020. Pada tanggal 28 Desember 2024, terdapat 1962 anggota yang telah mendaftarkan diri dan diverifikasi oleh pengurus PFMI.

Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 2 tahun 2020 pada pasal 58 tentang organisasi profesi, PFMI telah melakukan advokasi kepada PFM Ahli Madya terkait permasalahan yang dihadapi PFM Ahli Madya di Pusat serta UPT. PFMI telah menerima beberapa hal yang disampaikan oleh perwakilan PFM Madya pada pertemuan secara daring pada tanggal 10 dan 11 Juni 2024. Adapun secara garis besar yang disampaikan adalah terkait penilaian DUPAK PFM, peninjauan kembali nilai angka kredit hasil penyeteraan jabatan, dan terkait persyaratan Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang diakui dalam penilaian.

Salah satu upaya PFMI mendengar suara Anggota, diselenggarakan kegiatan diskusi dengan para Pejabat Pengawas Farmasi dan Makanan di seluruh Indonesia dengan PFM Terampil pada tanggal 26 Juli 2024, PFM Ahli Pertama pada tanggal 2 Agustus 2024, PFM Ahli Muda pada tanggal 9 Agustus 2024, dan PFM Ahli Madya dan Utama pada tanggal 16 Agustus 2024.

Pada tanggal 25 Oktober 2024, PFMI menghadiri undangan BASARNAS sebagai narasumber dalam kegiatan studi tiru pembentukan organisasi profesi di BASARNAS. PFMI melakukan sosialisasi atau paparan terkait pembentukan dan pelaksanaan organisasi profesi PFMI yang telah dilakukan selama ini.



Gambar 58. Dialog PFMI dengan Anggota

PFMI telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pada tanggal 7 s.d 8 November 2024. Kegiatan ini diawali dengan seminar nasional yang diisi oleh Pengurus Organisasi Profesi Widyaiswara, Analis SDMA, IAI dan Perwakilan PFM Ahli Utama. Kemudian di sesi siang dilaksanakan sidang pertama yaitu Review AD/ART dan Kode Etik PFMI dan Laporan Kegiatan Pengurus Daerah. Pada hari kedua Jumat, 08 November 2024, diselenggarakan sidang II dengan pembahasan kepengurusan daerah, topik/isu penting PFMI, serta rencana kerja 2025 hingga penetapan program kegiatan 2025.



Gambar 59. Rapat Kerja Nasional Organisasi Profesi PFMI

3.10.4. PELATIHAN KARYA TULIS ILMIAH

Pada Tahun 2024 telah diselenggarakan Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Tingkat Dasar sebanyak 3 (tiga) angkatan dengan total peserta sebanyak 120 (seratus dua puluh) peserta. Adapun sebaran pesertanya adalah pegawai unit kerja Pusat, Balai Besar POM / Balai POM / Loka POM seluruh Indonesia.

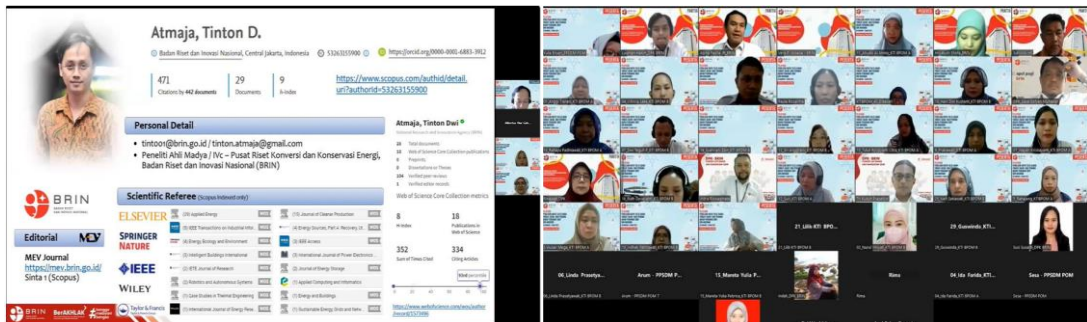
PPSDM POM juga menyelenggarakan Pelatihan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI) Tingkat Lanjutan sebanyak 1 (satu) Batch pada tahun 2024 dengan total peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang. KTI Tingkat lanjutan ini dimaksudnya untuk pegawai Badan POM yang telah memiliki karya tulis. Setelah mengikuti KTI Tingkat lanjutan, diharapkan peserta dapat submit ke jurnal ilmiah baik nasional maupun internasional.

Pelatihan Karya Tulis Ilmiah yang merupakan kerjasama PPSDM POM dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pelatihan menggunakan metode pelatihan *fully e-learning* dimana peserta melaksanakan pelatihan dengan meninggalkan pekerjaan, dengan maksud untuk peningkatan kompetensi dalam bidang penulisan karya tulis ilmiah melalui pembelajaran jarak jauh secara daring. Pelatihan dilaksanakan selama 10 hari kerja dengan

80 (delapan puluh) jam pembelajaran untuk KTI Tingkat Dasar dan 79 (tujuh puluh sembilan) jam pembelajaran untuk KTI Tingkat Lanjutan. Adapun rincian tanggal penyelenggaraan Pelatihan adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Penyelenggaraan Pelatihan KTI

Batch	Tanggal Penyelenggaraan	Jumlah Peserta
1 (Dasar)	19 Februari s.d 01 Maret 2024	40 (Empat Puluh)
2 (Dasar)	22 April s.d 06 Mei 2024	40 (Empat Puluh)
3 (Dasar)	03 s.d 16 Juli 2024	40 (Empat Puluh)
Lanjutan	07 s.d 18 Oktober 2024	40 (Empat Puluh)



Gambar 60. Dokumentasi Pelatihan KTI

3.10.5. PENERBITAN JURNAL ERUDITIO

B POM menjamin pengembangan profesi para pegawainya termasuk dalam hal pembuatan Karya Tulis Ilmiah di bidang Pengawasan Obat dan Makanan. PPSDM POM mengelola Eruditio: *Indonesia Journal of Food and Drug Safety*, yang merupakan jurnal ilmiah elektronik berbasis *open journal system* (OJS). Jurnal ini menjadi wadah kekinian bagi para Pejabat Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan dan lainnya di lingkungan Badan POM untuk menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk karya tulis ilmiah dengan lebih mudah dan praktis.

Pada tahun 2024 telah diterbitkan masing-masing 7 (tujuh) artikel pada Eruditio Vol. 4, No. 1 Edisi Desember 2023 dan Eruditio Vol. 4, No. 2 Edisi Juni 2024. Sedangkan untuk Eruditio Vol. 5 No. 1 Edisi Desember 2024 masih terdapat 7 (delapan) naskah dalam proses penerbitan. Selain itu, Eruditio telah mendapatkan akreditasi jurnal ilmiah dengan peringkat 5 sesuai

dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 177/E/KPT/2024 tanggal 15 Oktober 2024 tentang Peringkat Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode II Tahun 2024. Akreditasi ini berlaku sampai dengan Volume 6 Nomor 1 Tahun 2026.



Vol.. 4, No. 2 (2024)

Edisi Juni

Eruditio Vol. 4 No. 2, June 2024

Published: October 25, 2024



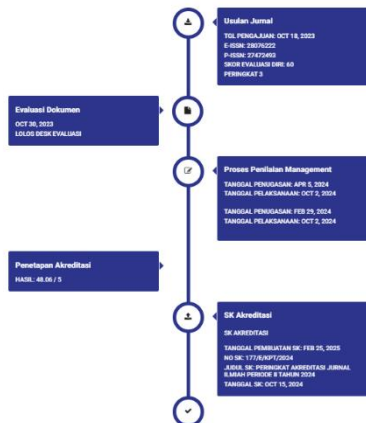
Vol.. 4, No. 1 (2023)

Edisi Desember

Published: May 2, 2024

Gambar 61. Tampilan Eruditio Eruditio Vol. 4, No. 1 Edisi Desember 2023 dan Eruditio Vol. 4, No. 2 Edisi Juni 2024

Detail Kemajuan Usulan Akreditasi



Gambar 62. Proses Akreditasi Eruditio dan Sertifikat Akreditasi Eruditio

3.11. PENGAKREDITASI PROGRAM PELATIHAN TEKNIS BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka pemenuhan jaminan mutu lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Kepala BPOM menugaskan PPSDM POM sebagai pelaksana akreditasi program pelatihan teknis dan fungsional dalam Keputusan Kepala BPOM No. 382 Tahun 2023 tentang Pelaksana Pengakrediasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional. PPSDM POM memiliki tugas menguatkan program akreditasi program pelatihan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi SDM dan kualitas pengawasan Obat dan Makanan di seluruh negeri. Pengakreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Pengawasan Obat dan Makanan ini mendukung pencapaian sasaran strategis PPSDM POM Ke-4 yaitu Meningkatnya kualitas pengembangan kompetensi SDM, dengan indikator kinerja yaitu Nilai kepuasan penyelenggaraan pengembangan kompetensi.

Pada tahun 2023 PPSDM POM mengajukan permohonan ke Lembaga Administrasi Negara (LAN) untuk Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan, dengan hasil mendapatkan kategori Terakreditasi dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.

Pada Triwulan 1 tahun 2024, PPSDM POM melaksanakan akreditasi program pelatihan teknis dan fungsional kepada penyelenggara pelatihan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Menyampaikan pemberitahuan akreditasi program pelatihan teknis PKP Pertama dan DFI Junior ke Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah maupun non pemerintah. Sesuai dengan batas waktu pengajuan akreditasi, terdapat 6 (enam) Lembaga Penyelenggara Pelatihan Pemerintah maupun non pemerintah yang mengajukan akreditasi program pelatihan teknis PKP Pertama dan DFI Junior.
- b. Menyampaikan surat Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Akreditasi Program Pelatihan Teknis kepada 6 (enam) Lembaga Penyelenggara Pelatihan untuk melengkapi kelengkapan dokumen persyaratan Akreditasi

Pada Triwulan II, PPSDM POM sebagai pelaksana pengakreditasi program pelatihan teknis dan fungsional telah melakukan beberapa hal dalam pelaksanaan akreditasi program pelatihan, yaitu:

1. Pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan Akreditasi program pelatihan yang telah diajukan oleh 6 (enam) lembaga penyelenggara pelatihan oleh tim sekretariat. Dari hasil rapat yang telah dilakukan oleh tim asesor dan tim sekretariat didapatkan 4 (empat) lembaga penyelenggara pelatihan non pemerintah yang akan di Akreditasi program pelatihan oleh PPSDM POM yaitu:
 - a. Indonesia Halal Training & Education Center (IHATEC)

- b. Catalyst Consulting
 - c. CV. Eldwin Cipta Kompetensi (ECK)
 - d. CKP CBT Centre
2. Dilakukan penilaian kesesuaian dokumen persyaratan Akreditasi oleh tim Asesor terhadap 4 (empat) lembaga penyelenggara pelatihan.
 3. Untuk meningkatkan kompetensi tim Asesor Akreditasi, PPSDM POM telah mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi pada tanggal 19 - 20 Juni 2024 di Hotel Aryaduta, Jakarta.

Pada Triwulan III tahun 2024, PPSDM POM sebagai pelaksana pengakreditasi program pelatihan teknis dan fungsional telah melakukan beberapa hal dalam pelaksanaan akreditasi program pelatihan, yaitu:

1. Tim Asesor dan tim sekretariat melakukan visitasi akreditasi kepada 4 (empat) lembaga penyelenggara pelatihan.
2. Tim Asesor memberikan waktu 3 (tiga) hari perbaikan data dukung kepada lembaga penyelenggara pelatihan.
3. Tim Asesor melakukan penilaian terhadap hasil visitasi dan perbaikan data dukung yang dikumpulkan.



Gambar 63. Visitasi ke Lembaga Pengusul Akreditasi

Pada Triwulan IV tahun 2024, PPSDM POM sebagai pelaksana pengakreditasi program pelatihan teknis dan fungsional telah melakukan beberapa hal dalam pelaksanaan akreditasi program pelatihan, yaitu:

1. Dilakukan rapat penilaian akhir yang dihadiri oleh Tim Penilai Akhir, Tim Asesor dan Tim Sekretariat.

2. Penyampaian hasil akreditasi program pelatihan kepada lembaga penyelenggara pelatihan sebagai berikut:
 - a. Indonesia Halal Training & Education Center (IHATEC), dengan hasil Terakreditasi kategori C dengan nilai 73,40 masa berlaku 2 (dua) tahun.
 - b. Catalyst Consulting, dengan hasil Terakreditasi kategori C dengan nilai 73,83 masa berlaku 2 (dua) tahun.
 - c. CV. Eldwin Cipta Kompetensi (ECK) dengan hasil Terakreditasi kategori C dengan nilai 73,74 masa berlaku 2 (dua) tahun.
 - d. CKP CBT Centre, dengan hasil Terakreditasi kategori B dengan nilai 82,95 masa berlaku 3 (tiga) tahun.
3. Penyampaian sertifikat akreditasi kepada lembaga penyelenggara pelatihan yang hasilnya dinyatakan Terakreditasi oleh PPSDM POM.



Gambar 64. Penyerahan sertifikat Akreditasi

3.12. PENGELOLAAN BUDAYA BERAKHLAK DAN AGEN PERUBAHAN BADAN POM

Badan POM berkomitmen untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi pada 8 (delapan) area perubahan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi, sehingga kualitas pelayanan publik Badan POM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Sementara mulai tahun 2023, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan roadmap yang semula Reformasi Birokrasi terbagi ke dalam 8 (delapan) area perubahan, kini konsep Reformasi Birokrasi menjadi Reformasi Birokrasi berdampak yang terdiri dari Reformasi Birokrasi General dan Reformasi Birokrasi Tematik.

Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan diamanati untuk mengawal Reformasi Birokrasi yaitu terkait Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional. Capaian Sasaran Strategis ini diukur menggunakan indikator “Nilai Indeks *Core Value* BerAKHLAK” dengan target pada akhir tahun 2024 sebesar 67,14% (enam puluh tujuh koma satu empat persen).

Untuk dapat mencapai target tersebut, Badan POM mengeluarkan pernyataan keabsahan Sekretaris Utama Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor BOT.01.03.2.06.24.469 tanggal 19 Juni 2024 tentang Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2024. Rencana aksi yang menjadi tanggung jawab dari Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan dan sebagai pendukung dalam pencapaian Indeks *Core Values* ASN BerAKHLAK antara lain:

- a. Sosialisasi dan Internalisasi *Core Values* BerAKHLAK yang dilaksanakan secara berkelanjutan
- b. *Capacity Building* Agen Perubahan dan Pimpinan Perubahan dalam rangka Internalisasi *Core Values* BerAKHLAK
- c. Penyusunan rencana aksi AOC serta monitoring dan evaluasinya.
- d. Survei mandiri implementasi *Core Values* BerAKHLAK pada Badan POM
- e. Pemilihan dan Pemberian penghargaan bagi agen perubahan terbaik.

Kegiatan Pengelolaan Budaya Kerja dan Agen Perubahan di Lingkungan BPOM ini mendukung indikator kinerja utama PPSDM POM dalam indikator (1) Nilai RB Badan POM Manajemen Perubahan., (2) Persentase Realisasi Rencana Aksi RB terkait Manajemen Perubahan.

3.12.1. SOSIALISASI DAN INTERNALISASI CORE VALUES BERAKHLAK

Sosialisasi dan Internalisasi Core Values BerAKHLAK dilakukan secara rutin pada tiap triwulannya dengan tema yang berbeda-beda. Target dan sasaran dari kegiatan ini yaitu para agen perubahan yang menjadi perpanjangan tangan PPSDM POM dalam melakukan sosialisasi dan internalisasi BerAKHLAK di lingkungan unit terkecil. Adapun kegiatan yang telah diselenggarakan oleh PPSDM POM yaitu sebagai berikut:

a. Sosialisasi Reformasi Birokrasi General dan RB Tematik melalui IDEAS

Kegiatan Sosialisasi pertama di tahun 2024 dilakukan melalui aplikasi IDEAS pada tanggal 19 Februari 2024. Materi yang disampaikan berupa RB General dan RB Tematik. Dikarenakan adanya perubahan kebijakan terkait penilaian RB yang semula dibagi menjadi 8 area perubahan, sejak tahun 2023 menjadi RB berdampak. Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu Bapak Kurniawan Norat, SE, M.A.B. Peserta yang mengikuti sejumlah 126 (seratus dua puluh enam) pegawai.

b. Sharing Session: Semangat Ramadhan tema “Dengan Semangat Kerja dan Sharing Nilai Budaya Kerja Korea”

Sosialisasi kedua dilaksanakan dengan tema “Dengan Semangat Kerja dan Sharing Nilai Budaya Kerja Korea, diselenggarakan pada tanggal 30 Maret 2024. Narasumber yang terlibat yaitu Dr. Ali, An Sun Geun M.A. Kegiatan ini dilaksanakan secara *hybrid*.



Gambar 65. Kegiatan Sharing Session: Semangat Ramadhan

c. Sosialisasi Hasil Survei Mandiri Indeks BerAKHLAK

Sosialisasi yang ketiga dilaksanakan dengan tema “Hasil Survei Mandiri Indeks BerAKHLAK”. Pada triwulan II, Pusat Pengembangan SDM POM bekerja sama dengan ACT Consulting telah berproses melaksanakan Survei Mandiri BerAKHLAK. Hasil survei tersebut disosialisasikan pada kegiatan ini dan dilaksanakan pada tanggal 19-20 Agustus 2024 dengan melibatkan agen perubahan Unit Kerja Pusat, Balai Besar, Balai POM, Loka POM serta agen perubahan dari Kementerian/Lembaga lainnya. Total agen perubahan yang mengikuti kegiatan sejumlah 106 (seratus enam) peserta dengan rincian 27 (dua puluh tujuh) dari Unit Kerja Pusat, 75 (tujuh puluh lima) dari Balai Besar/Balai/Loka POM, dan 4 (empat) dari Kementerian/Lembaga lainnya. Narasumber yang terlibat yaitu Coach Eka dari ACT Consulting.

Pada kegiatan ini, tidak hanya disampaikan hasil survei akan tetapi juga diberikan materi antara lain:

1. *Why BerAKHLAK and Finding The Grand Why*
2. *Finding Inner Value and Alignment*
3. *Understanding BerAKHLAK*
4. *Understanding Survei Result.*
5. *Wrap Up and Getting Commitment.*



Gambar 66. Kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi BerAKHLAK

d. Dialog Generasi Milenial bersama Kepala Badan POM dengan tema Brainstorming Agen Perubahan dalam Membangun Budaya BerAKHLAK di Lingkungan Badan POM

Sosialisasi terakhir pada tahun 2024 yaitu berupa Dialog Generasi Milenial bersama Kepala Badan POM dengan tema Brainstorming Agen Perubahan dalam membangun Budaya BerAKHLAK di Lingkungan Badan POM. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 2024 secara hybrid. Peserta yang terlibat dalam kegiatan ini yaitu agen perubahan dengan total peserta 151 (seratus lima puluh satu) baik dari Unit Kerja Pusat/Balai Besar/Balai/Loka POM.



Gambar 67. Kegiatan Dialog Generasi Milenial bersama Kepala Badan POM

3.12.2. CAPACITY BUILDING PIMPINAN PERUBAHAN DAN AGEN PERUBAHAN

Kegiatan Capacity Building Pimpinan Perubahan dan Agen Perubahan merupakan kegiatan rutin tiap tahunnya dengan tema yang berbeda-beda. Pada tahun 2024, tema yang diangkat yaitu BPOM menuju *World Class Bureaucracy* dengan mengoptimalkan teknologi. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 27 sd 28 Februari 2024 secara luring di Lampung. Tujuannya yaitu Kegiatan ini diikuti oleh 105 (seratus lima) pimpinan perubahan dan 84 (delapan puluh empat) agen perubahan. Narasumber yang terlibat dalam kegiatan ini antara lain:

- a. Prof. Ir. Onno Widodo Purbo, M.Eng., Ph.D.
- b. Ir. Erna Witoelar

- c. Iqbal Hariadi
- d. Prof. Yudho Giri Sucahyo, S.Kom., M.Kom., Ph.D.

Adapun rincian materi yang diberikan selama kegiatan Capacity Building yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk kelas Pimpinan Perubahan akan lebih berfokus pada materi sebagai berikut:
 1. *Agile Project Management*
 2. *Pengantar Big Data*
 3. *Digital Leadership*
- b. Sedangkan untuk kelas Agen Perubahan lebih terfokus pada materi:
 1. *Project Based Learning*
 2. *Digital Transformation*



Gambar 68. Pembukaan Kegiatan Capacity Building oleh Kepala Badan POM

3.12.3. PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAN MONITORING EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan, agen perubahan memiliki peran dan tugas sebagai berikut:

- a. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada pegawai di lingkungan unit kerjanya tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah yang lebih baik.
- b. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk berpartisipasi dalam perubahan.
- c. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada pegawai.
- d. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan.
- e. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai dengan pimpinan perubahan.

Agar peran dan tugas agen perubahan dapat optimal, agen perubahan diwajibkan menyusun rencana aksi. Terdapat roadmap tema untuk tiap tahunnya, sedangkan di tahun 2024 tema yang diangkat yaitu “Badan POM menuju World Class Bureaucracy” dengan mengoptimalkan digitalisasi. Untuk itu, salah satu rencana aksi yang disusun harus bertujuan untuk mendorong SMART ASN Badan POM.

Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan melakukan pendampingan dalam proses penyusunan rencana aksi yang dilaksanakan pada saat kegiatan Capacity Building Agen Perubahan yaitu pada tanggal 27 Februari 2024 bertempat di Lampung.

Setelah rencana aksi disusun, seluruh agen perubahan menginput rencana aksi tersebut pada aplikasi <https://e-monevrb.pom.go.id/> . Proses selanjutnya, agen perubahan diwajibkan mengupdate capaian dari masing-masing rencana aksi pada aplikasi dan akan dimonitoring secara triwulan oleh PPSDM POM.



Gambar 69. Kegiatan Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Agen Perubahan

3.12.4. SURVEI MANDIRI BERAKHLAK

Dalam rangka mengukur keberhasilan implementasi *Core Value* BerAKHLAK di Lingkungan Badan POM, Pusat Pengembangan SDM POM melakukan Survei Indeks BerAKHLAK. Survei Indeks BerAKHLAK bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan budaya organisasi diantaranya mengenai implementasi Core Values BerAKHLAK, keselarasan antara nilai pribadi dan organisasi, serta aspirasi pegawai ASN terhadap kondisi budaya yang ideal. Survei ini bekerja sama dengan ACT Consulting. Proses pengisian survei dilaksanakan pada tanggal 2 sd 8 Juli 2024. Seluruh pegawai diwajibkan mengikuti survei tersebut agar mendapatkan hasil yang valid.

Setelah pengisian survei dilakukan, proses selanjutnya yaitu FGD yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024. FGD dibagi menjadi 2 sesi yaitu sesi leader dan sesi non leader. Setelah kedua proses tersebut selesai, didapatkan hasil akhir indeks BerAKHLAK yaitu sebesar 61,1% kategori cukup sehat. Adapun rincian masing-masing nilai yaitu sebagai berikut:

Tabel 21. Hasil Survei Mandiri Indeks BerAKHLAK

No	Nilai	Indeks
1.	Berorientasi Pelayanan	79,6%
2.	Akuntabel	64,7%
3.	Kompeten	74,8%
4.	Harmonis	30,3%
5.	Loyal	60,2%
6.	Adaptif	54,5%
7.	Kolaboratif	63,4%

3.12.5. AGENT OF CHANGE (AOC) AWARD

Sebagai salah satu reward bagi para agen perubahan yang telah melaksanakan rencana aksinya, Pusat Pengembangan SDM POM mengadakan *Agent of Change Award*. *Agent of Change Award* ini terdiri dari 2 tahapan.

Evaluasi Tahap 1 meliputi:

a. Pengungkit (40%), terdiri dari:

1. Laporan 2024 (sampai dengan TW III), bobot 30%
2. Evaluasi penggunaan aplikasi <https://e-monevrb.pom.go.id> , bobot 10%

b. Hasil (60%), terdiri dari:

1. Video Testimoni evaluasi maupun penilaian hasil project action plan dari stakeholder terkait, bobot 10%
2. Survei BerAKHLAK yang sudah dilaksanakan di TW III Tahun 2024, bobot 30%.
3. Predikat WBK/WBBM, dan/atau nilai pelaksanaan RB di unit kerja dari Inspektorat, bobot 10%
4. Survei RB Tematik, bobot 10%

Evaluasi tahap I dilaksanakan pada Bulan Oktober sd November 2024, dan juri yang terlibat berasal dari tim internal Budaya Kerja Badan POM.

Evaluasi tahap II Agen perubahan terbaik tahun 2024 dilakukan penilaian terhadap 5 (lima) unit kerja pusat dan 5 (lima) UPT yang mendapat nilai tertinggi dari hasil evaluasi tahap I. Adapun kriteria penilaian tahap II yaitu:

- a. Visitasi lapangan secara Online, bobot 30%
- b. Video Implementasi BerAKHLAK, bobot 30%
- c. Presentasi AoC Terbaik, bobot 40%

Evaluasi tahap II dilaksanakan pada tanggal 17 sd 18 Desember 2024 berupa penyampaian paparan oleh para agen perubahan. Juri yang terlibat dalam evaluasi tahap II yaitu Kementerian PANRB, Lembaga Administrasi Negara, eclat Consulting, Sekretaris Utama Badan POM, Inspektur I Badan POM, Inspektur II Badan POM. Adapun Hasil Penilaian Tahap II yaitu sebagai berikut:

Tabel 22. Hasil Penilaian Agen Perubahan Tahun 2024

No	Unit Kerja	Nilai	No	Unit Kerja	Nilai
1	Balai Besar POM di Jakarta	91,01	1	Direktorat Cegah Tangkal	90,83
2	Balai POM di Pangkalpinang	90,39	2	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	89,88
3	Balai Besar POM di Pekanbaru	89,90	3	Direktorat Standardisasi Pangan Olahan	89,27

3.12.6. LEADER DIALOGUE

Leader Dialogue merupakan kegiatan yang diselenggarakan dengan target sasaran para pimpinan unit kerja serta agen perubahan. Pada tahun 2024, PPSDM POM menyelenggarakan kegiatan *Leader Dialogue* dengan mengundang Bapak Ignasius Jonan. Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 30 April 2025 secara *hybrid*. Total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut yaitu 225 (dua ratus dua puluh lima) peserta luring dan 477 (empat ratus tujuh puluh tujuh) daring. Materi yang disampaikan yaitu Transformasi Organisasi, mengingat bahwa Bapak Jonan merupakan salah satu pelopor proses transformasi PT KAI, dan beliau merupakan *Chief Executive Officer* PT KAI sejak 2009 sd 2014.



Gambar 70. Kegiatan Leader Dialogue

3.13. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS PPSDM POM

Indeks Reformasi Birokrasi PPSDM POM didapat dari hasil penilaian oleh Inspektorat Badan POM. Pada Tahun 2022 sesuai review Renstra PPSDM POM terdapat perubahan target Tahun 2022 sampai dengan 2024 disesuaikan dengan tren capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) telah melakukan evaluasi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) pada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan dan digunakan sebagai nilai Reformasi Birokrasi unit kerja. Dalam pencapaiannya ada beberapa kegiatan yang mendukung ketercapaian kegiatan tersebut, antara lain sebagai berikut:

a. Pelayanan Publik

1. Survei Kepuasan Pelanggan

Pada tahun 2024 PPSDM POM pertama kali diajukan sebagai Unit Pelayanan Publik (UPP) tahap awal dilakukan penentuan layanan apa saja yang ada di PPSDM POM oleh Biro Hukum dan Organisasi. adapun jenis layanan yang ditetapkan yaitu:

- a. Penilaian Kompetensi dan Pemberian Umpan Balik/Feedback Hasil Penilaian Kompetensi
- b. Pengembangan Kompetensi
- c. Sertifikasi Kompetensi
- d. Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA)
- e. Praktik Kerja Lapangan (PKL)
- f. Penerbitan Status Akreditasi Program Pelatihan Teknis dan Fungsional Pengawas Obat dan Makanan
- g. Layanan Perpustakaan

Sebagai UPP PPSDM POM melakukan Survei Kepuasan Pelanggan yang dilaksanakan pada 1 April - 30 Juni 2024 (60 HK). Adapun target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PPSDM POM adalah sebesar 77,00 dan capaian IKM sebesar 87,90 (Baik).

2. Forum Konsultasi Publik

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun, menetapkan serta mereview standar pelayanan dengan melibatkan unsur masyarakat. PPSDM POM menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada 17 Mei 2024. Peserta yang mengikuti kegiatan FKP terdiri atas:

- a. Masyarakat pengguna layanan
 1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam
 2. Balai Pelatihan Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta
 3. UPTD Pelatihan Kesehatan Provinsi Jawa Barat
 4. Balai Besar Pelatihan Kesehatan Makassar
 5. YAJA
 6. IHATEC
 7. CKP CBT
 8. Catalyst
 9. ECK
 10. SMK PGRI 4 Jakarta
 11. Perwakilan PFM Inklusif

b. Ahli/Praktisi/Akademisi

1. Institut Teknologi Bandung
2. Institut Pertanian Bogor
3. Universitas Indonesia
4. Universitas Gadjah Mada
5. Universitas Pancasila
6. Universitas Terbuka
7. Universitas Telkom
8. Universitas Negeri Jakarta

c. Instansi Terkait

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Ombudsman Republik Indonesia
3. Pusat Pengembangan ASN Badan Kepegawaian Negara
4. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia
5. Badan Riset dan Inovasi Nasional
6. Pusat Bibliografi dan Pengolahan Bahan Perpustakaan, Perpustakaan Nasional
7. Perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

d. Organisasi Masyarakat

1. Ikatan Apoteker Indonesia
2. Pengawas Farmasi dan Makanan Indonesia
3. Himpunan Mahasiswa Indonesia

e. Media Massa

1. Republika
2. Berita satu
3. Radio Perspektif Baru



Gambar 71. Kegiatan Forum Konsultasi Publik

b. Tata Laksana

Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan berkomitmen untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi pada 7 (tujuh) area perubahan dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Tata Laksana pada tahun 2024 yaitu sebagai berikut:

- a. Review SOP Mikro
- b. Sosialisasi SOP Makro dan Mikro
- c. Pengisian Keterbukaan Informasi Publik/PPID
- d. Pengelolaan subsite PPSDM POM
- e. Manajemen Sumber Daya Manusia

Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup penataan sistem manajemen SDM. Adapun program/kegiatan prioritasnya adalah optimalisasi penilaian kinerja pegawai untuk mewujudkan pegawai PPSDM POM yang profesional dan berintegritas melalui pembangunan Zona integritas Penguatan Manajemen SDM. Tujuan dan Sasaran Utama (*Objectives*) Perubahan yang dicapai yaitu Mewujudkan Pegawai PPSDM POM yang Profesional dan Berintegritas melalui Pembangunan Zona Integritas Penguatan Manajemen SDM. Indikator kunci keberhasilan (*Key Result*) Perubahan tercapai.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Manajemen SDM antara lain memastikan perencanaan kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan Organisasi seperti melakukan Monitoring Kinerja Individu; Monitoring Laporan Pengendalian, Penjatuhan Hukuman Disiplin; dan monitoring hasil penilaian kinerja yang dijadikan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* untuk pegawai. Reward yang diberikan kepada pegawai dalam bentuk penghargaan *Employee Of the Quarter* yang diberikan setiap triwulan dan diberikan hak WFH (*work from home*) sebanyak 8 (delapan) kali dalam 1 bulan diluar kebijakan WFH di unit kerja PPSDM.



Gambar 72. Sertifikat penghargaan Employee Of the Quarter

3.14. AKIP PPSDM POM

Pelaksanaan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 berpedoman pada Keputusan Kepala Badan POM No. 311 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. PPSDM telah menyelenggarakan kegiatan sebagai upaya peningkatan nilai AKIP PPSDM Tahun 2024, meliputi:

- a. sosialisasi AKIP dan diskusi penyusunan Laporan Kinerja PPSDM POM bersama dengan narasumber dari BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).
- b. pembahasan hasil evaluasi AKIP Tahun 2023 bersama dengan Inspektorat dan Biro Perencanaan dan Keuangan BPOM.



Gambar 73. Pembahasan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023

Implementasi SAKIP dimulai dari tahap perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan capaian kinerja. Realisasi indikator Nilai AKIP PPSDM POM di tahun 2024 adalah sebesar 79,35. Jika dibandingkan dengan target tahun 2024, maka capaian indikator adalah sebesar

98,57% (sembilan delapan koma lima tujuh persen) dengan kriteria “Cukup”. Tabel 24. Perbandingan target Nilai AKIP PPSDM POM dengan realisasi tahun 2024.

Tabel 23. Hasil Penilaian AKIP PPSDM POM Tahun 2024

Indikator	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024 (%)
Nilai AKIP PPSDM POM	80,50	79,35	98,57

Tabel 24. Hasil penilaian SAKIP PPSDM POM Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai	
			2023	2024
1.	Perencanaan Kinerja	24	18,24	20,16
2.	Pengukuran Kinerja	24	18,00	18,96
3.	Pelaporan Kinerja	12	9,24	9,48
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	20	15,20	15,20
5.	Capaian Kinerja	20	17,04	15,55
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,72	79,35
Predikat			BB	BB

Berdasarkan hasil evaluasi APiP atas implementasi SAKIP PPSDM POM tahun 2024 tersebut, rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Menyusun kertas kerja indikator SMART-C sesuai Pedoman Penyusunan, Reviu, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- b. Menyusun matriks reviu target indikator yang disahkan dengan menyajikan:
 - Realisasi indikator tahun sebelumnya
 - Justifikasi target lebih rendah dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya.
- c. Memastikan keselarasan penyajian informasi target indikator kinerja pada dokumen SAKIP

2. Pengukuran Kinerja

- a. Menyusun manual IKU sesuai Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan BPOM.
- b. Menyempurnakan SOP Mikro Pengumpulan dan Pelaporan Data Capaian Kinerja PPSDM POM dengan mekanisme perubahan/kesalahan data kinerja.
- c. Memastikan keselarasan cara perhitungan indikator kinerja pada dokumen RHPK dan manual IKU
- d. Menyusun dokumen RHPK dilengkapi dengan angka pembilang dan penyebut perhitungan indikator.
- e. Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja
- f. Melakukan pengisian kendala dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) pada aplikasi SIMETRIS secara tertib dan memadai

3. Pelaporan Kinerja

- a. Menyusun laporan Kinerja tahunan dengan:
 - Membandingkan target dan realisasi indikator kinerja minimal 2 (dua) tahun sebelumnya secara berurutan
 - Menyajikan analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya per sasaran
- b. Menyusun Laporan Kinerja Interim dengan menyajikan:
 - Penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja.
 - Kondisi sebelum dan sesudah rencana aksi pada matriks monitoring tindak lanjut rekomendasi.
 - Rencana aksi periode sebelumnya yang selaras antara Laporan Kinerja Interim dan Laporan Evaluasi Internal.
 - Perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya.
- c. Memastikan keselarasan penyajian realisasi kinerja pada SIMETRIS, SKP Pimpinan, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Merencanakan pengembangan kompetensi personil Tim Reformasi Birokrasi 2024 (Kelompok Kerja Akuntabilitas) terkait implementasi SAKIP.
- b. Menyusun Laporan Evaluasi Internal sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan SAKIP BPOM yaitu menyajikan:
 - Analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, rencana tindak lanjutnya
 - Evaluasi atas Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) terkait target, capaian kinerja dan realisasi anggaran per bulan dalam triwulan bersangkutan
 - Lampiran kertas kerja berupa Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK)
 - Identifikasi kendala dan rencana tindak lanjut yang memadai

3.15. INDEKS PROFESIONALITAS PPSDM POM

Indeks Profesionalitas (IP) ASN adalah suatu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana kualitas dan profesionalisme ASN dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tujuan utama dari IP ASN adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki kinerja ASN, serta memastikan bahwa ASN memiliki kompetensi yang memadai dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Dasar pelaksanaan IP ASN mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menekankan pentingnya pembentukan ASN yang profesional, berintegritas, kompeten, dan berdaya saing.

Pengukuran IP ASN dilakukan secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap tahunnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah nilai hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yang didasarkan pada komponen kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin dari para ASN. Pada tahun 2024 terdapat perubahan perhitungan IP ASN pada komponen kualifikasi dan kompetensi, sehingga sangat berpengaruh pada perolehan Indeks Profesionalitas PPSDM POM. Berikut bobot penilaian untuk masing-masing komponen:

- **Kualifikasi pendidikan**

Pada tahun 2024 terdapat perubahan perhitungan bobot komponen Kualifikasi, yaitu:

a. Sebelum perubahan:

Sebelumnya bobot penilaian untuk masing masing pegawai tidak dibedakan berdasarkan jabatan dan syarat minimal tiap jabatan tersebut. Bobot penilaian sebelum berubah adalah S3 Sederajat = 25, S2/Profesi = 20, S1 = 15, D3 = 10, D1/D2/SMA/ sederajat = 5, dibawah SMA = 1

Tabel 25. Indeks Profesionalitas PPSDM POM

Pendidikan yang diperoleh	Bobot
S3	25
S2/Profesi	20
S1	15
D3	10
D1/D2/SMA/Sederajat	5
Dibawah SMA	1

b. Setelah perubahan:

Setelah adanya perubahan dikelompokkan berdasarkan jabatan yang diampunya serta berdasarkan persyaratan pendidikan minimal jabatan tersebut sebagaimana pada tabel di bawah:

Pada akhir tahun 2024 perolehan nilai komponen kualifikasi pendidikan adalah 21,44 (85,76% dari nilai maksimum 25), sedangkan pada akhir tahun 2023 adalah 21,10 (84,4%). Terdapat kenaikan sedikit yaitu 0,34 poin, hal ini dikarenakan terdapat 2 pegawai PPSDM POM yang telah selesai melaksanakan tugas belajar S2, dengan demikian secara tidak langsung menaikkan nilai perolehan nilai komponen Kualifikasi secara keseluruhan di PPSDM POM.

Informasi Nilai Kualifikasi

JENJANG JABATAN	PENDIDIKAN MINIMAL	PENDIDIKAN YANG DIPEROLEH PNS (BOBOT)					
		S3	S2	S1/DIV	DIII	DII/DI/SLTA/SEDERAJAT	DIBAWAH SLTA
Jabatan Pimpinan Tinggi	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
Jabatan Administrator	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
Jabatan Pengawas	DIII	25	23	21	20	15	10
Jabatan Pelaksana	DII/DI/SLTA/SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
Jabatan Fungsional (Keterampilan)	DII/DI/SLTA/SEDERAJAT	25	23	22	21	20	15
	DIII	25	23	21	20	15	10
Jabatan Fungsional (Keahlian)	S1/DIV	25	23	20	15	10	5
	S2	25	20	15	10	5	1

Gambar 74. Bobot Penilaian Pendidikan IP ASN

- **Kompetensi**

Pada tahun 2024 terdapat perubahan perhitungan bobot komponen Kompetensi, yaitu:

a. Sebelum perubahan:

Sebelumnya bobot penilaian untuk komponen kompetensi dibagi menjadi 4 (empat) jenis dengan bobot berbeda untuk setiap klasifikasi jabatan yaitu Diklat Struktural, Diklat Jabatan Fungsional, Diklat Teknis, dan Seminar, namun dengan nilai maksimal yang sama di nilai 40. Bobot untuk setiap jenis sebagai berikut:

1. Diklat Struktural (hanya dihitung untuk pegawai yang menduduki jabatan struktural), memiliki nilai 15 bagi pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan 0 bagi yang belum mengikuti pelatihan.
2. Diklat Fungsional (hanya dihitung untuk pegawai yang menduduki jabatan Fungsional), memiliki nilai 15 bagi pegawai yang telah mengikuti pelatihan dan 0 bagi yang belum mengikuti pelatihan.

3. Diklat Teknis, memiliki bobot nilai yang berbeda antara Jabatan Struktural / Jabatan Fungsional dengan Pelaksana. Untuk Jabatan Struktural / Jabatan Fungsional memiliki nilai 15 bagi pegawai yang telah mengikuti lebih dari / sama dengan 20 JP pelatihan teknis atau bimbingan teknis, sedangkan apabila kurang dari 20 JP memiliki nilai dengan perhitungan rumus $(\text{Total JP} / 20) \times 15$. Untuk Pelaksana memiliki nilai 22,5 bagi pegawai yang telah mengikuti lebih dari / sama dengan 20 JP pelatihan teknis atau bimbingan teknis, sedangkan apabila kurang dari 20 JP memiliki nilai dengan perhitungan rumus $(\text{Total JP} / 20) \times 22,5$.
4. Seminar, memiliki bobot nilai yang berbeda antara Jabatan Struktural / Jabatan Fungsional dengan Pelaksana. Untuk Jabatan Struktural / Jabatan Fungsional memiliki nilai 10 bagi pegawai yang telah mengikuti Seminar atau Sosialisasi, sedangkan apabila yang belum mengikuti Seminar atau Sosialisasi mendapat nilai 0. Untuk Pelaksana memiliki nilai 17,5 bagi pegawai yang telah mengikuti Seminar atau Sosialisasi, sedangkan apabila yang belum mengikuti Seminar atau Sosialisasi mendapat nilai 0.

Tabel 26. Perhitungan Kompetensi Sebelum Perubahan

	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Pelaksana
Diklat Struktural	15	-	-
Diklat Fungsional	-	15	-
Diklat Teknis	15	15	22,5
Seminar	10	10	17,5
TOTAL	40	40	40

b. Setelah perubahan:

Setelah Perubahan nilai maksimal komponen kompetensi tetap 40 dengan masing-masing untuk jabatan struktural, jabatan fungsional, dan fungsional sebagai berikut:

1. Jabatan Struktural, nilai maksimal tiap aspek adalah Diklat Struktural = 10, Penilaian Kinerja = 25, dan Pengembangan Kompetensi = 5.
2. Jabatan Fungsional, nilai maksimal tiap aspek adalah Diklat Fungsional = 10, Penilaian Kinerja = 25, dan Pengembangan Kompetensi = 5.

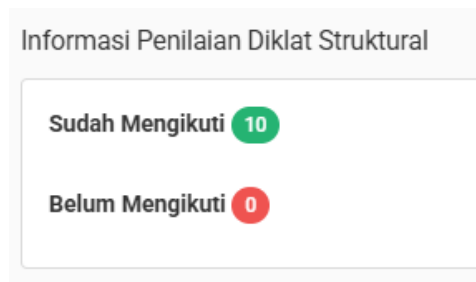
3. Pelaksana, nilai maksimal tiap aspek adalah Penilaian Kinerja = 25, Diklat Teknis = 10, dan Pengembangan Kompetensi = 5.

Tabel 27. Perhitungan Kompetensi Setelah Perubahan

	Jabatan Struktural	Jabatan Fungsional	Pelaksana
Diklat Struktural	10	-	-
Diklat Fungsional	-	10	-
Penilaian Kinerja	25	25	25
Diklat Teknis	-	-	10
Pengembangan Kompetensi	5	5	5
TOTAL	40	40	40

Rincian perolehan setiap aspek sebagaimana berikut:

Diklat Struktural



Gambar 75. Bobot Penilaian Diklat Struktural

Diklat Fungsional

i Informasi!
Nilai Ini Hanya Untuk Jabatan Fungsional.

Sudah Mengikuti **10**

Belum Mengikuti **0**

Gambar 76. Bobot Penilaian Diklat Fungsional

Penilaian Kinerja

PREDIKAT KINERJA	PEROLEHAN
Sangat Baik	25
Baik	20
Butuh Perbaikan	15
Kurang/Misconduct	10
Sangat Kurang	5

Gambar 77. Bobot Penilaian Kinerja

Pengembangan Kompetensi

>= 20 Jam Pelajaran Nilai = 5

< 20 Jam Pelajaran Nilai = Proporsional (Total JP / 20 * 5)

Gambar 78. Bobot Penilaian Pengembangan Kompetensi

Diklat Teknis (untuk Pelaksana)

Nilai Diklat Teknis

10

Gambar 79. Bobot Penilaian Diklat Teknis (untuk pelaksana)

Terdapat Diklat Teknis = 10 dan tidak terdapat Diklat Teknis = 0

Pada tahun 2024 terdapat penambahan aspek Penilaian Kinerja dalam komponen kompetensi, tiap jabatan memiliki perhitungan masing-masing, serta nilai maksimal yang tahun sebelumnya 40 tahun 2024 menjadi 35. Hal tersebut sangat berpengaruh pada Indeks Profesionalitas PPSDM POOM 2024. Perolehan nilai tahun 2023 adalah 38,75 dari nilai maksimum 40 (96,875%), sedangkan pada tahun 2024 adalah 33,75 dari maksimal nilai 35 (84,375%). Apabila dilihat dari persentase pemenuhan terdapat penurunan yang cukup jauh, ini dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. Pada tahun 2024 terdapat redistribusi Kepala Subbagian Tata Usaha yang baru dimana yang bersangkutan belum melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (Diklat Struktural untuk Eselon IV), sehingga pada tahun 2024 dari 2 (dua) orang struktural terdapat 1 (satu) struktural yang belum memenuhi nilai struktural). Berbeda dengan 2023 dimana pejabat sebelumnya baik Eselon IV maupun Eselon II yang menjabat sudah melaksanakan Diklat Struktural.
2. Pada tahun 2024 terdapat 5 (lima) orang pegawai yang belum memenuhi nilai Diklat Fungsional, dimana 2 (dua) orang diantaranya merupakan pegawai yang baru redistribusi ke PPSDM POM pada pertengahan tahun 2024. Kelima pegawai yang belum memenuhi nilai komponen kompetensi Diklat Fungsional terdiri dari 1 (satu) orang jabatan Pustakawan Ahli Pertama, 1 (satu) orang jabatan Pustakawan Mahir, 1 (satu) orang Widyaiswara Ahli Pertama, 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Pertama, dan 1 (satu) orang PPPK jabatan Arsiparis Terampil. Hal ini berbeda dengan tahun 2023 dimana yang terdata yang belum melaksanakan Diklat Fungsional hanya 2 (dua) orang yaitu 1 (satu) orang Widyaiswara Ahli Pertama dan 1 (satu) orang Analis Kebijakan Ahli Pertama. Dengan demikian perlu adanya koordinasi dengan masing-masing Instansi Pembina jabatan yang bersangkutan, yang perlu dipastikan adalah apakah jabatan

pustakawan wajib mengikuti Diklat Fungsional/ Pembekalan atau dapat menggunakan Ijazah yang relevan dengan jabatannya, untuk Analis kebijakan memastikan kapan adanya Diklat Fungsional karena sudah beberapa tahun kuotanya hanya sedikit sehingga sulit untuk mendapatkan kesempatan Diklat Fungsional, untuk PPPK Arsiparis perlu koordinasi antara Badan POM dengan Instansi pembina untuk menyelenggarakan Pembekalan Jabatan Fungsional dan itu baru memungkinkan dilaksanakan di tahun 2025, sedangkan untuk 1 orang jabatan Widyaiswara Ahli Pertama yang bersangkutan belum tercatat sebagai S2 dimana syarat Widyaiswara minimal S2 sehingga belum dapat mengikuti Diklat Fungsional akan tetapi ybs sedang berproses pemutihan pencantuman gelar S2 sehingga diharapkan pada tahun berikutnya dapat melaksanakan Diklat Fungsional.

3. Penilaian Kinerja di PPSDM POM seluruhnya sesuai Ekspektasi yang dalam artian dalam kategori Baik dan memiliki nilai 20. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan Pegawai di PPSDM POM tidak ada yang memperoleh nilai diatas Ekspektasi, sehingga tidak ada yang mendapatkan nilai maksimal di 25 poin.

- **Kinerja**

Bobot penilaian untuk masing-masing pegawai adalah predikat kinerja Sangat Baik = 30, Baik = 25, Butuh Perbaikan = 20, Kurang = 15, dan Sangat Kurang = 10. Bobot penilain kinerja dalam Komponen kinerja ini berbeda besaran nilainya dengan aspek kinerja dalam Komponen Kompetensi.

Dimensi Kinerja	
PREDIKAT KINERJA	PEROLEHAN
Sangat Baik	30
Baik	25
Butuh Perbaikan	20
Kurang/Misconduct	15
Sangat Kurang	10

Gambar 80. Bobot Penilaian Kinerja

Pada akhir tahun 2024 perolehan nilai komponen kualifikasi adalah 25 (83.33% dari nilai maksimum 30), hal ini sama dengan perolehan pada tahun 2023. Penilaian Kinerja di PPSDM POM seluruhnya sesuai Ekspektasi yang dalam artian dalam kategori Baik dan memiliki nilai 25. Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan Pegawai di PPSDM POM tidak ada yang memperoleh nilai diatas Ekspektasi, sehingga tidak ada yang mendapatkan nilai maksimal.

- **Disiplin**

Pada tahun 2024, hasil pengukuran Indeks Profesionalitas ASN PPSDM POM tercapai 85,19 dari target 88,64. Dengan demikian indikator ini sudah tercapai 96,10% dari target yang ditetapkan di tahun 2024.

Rekapitulasi IP ASN Tahun 2024 Unit Kerja Pusat

UNIT KERJA	CAPAIAN IP ASN 2024	TARGET IP ASN 2024
Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	85,19	88,64

Gambar 81. IP ASN PPSDM POM Tahun 2024

Hasil pengukuran indeks ini dapat memberikan manfaat dari berbagai sudut pandang. Bagi pemerintah, dapat digunakan sebagai rumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi yang dapat dilihat dari capaian kerjanya. Bagi ASN sendiri, dapat digunakan sebagai pengembangan diri dalam rangka peningkatan derajat profesionalitas sebagai ASN.

Dalam upaya pencapaian target IP ASN PPSDM POM yang telah ditetapkan, kegiatan yang telah dilakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kualitas pendidikan ASN yang ada di PPSDM POM serta mendukung adanya peningkatan kapasitas berbasis kompetensi yang dilakukan melalui Tugas Belajar, karena semakin tinggi riwayat jenjang pendidikan terakhir ASN maka semakin tinggi bobot nilai yang akan diperoleh. Melalui Tugas Belajar, diharapkan ASN dapat meningkatkan keahlian/kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya yang akan berdampak pada peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional sehingga diharapkan mampu meningkatkan nilai IP ASN. Pada

tahun 2024 terdapat 3 orang pegawai yang telah selesai melaksanakan Tugas Belajar jenjang S2, 2 (dua) orang pegawai sedang melaksanakan Tugas Belajar jenjang S2 tanpa lepas Jabatan, 3 (tiga) orang pegawai sedang melaksanakan Tugas Belajar jenjang S2 dengan lepas Jabatan, dan 3 (tiga) orang pegawai PPSDM POM yang sedang mengikuti Tugas Belajar tanpa lepas jabatan jenjang S1.

2. Meningkatkan kompetensi SDM di PPSDM POM melalui Diklat, baik Diklat Fungsional, Diklat Teknis, maupun pengembangan kompetensi lainnya. PPSDM POM terus melakukan monitoring terkait minimal capaian 20 Jam Pelajaran (JP) dari setiap ASN pada Diklat Teknis Seminar/Sosialisasi serta mengidentifikasi pegawai Fungsional tertentu yang sudah dan belum mengikuti Diklat Fungsional.
3. Menyusun dan mengevaluasi kinerja pegawai secara berkala serta melakukan monitoring SKP tahun sebelumnya (2023), dimana perlu dipastikan bahwa SKP Tahun 2023 telah selesai dinilai pada triwulan pertama tahun 2024. Bobot nilai dari dimensi kinerja untuk perhitungan Indeks Profesionalitas Tahun 2024 menggunakan nilai SKP Tahun 2023.
4. Melakukan monitoring disiplin pegawai secara berkala baik bulanan maupun triwulanan. Setiap bulan selalu dilakukan perhitungan kedisiplinan pegawai atas kehadiran jam kerja serta monitoring pelanggaran disiplin atau kode etik yang dilakukan setiap triwulan.

3.16. PENGELOLAAN BMN DAN PERSEDIAAN PPSDM POM

Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMN diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Pengelolaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan. Adapun pengelolaan yang dilakukan oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan adalah kegiatan merumuskan kebutuhan BMN secara berjenjang, mulai dari satuan kerja sampai pengguna barang. Perencanaan BMN dilakukan secara serentak melalui kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN). RKBMN dilaksanakan untuk pengadaan H+2 tahun. Pada tahun 2024 RKBMN dilaksanakan pada bulan Oktober 2024. Adapun BMN yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan adalah sebagai berikut:

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
KUASA PENGGUNA BARANG
PENGADAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : 063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UNIT ESELON 1 : 01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UNIT WILAYAH : 0199	BPOM
UNIT SATUAN KERJA : 063010199672828000KP	PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
PROGRAM : 06301WA	Program Dukungan Manajemen
KEGIATAN : 4113	Pengembangan SDM Aparatur Badan POM
OUTPUT : 6384	Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM
OUTPUT : EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal
OUTPUT : EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal
JENIS BARANG : 522141	Belanja Sewa
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin

NO	PERKIRAAN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		USULAN BMN	SBSK	OPTIMALISASI EKSISTING BMN	KEBUTUHAN RIIL BMN (Maks.)	Keterangan
	Kode	Uraian Barang					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A	132111	Peralatan dan Mesin					
1	3020101005	SUV Listrik	1	1	0	1	Sewa - Kendaraan Dinas Jabatan - Kendaraan Dinas Jabatan
2	3020104006	Sepeda Motor Listrik	1	3	1	2	Pembelian - Kendaraan Dinas Operasional - Sepeda motor listrik untuk kendaraan operasional
		JUMLAH	2	4	1	3	

Oct 25, 2024 9:32 AM

KOTA ADM. JAKARTA PUSAT,
Peranggung Jawab UAQPB
Kepala PPSDM POM

Syamsidar Thamrin, ST, MBA.
197008092000032004

Gambar 82. Rencana kebutuhan BMN - Pengadaan

RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
KUASA PENGGUNA BARANG
PEMELIHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2026

KEMENTERIAN/LEMBAGA : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UNIT ESELON I : BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
UNIT WILAYAH : BPOM
UNIT SATUAN KERJA : PUSAT PENGEMBANGAN SDM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
JENIS BELANJA : 5231/Belanja Biaya Pemeliharaan

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KONDISI		KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KET
				Baik	RR	UNIT	M2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Digunakan Sendiri	2	0	2	-	
2	3020104001	Sepeda Motor	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
3	3050105048	LCD Projector/Infocus	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
4	3050105053	Acces Control System	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
5	3050204001	Lemari Es	Digunakan Sendiri	2	0	2	-	
6	3050205006	Oven Listrik	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
7	3050206002	Televisi	Digunakan Sendiri	2	0	2	-	
8	3050206046	Handy Cam	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
9	3060102128	Camera Digital	Digunakan Sendiri	7	0	7	-	
10	3060102135	LCD Monitor	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
11	3060102167	Drone	Digunakan Sendiri	1	0	1	-	
12	3060201004	Telephone Mobile	Digunakan Sendiri	2	0	2	-	
13	3060201006	Handy Talkey (HT)	Digunakan Sendiri	3	0	3	-	
14	3100101007	PC Workstation	Digunakan Sendiri	2	0	2	-	
15	3100102001	P.C Unit	Digunakan Sendiri	34	0	34	-	
16	3100102002	Lap Top	Digunakan Sendiri	119	0	119	-	
17	3100102003	Note Book	Digunakan Sendiri	2	0	2	-	

Oct 25, 2024 11:08 AM

NO	KODE BARANG	URAIAN BARANG	STATUS BARANG	KONDISI		KEBUTUHAN PEMELIHARAAN		KET
				Baik	RR	UNIT	M2	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	3100102009	Tablet PC	Digunakan Sendiri	2	0	2	-	
19	3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	44	0	44	-	
20	3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Digunakan Sendiri	4	0	4	-	
JUMLAH				232	0	232	0	

KOTA ADM. JAKARTA PUSAT,
Penanggung Jawab UAKPB
Kepala PPSDM POM

Syamsidar Thamrin, ST, MBA.
197008092000032004

Gambar 83. Rencana kebutuhan BMN - Pemeliharaan

b. Pengadaan

Pada tahun 2024 PPSDM melakukan pembelian BMN berupa:

Tabel 28. Pengadaan BMN 2024 berupa Mesin dan Peralatan Khusus TIK

Barang	Qty
Tablet PC	2 unit

Tabel 29. Pengadaan BMN 2024 berupa Mesin dan Peralatan Non TIK

Barang	Qty
Microphone	1 unit
Lensa Kamera	4 unit
Sofa	1 unit
Rak Sepatu (Aluminium)	1 unit
Dispenser	2 unit
Lighting Stand Tripod	5 unit
Televisi	1 unit
White Board	1 unit
Kursi Besi/Metal	40 unit
Thermos Air	4 unit
Locker	9 unit
Kursi Besi/Metal	41 unit
Tripod Camera	3 unit
Camera Digital	2 unit
Camera Conference	1 unit

Barang	Qty
Loudspeaker	1 unit
Mesin Ketik Listrik	1 unit
Tripod Camera	1 unit
Printer (Peralatan Personal Komputer)	7 unit
Focusing Screen/Layar LCD Projector	2 unit
Kursi Besi/Metal	16 unit
Meja Kerja Kayu	20 unit
Partisi	1 unit
Backdrop TV/Wardrobe	4 unit
Display	1 unit
Lemari Kayu	2 unit
Tripod Camera	3 unit
Camera Digital	2 unit
Camera Conference	1 unit

c. Penatausahaan

Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Penatausahaan BMN pada Unit Kerja PPSDM POM dilakukan setiap semester. Pada awal tahun 2024 yaitu bulan Januari dilakukan penyusunan Laporan BMN Tahunan Tahun 2023, dan pada bulan Juli dilakukan penyusunan Laporan BMN Semester 1 Tahun 2024

Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahun Anggaran 2023 (Unaudited)



**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Laporan Barang Kuasa Pengguna Semester I Tahun 2024



**PUSAT PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan sebagai Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara yang dipiutangkannya. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan adalah salah satu entitas yang berkewajiban menyelesaikan akuntansi pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Barang Milik Negara disertai Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara tingkat Kuasa Pengguna Barang Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 55/PPB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 17 Januari 2024
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan,

Syamsidar Thamrin, ST, MBA.



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan sebagai Kuasa Pengguna Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Milik Negara yang dipiutangkannya. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan adalah salah satu entitas yang berkewajiban menyelesaikan akuntansi pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran dengan menyusun Laporan Barang Milik Negara disertai Catatan atas Laporan Barang Milik Negara.

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara tingkat Kuasa Pengguna Barang Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 55/PPB/2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 8 Juli 2024
Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pengawasan Obat dan Makanan,

Syamsidar Thamrin, ST, MBA.

Gambar 84. Laporan BMN

d. Penggunaan

Penggunaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMN sesuai dengan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam penggunaan BMN, BMN yang diperoleh baik dari APBN atau dari perolehan yang sah lainnya wajib di tetapkan status penggunaannya. Permohonan Penetapan Status Penggunaan BMN (PSP BMN) diajukan maksimal 6 bulan sejak perolehan BMN. Pada tahun 2024 PPSDM mengajukan permohonan PSP BMN sebanyak 4 kali.

e. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/D yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pada tahun 2024, tidak ada BMN PPSDM POM yang dimanfaatkan oleh Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah lain.

f. Pengamanan

Pengamanan BMN adalah upaya untuk melindungi BMN dari potensi masalah hukum, penyerobotan dan pengambilalihan. Pengamanan BMN dapat dilakukan secara fisik, administratif dan hukum. Pengamanan BMN pada Unit Kerja PPSDM POM dilakukan dengan cara menempatkan BMN pada ruangan yang aman dan terkunci sehingga hanya bisa diakses oleh petugas yang berwenang. Pelaporan Pengawasan BMN dilakukan 2 kali dalam satu tahun, yaitu Semester 1 dan Semester 2/Tahunan.

g. Pemeliharaan

Pemeliharaan BMN adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga agar BMN selalu dalam kondisi baik dan siap digunakan. Pemeliharaan BMN dilakukan tanpa mengubah bentuk atau konstruksi asal. Pemeliharaan BMN pada Unit Kerja PPSDM POM dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Melakukan service berkala untuk kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua
2. Melakukan pengecekan berkala pada alat pengolah data

Pada tahun 2024 telah dilakukan Sosialisasi Pengelolaan BMN yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2024 secara hybrid yang dihadiri oleh Unit Kerja Pusat dan menghadirkan Narasumber yaitu Tri Indarsih, S.Kom, Krisda Yulia Padma, A.Md, Rully Putra Surya Pratama, SE dari Biro Umum. Sosialisasi ini bertujuan untuk:

1. Memberikan pemahaman tentang cara pelaksanaan pengelolaan BMN sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Memberikan gambaran dan arah yang jelas dalam pelaksanaan pengelolaan BMN serta mewujudkan tertib administrasi pengelolaan BMN dengan baik dan benar
3. Meningkatkan meningkatkan kemampuan dari pejabat/staf pengelola BMN dalam upaya mencapai tingkat akuntabilitas kinerja pengelolaan BMN yang terus meningkat
4. Menghasilkan pengelolaan BMN di lingkungan PPSDM POM yang handal serta akuntabel.



Gambar 85. Sosialisasi Pengelolaan BMN

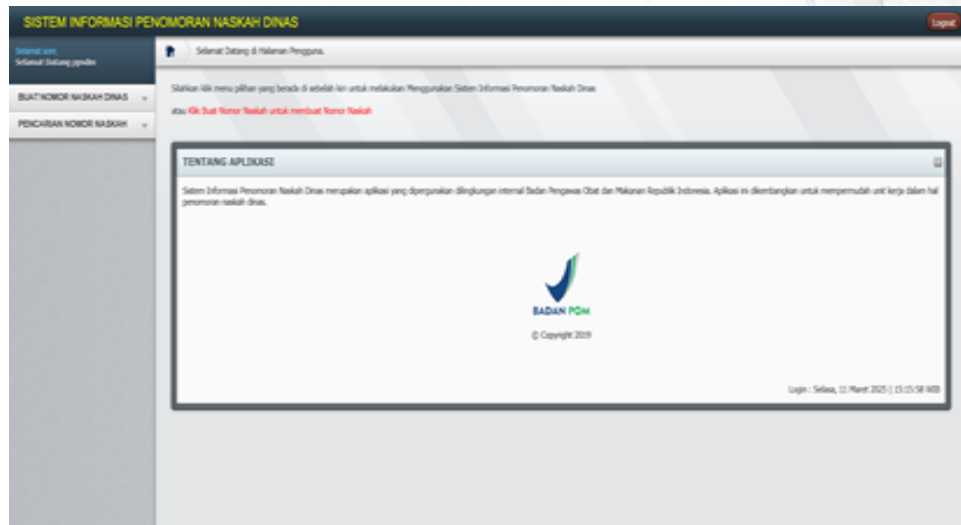
3.17. PENGELOLAAN KEARSIPAN PPSDM POM

Kearsipan merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan administrasi, arsip tidak hanya sekedar dokumen yang disimpan, tetapi merupakan sumber informasi yang sangat bernilai, arsip yang terkelola dengan baik menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan yang efektif dan efisien serta mendukung terwujudnya organisasi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) yang efektif. Data historis dan dokumentasi yang tersimpan dengan rapi akan sangat membantu dalam merumuskan kebijakan dan keputusan yang tepat berdasarkan pengalaman dan informasi masa lalu. Sesuai Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

merupakan dasar hukum yang mengatur tentang pengelolaan arsip di Indonesia, baik arsip negara, arsip daerah, maupun arsip milik lembaga atau instansi lainnya. Undang-Undang ini bertujuan untuk mengatur cara pengelolaan arsip secara tertib, terstruktur, dan terjaga, sehingga arsip dapat dimanfaatkan dengan baik dan aman. PPSDM POM sebagai Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang memiliki banyak arsip berkewajiban untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam UU No. 43 Tahun 2009 tersebut. Badan POM telah menyusun kebijakan internal yang mengacu pada ketentuan dalam UU No. 43 Tahun 2009 mengenai kearsipan.

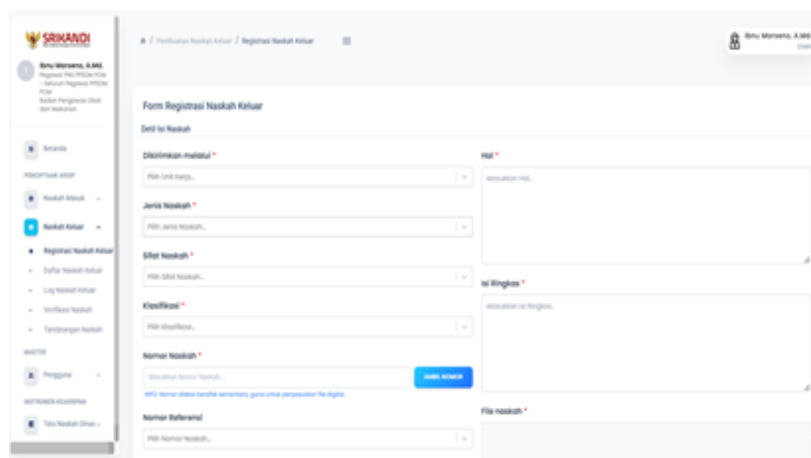
Salah satu poin yang diterapkan adalah pembentukan sistem pengelolaan arsip yang mengatur tata cara penyimpanan, pemeliharaan, pemusnahan, dan pemanfaatan arsip. Sebagai dasar kebijakan internal di Lingkungan Badan POM ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) Merupakan satuan kerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan di lingkungannya dan mengimplementasikan Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam rangka implementasi Kebijakan Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM POM) melaksanakan kegiatan kegiatan pada tahun 2024:

- a. Telah menerapkan Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA) Sistem Informasi Penomoran Naskah Dinas (SiPANDA) adalah sistem yang digunakan untuk mengelola dan mempermudah proses penomoran, pengarsipan, dan pelacakan naskah dinas yang diterbitkan. Di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), penerapan SiPANDA bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan surat-menyurat serta dokumentasi administrasi. Ini sejalan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Grand Design Pengelolaan Arsip Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Tahun 2022-2024.



Gambar 86. Aplikasi Sipanda Sistem Penomoran Naskah Dinas

- b. Telah menerapkan SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Digital) adalah sistem yang diterapkan di beberapa instansi pemerintah Indonesia, termasuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), untuk mendukung pengelolaan arsip secara digital dan terintegrasi. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan arsip, meminimalkan penggunaan arsip fisik, serta mempercepat pencarian dan pengambilan data. Adanya kebijakan tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 yang telah ditetapkan juga ketentuan pelaksanaan peraturan presiden dimaksud yaitu Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis bahwa menjadi kewajiban bagi setiap



Gambar 87. Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Digital)

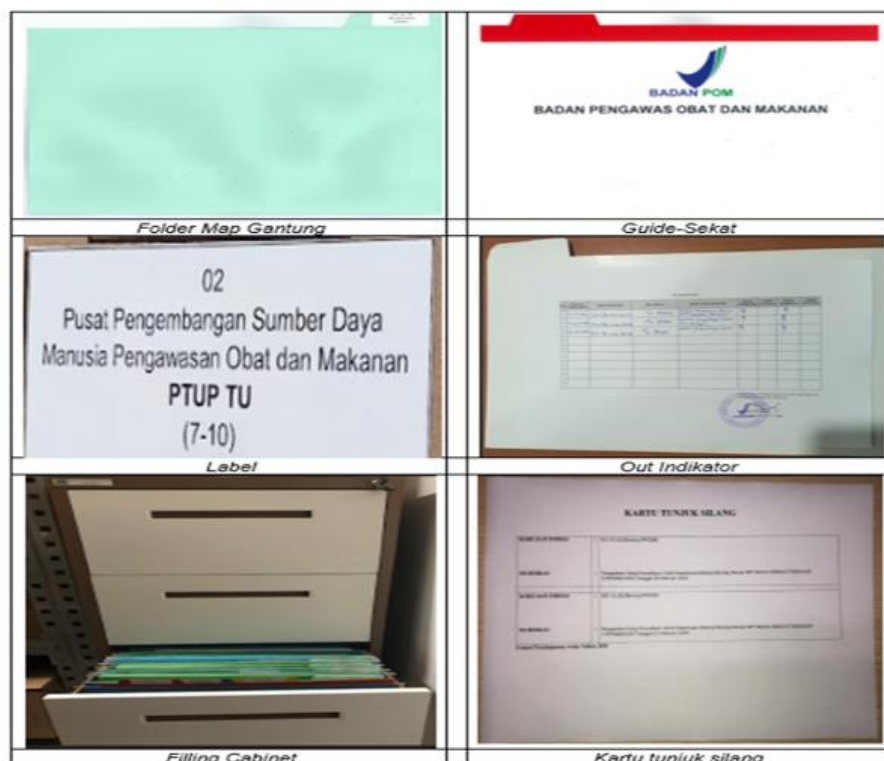
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk mengimplementasikannya melalui aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI).

- c. Target nilai pengawasan kearsipan internal tahun 2024 adalah 97,50 dengan hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2024 adalah 99,10 kategori AA sangat memuaskan. Peringkat 5 (lima) dari 30 Unit kerja Pusat.

No	Nama Unit Kerja	Nilai Pengawasan 2024	Keterangan
1	Inspektorat II	100	AA (Sangat Memuaskan)
2	Biro Sumber Daya Manusia	99,32	AA (Sangat Memuaskan)
3	Direktorat Cegah Tangkal	99,23	AA (Sangat Memuaskan)
4	Biro Umum	99,15	AA (Sangat Memuaskan)
5	Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan	99,10	AA (Sangat Memuaskan)

Gambar 88. Nilai hasil pengawasan kearsipan internal tahun 2024

- d. Sarana dan prasarana pengolahan Arsip di PPSDM POM di pusatkan di Ruang Arsip yang telah dilengkapi Rak Arsip, Folder, Guide/Sekat, Label, Out Indikator, Indeks tunjuk silang, dan *Filing Cabinet*.



Gambar 89. Sarana dan prasarana pengolahan Arsip di PPSDM POM

- e. Pelayanan kearsipan di PPSDM POM mencakup beberapa jenis layanan yang bisa diakses oleh pegawai internal PPSDM POM, peminjaman dan pengembalian arsip bisa dilakukan dengan scan barcode untuk meningkatkan pelayanan peminjaman arsip di internal PPSDM POM.



Gambar 90. Peminjaman dan pengembalian arsip dengan Scan Barcode

- f. Terciptanya Daftar Arsip Substantif 2024 dan Daftar Arsip Aktif 2023 di PPSDM POM, arsip yang masih sering digunakan dan diperlukan untuk kegiatan operasional sehari-hari ataupun keperluan Audit. Dengan membuat daftar arsip aktif, dapat dengan mudah mengakses dokumen-dokumen tersebut tanpa harus mencari di seluruh sistem arsip. Ini meningkatkan efisiensi waktu dan mengurangi beban kerja pegawai yang harus mencari dokumen penting serta sebagai implementasi Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.25.07.21.300 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Pengelolaan Kearsipan Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.



DAFTAR AR SIP AKTIF 2024														
NO. BERKAS	KODE KLASIFIKASI	URAIAN BERKAS	KURUN WAKTU	JUMLAH	NOMOR ITEM	URAIAN ISI INFORMASI AR SIP	TANGGAL	JUMLAH	TINGKAT PERKEMBANGAN	LOKASI	JENIS AR SIP			KETERANGAN
											BIASA	TERBATAS	RAHASIA	
Pencipta Arsip : PPSDM POM Unit Kerja/Unit Pengolah : TU PPSDM POM Nama Pimpinan Unit Kerja/Unit Pengolah : Syamsidar Thamin, ST, MBA Alamat Unit Kerja/Unit Pengolah : Gedung Batik Lt. 5, Jl. Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat Jenis Arsip : Arsip Substantif 2024														
DAFTAR BERKAS						DAFTAR ISI BERKAS								
1	KP.02.01	Pendaftaran Peminatan Tenaga Non ASN/PNPN Untuk Pengadaan CASN Tahun 2024	2024	1	1	Pendaftaran Peminatan Tenaga Non ASN/PNPN Untuk Pengadaan CASN Tahun 2024	16 Januari 2024	2 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			
2	KP.03.01	Seleksi Kompetensi Teknis PPPK	2024	2 item	1	Penyempulan Surat Pernyataan Komitmen Penyusunan Naskah Soal Seleksi Kompetensi Teknis PPPK dan/atau Seleksi Kompetensi Bidang CPNS Tahun 2024	12 Januari 2024	2 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			
					2	Pernyataan Surat Pernyataan Komitmen Penyusunan naskah soal seleksi kompetensi teknis PPPK dan/atau seleksi kompetensi di bidang CPNS tahun 2024	22 Januari 2024	1 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			
	KP.03.02	Usulan Pengangkatan	2024	1 item	1	Usulan Pengangkatan melalui Perpindahan Jabatan a.n Nur Hasanah Adhni, S.Si, Apt.	22 Januari 2024	1 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			
3	KP.04.03	Hasil Uji Kompetensi	2024	3 item	1	Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farnasi dan Makanan Batch 4 Tahun 2023	2 Januari 2024	6 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			
					2	Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farnasi dan Makanan Batch 4 Tahun 2023	16 Januari 2024	38 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			
					3	Pengumuman Hasil Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farnasi dan Makanan Khusus Januari 2024	22 Januari 2024	3 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			
	KP.04.03	Usulan Uji Kompetensi	2024	7 item	1	Usulan Uji Kompetensi PFM Tahun 2024	5 Januari 2024	4 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			
					2	Usulan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farnasi dan Makanan Batas POM di Jember Tahun 2024	15 Januari 2024	4 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			
					3	Usulan Uji Kompetensi Ulang Tahun 2024	16 Januari 2024	3 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			
					4	Usulan Uji Kompetensi Ulang Tahun 2024	17 Januari 2024	3 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			
					5	Usulan Uji Kompetensi Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Farnasi dan Makanan	17 Januari 2024	5 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			
					6	Pendaftaran Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Perencana Tahun 2024	17 Januari 2024	2 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			
					7	Usulan Uji Kompetensi Tahun 2024	18 Januari 2024	2 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			
	KP.04.03	Pemohonan Fasilitas Pelaksanaan Uji Kompetensi	2024	3 item	1	Pemohonan Fasilitas Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Farnasi dan Makanan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain	29 Januari 2024	4 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			
					2	Pemohonan Fasilitas Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PFM Ahli Madya a.n Sulianto, SH	29 Januari 2024	4 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			
					3	Pemohonan Fasilitas Pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional PFM Ahli Madya a.n Sulianto, SH	23 April 2024	6 Halaman	ASLI ELEKTRONIK		V			

Gambar 92. Daftar Arsip Substantif 2024

DAF

Pencipta Arsip : PPSDM POM
 Unit Kerja/Unit Pengolah : TU PPSDM POM
 Nama Pimpinan Unit Kerja/Unit Pengolah : Syamsidar Thamin, ST, MBA
 Jabatan Pimpinan Unit Kerja/Unit Pengolah : Kepala PPSDM POM
 Alamat Unit Kerja/Unit Pengolah : Gedung Batik Lt. 5, Jl. Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat

NO. BERKAS	KODE KLASIFIKASI	URAIAN BERKAS	KURUN WAKTU	JUMLAH	NOMOR ITEM	URAIAN ISI INFORMASI AR SIP	TANGGAL	JUMLAH	TINGKAT PERKEMBANGAN	LOKASI	JENIS AR SIP			KETERANGAN
											BIASA	TERBATAS	RAHASIA	
TUBEL BIAYA HDUP 2023														
1	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN MEMBAYAR NO. 00118A/SEJALMAH/RF/9.000.000	2023	4	1	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N MARWAH, S.FARMAPTI BERKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.02.23.03 TAHUN 2023 TANGGAL 10 FEBRUARI 2023 SEJALMAH RP. 9.000.000	7 March 2023	3 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		
	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN MEMBAYARAN NO. 00118B/SEJALMAH/RF/9.000.000			2	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N MARWAH, S.FARMAPTI BERKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.02.23.03 TAHUN 2023 TANGGAL 10 FEBRUARI 2023 SEJALMAH RP. 9.000.000	3 March 2023	6 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		
	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NO. 00118C			3	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N MARWAH, S.FARMAPTI BERKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.02.23.03 TAHUN 2023 TANGGAL 10 FEBRUARI 2023 SEJALMAH RP. 9.000.000	2023	2 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		
	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NO. 00118D			4	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N MARWAH, S.FARMAPTI BERKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.02.23.03 TAHUN 2023 TANGGAL 10 FEBRUARI 2023 SEJALMAH RP. 9.000.000	2023	1 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		
2	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN MEMBAYAR NO. 00133A/SEJALMAH/RF/3.750.000		4	1	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N MARWAH, S.FARMAPTI BERKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.02.23.03 TAHUN 2023 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2023 SEJALMAH RP. 3.750.000	7 March 2023	3 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		
	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN MEMBAYAR NO. 00133B/SEJALMAH/RF/3.750.000			2	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N MARWAH, S.FARMAPTI BERKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.02.23.03 TAHUN 2023 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2023 SEJALMAH RP. 3.750.000	3 March 2023	3 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		
	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NO. 00133C			3	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N MARWAH, S.FARMAPTI BERKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.02.23.03 TAHUN 2023 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2023 SEJALMAH RP. 3.750.000	2023	2 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		
	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NO. 00133D			4	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N MARWAH, S.FARMAPTI BERKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.02.23.03 TAHUN 2023 TANGGAL 9 SEPTEMBER 2023 SEJALMAH RP. 3.750.000	1 February 2023	1 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		
3	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN MEMBAYAR NO. 00148A/SEJALMAH/RF/5.200.000		1	1	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N MARWAH, S.FARMAPTI BERKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.02.23.03 TAHUN 2023 TANGGAL 9 AGUSTUS 2023 SEJALMAH RP. 5.200.000	7 March 2023	3 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		
	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN MEMBAYAR NO. 00148B/SEJALMAH/RF/5.200.000			2	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N MARWAH, S.FARMAPTI BERKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.02.23.03 TAHUN 2023 TANGGAL 9 AGUSTUS 2023 SEJALMAH RP. 5.200.000	3 March 2023	3 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		
	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NO. 00148C			3	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N MARWAH, S.FARMAPTI BERKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.02.23.03 TAHUN 2023 TANGGAL 9 AGUSTUS 2023 SEJALMAH RP. 5.200.000	2023	2 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		
	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NO. 00148D			4	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N MARWAH, S.FARMAPTI BERKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.02.23.03 TAHUN 2023 TANGGAL 9 AGUSTUS 2023 SEJALMAH RP. 5.200.000	9 February 2023	1 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		
4	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN MEMBAYAR NO. 00142A/SEJALMAH/RF/5.350.000		1	1	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N MARWAH, S.FARMAPTI BERKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.02.23.03 TAHUN 2023 TANGGAL 12 JANUARI 2023 SEJALMAH RP. 5.350.000	7 March 2023	3 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		
	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN MEMBAYAR NO. 00142B/SEJALMAH/RF/5.350.000			2	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N MARWAH, S.FARMAPTI BERKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.02.23.03 TAHUN 2023 TANGGAL 12 JANUARI 2023 SEJALMAH RP. 5.350.000	3 March 2023	3 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		
	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NO. 00142C			3	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N MARWAH, S.FARMAPTI BERKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.02.23.03 TAHUN 2023 TANGGAL 12 JANUARI 2023 SEJALMAH RP. 5.350.000	2023	2 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		
	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA NO. 00142D			4	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N MARWAH, S.FARMAPTI BERKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.02.23.03 TAHUN 2023 TANGGAL 12 JANUARI 2023 SEJALMAH RP. 5.350.000	9 February 2023	1 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		
5	HU.01.02	SURAT PERNYATAAN MEMBAYAR NO. 00124A/SEJALMAH/RF/7.500.000		1	1	PEMBAYARAN BELANJA BARANG (ISYAKA PENDODONG) BEKERTA TUGAS SELAJAR A.N DWIESTESTRI, S.PAN BEKASARWAN SK NO PB.02.03.1.2.06.22.19 TAHUN 2022 TANGGAL 1 AGUSTUS 2022 SEJALMAH RP. 7.500.000	21 March 2023	3 LEMBAR	ASLI	TUBEL BIAYA HDUP		✓		

Gambar 91. Daftar Arsip Aktif



- h. Peningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis kearsipan dan diklat fungsional arsiparis tahun 2024, keikutsertaan 2 (dua) arsiparis pegawai PPSDM POM pada Pelatihan Fungsional Arsiparis Keterampilan Angkatan III Tahun 2024 dengan bobot 620 jam pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Arsip Nasional Republik Indonesia pada tanggal 22 Mei sampai dengan 12 September 2024 dengan metode pembelajaran dalam jaringan (online) dengan hasil Lulus Sangat Memuaskan. Keikutsertaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pemantapan Tertib Arsip menuju Transformasi Digital Badan POM tanggal 19 – 23 Februari 2024 yang diselenggarakan oleh Unit Kearsipan Biro Umum, Bimbingan Teknis bertujuan sebagai pembekalan atau persiapan terhadap faktor Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menghadapi perubahan teknologi digital di bidang kearsipan. Keikutsertaan Arsiparis PPSDM POM pada kegiatan Bimbingan Teknis Digitalisasi Arsip Penyelamatan Dan Pelestarian Arsip Sebagai Memori Kolektif di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tanggal 4 s.d 6 September 2024 Tahun 2024. Kegiatan Bimbingan Teknis ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi/ pemahaman bagi seluruh pegawai khususnya Pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan arsip/ Arsiparis/ Pengelola Arsip dan menumbuhkan lagi kesadaran terkait pentingnya penyelamatan dan pelestarian arsip sebagai bentuk sejarah perjalanan organisasi.



Gambar 94. Keikutsertaan Bimbingan Teknis Pemantapan Tertib Arsip menuju Transformasi Digital Badan POM tanggal 19 – 23 Februari 2024

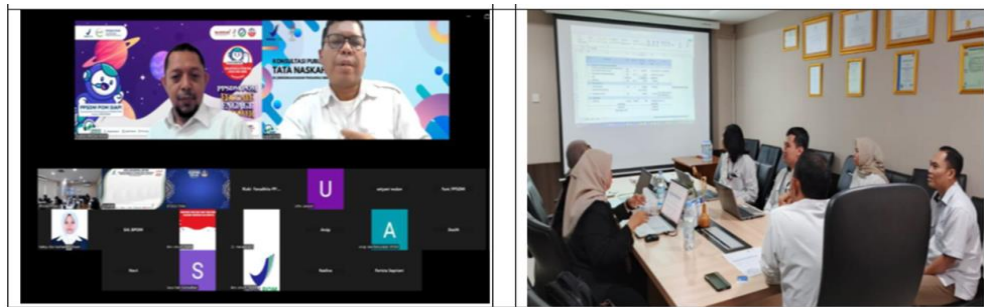


Gambar 96. Keikutsertaan Pelatihan Fungsional Arsiparis Keterampilan Angkatan III dan Sertifikasi Pengelolaan Arsip Dinamis Tahun 2024



Gambar 95. Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Digitalisasi Arsip Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Tanggal 4 s.d 6 September 2024 Tahun 2024

- i. Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kearsipan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia sebagai pengakuan terhadap kompetensi dalam bidang kearsipan, Keikutsertaan 2 (dua) Arsiparis PPSDM POM dalam Sertifikasi Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis Melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak Angkatan VIII di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tanggal 2 September 2024 dengan hasil Lulus. Ini menambah Sumber daya manusia kearsipan sebelumnya yang telah mengikuti dan lulus Ujian Sertifikasi Teknis Pengelolaan Arsip Dinamis.
- j. Melaksanakan sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas Nomor 6 Tahun 2022 dan manajemen penyimpanan arsip dan proses alih media tanggal 11 Desember 2024 dengan narasumber TIM Arsiparis PPSDM POM dan TIM PT Sigma Cipta Utama. Sosialisasi Peraturan Badan POM Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sangat penting karena berfungsi sebagai pedoman standar dalam pengelolaan dokumen resmi di lingkungan Badan POM dan mendukung legalitas dokumen PPSDM POM dengan tata kelola yang seragam sehingga meningkatkan kredibilitas dalam berkoordinasi dengan pihak lain.



Gambar 97. Sosialisasi Pedoman Tata Naskah Dinas Nomor 6 Tahun 2022 tanggal 11 Desember 2024

- k. Kunjungan ke Direktorat Pengolahan Arsip Statis di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) tanggal 02 September 2024 ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pengolahan arsip statis serta melihat secara langsung proses kerja dan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan arsip statis di ANRI. Sebagai arsiparis, penting untuk memahami prosedur dan standar yang diterapkan di lembaga arsip nasional guna mendukung pelaksanaan tugas di instansi masing-masing.



Gambar 98. Kunjungan Ke Arsip Nasional Republik Indonesia tanggal 02 September 2024

- I. Kunjungan ke PT. Sigma Cipta Utama tanggal 26 April 2024 untuk meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan dan penyimpanan arsip dinamis yang efektif dan efisien untuk mendukung terciptanya arsip yang autentik, dapat dipercaya, dan utuh sebagai alat bukti yang sah.



Gambar 99. Kunjungan ke PT. Sigma Cipta Utama tanggal 26 April 2024

3.18. LAYANAN PERPUSTAKAAN BADAN POM

Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan menyelenggarakan layanan perpustakaan untuk mendukung tugas pokok dan fungsi organisasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Perpustakaan Badan Pengawas Obat dan Makanan termasuk kedalam jenis perpustakaan khusus instansi pemerintah yang memiliki kekhususan dibidang Obat dan Makanan. Sesuai dengan UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, perpustakaan khusus diperuntukkan secara terbatas bagi pemusaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya. Ruang lingkup perppustakaan

husus adalah layanannya terbatas pada kelompok tertentu, dengan subjek terbatas yang mendukung visi dan misi lembaga tertentu.

Dalam upaya untuk meningkatkan layanan perpustakaan, dilakukan kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung terlaksananya kegiatan perpustakaan dengan baik seperti layanan perpustakaan, pengembangan koleksi perpustakaan, promosi perpustakaan, dan peningkatan kompetensi.

3.18.1. LAYANAN PERPUSTAKAAN

a. Layanan Datang Langsung

Layanan datang langsung merupakan layanan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Badan POM agar pegawai dan masyarakat dapat mendapatkan koleksi dan informasi secara langsung di gedung Athena lantai 2, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengunjung datang langsung pada perpustakaan Badan POM pada tahun 2024 sebanyak 281 orang, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30. Jumlah Pengunjung Datang Langsung ke Perpustakaan Badan POM Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	11
2	Februari	16
3	Maret	15
4	April	12
5	Mei	32
6	Juni	27
7	Juli	29
8	Agustus	15
9	September	60
10	Oktober	18
11	November	22
12	Desember	24
Jumlah		281

b. Layanan Online

Perpustakaan Badan POM juga melayani secara online agar dapat mencari informasi dan mengakses perpustakaan secara online melalui website perpustakaan <https://perpustakaan.pom.go.id/>. Jumlah pengunjung yang memanfaatkan perpustakaan secara online melalui website perpustakaan pada tahun 2024 sebanyak 99.656 kunjungan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31. Jumlah Pengunjung Online ke Perpustakaan Badan POM Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	4.905
2	Februari	4.783
3	Maret	4.774
4	April	4.789
5	Mei	4.871
6	Juni	4.695
7	Juli	4.560
8	Agustus	27.251
9	Septermber	30.572
10	Oktober	3.724
11	November	2.447
12	Desember	2.485
Jumlah		99.656

Pengunjung online ada 3 macam:

1. Pengunjung yang mengakses saja website <https://perpustakaan.pom.go.id/>.
2. Pengunjung member adalah pengunjung yang login pada website <https://perpustakaan.pom.go.id/>. yang menggunakan akun yang telah didaftarkan yang terdiri dari staff Badan POM dan Umum.

3. Pengunjung non-member adalah pengunjung yang mengisi buku tamu online pada website <https://perpustakaan.pom.go.id/> yang terhitung sebagai pengunjung online.

3.18.2. PENGEMBANGAN KOLEKSI PERPUSTAKAAN

Setiap tahun, Perpustakaan Badan POM melakukan pengembangan koleksi untuk memenuhi kebutuhan pengunjung. Proses ini dilakukan melalui pengadaan pustaka yang didasarkan pada survei dan masukan dari unit kerja serta pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2024, total buku yang diadakan berdasarkan usulan kebutuhan unit kerja dan pengunjung perpustakaan mencapai 87 judul. Koleksi pustaka hasil pengadaan dapat diakses melalui <https://perpustakaan.pom.go.id/ekatalog>.

3.18.3. PROMOSI PERPUSTAKAAN

a. Sosialisasi *International Standard Book Number (ISBN)* dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

Perpustakaan Badan POM telah menyelenggarakan Sosialisasi *International Standard Book Number (ISBN)* dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang diselenggarakan pada hari Senin, 5 Agustus 2024 melalui via daring aplikasi *Zoom Meeting*. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh perwakilan dari unit kerja Pusat di Badan POM. Sosialisasi ini bertujuan untuk menyampaikan terkait Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 177 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Satu Akun *International Standard Book Number* dan Layanan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam peraturan ini memuat terkait pelaksanaan Penerbitan ISBN dan serah simpan karya cetak dan karya rekam seperti tata cara atau proses pendaftaran, hak dan kewajiban serta aturan yang diperlu diketahui oleh seluruh pegawai dan unit kerja di Badan POM sebagai penerbit publikasi buku. Pada kesempatan kali ini, yang membawakan materi yaitu bapak Ari Perdana Sudewo, S.Psi., MBA. yang menyampaikan terkait peraturan tersebut.



Gambar 100. Sosialisasi ISBN dan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam

b. Bedah Buku

Dalam meningkatkan layanan perpustakaan dan literasi di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Perpustakaan Badan POM menyelenggarakan kegiatan bedah buku. Kegiatan bedah buku ini bertujuan untuk mengembangkan minat baca pegawai di lingkungan Badan POM dan memberikan pemahaman mendalam tentang filosofi Stoisisme yang diangkat dalam buku *Filosofi Teras : Filsafat Yunani - Romawi Kuno Untuk Mental Tangguh Masa Kini* karya Henry Manampiring, serta mengajak peserta untuk menerapkan prinsip-prinsip filosofi tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dalam bidang filsafat dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta bapak Dr. Humaidi, S.Th., M.Ud. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak pada layanan perpustakaan kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan POM

serta dapat mempengaruhi eksistensi dari Perpustakaan Badan POM agar lebih dikenal lagi oleh banyak pihak.



Gambar 101. Dokumentasi Kegiatan Bedah Buku

c. Bimbingan Pemustaka

PPSDM POM mengadakan kunjungan edukatif untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Kunjungan juga mencakup layanan perpustakaan Badan POM, di mana peserta diberikan bimbingan pemustaka oleh pustakawan. Bimbingan pemustaka bertujuan membantu pengguna memanfaatkan layanan dan fasilitas perpustakaan secara optimal. Pemustaka, terutama yang baru, sering kali belum familiar dengan prosedur peminjaman dan pengembalian, tata letak perpustakaan, atau penggunaan OPAC untuk mencari koleksi. Melalui bimbingan ini, dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan literasi informasi untuk membantu pemustaka mencari, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara lebih efektif.

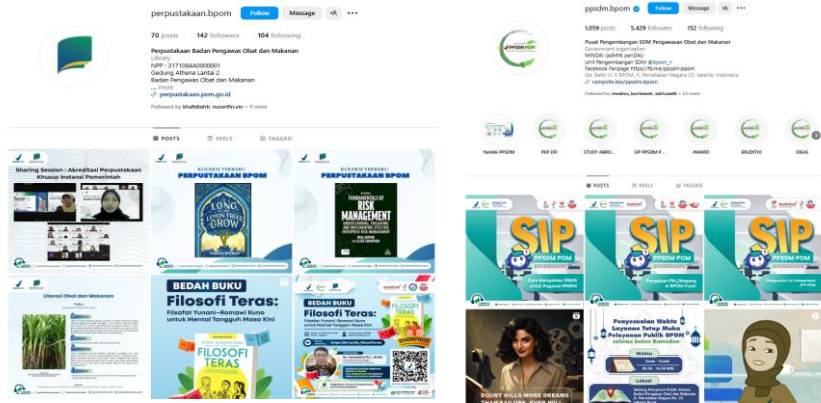


Gambar 102. Dokumentasi Kegiatan Bimbingan Pemustaka

d. Sosial Media

Selama tahun 2024 Perpustakaan Badan POM aktif untuk memanfaatkan berbagai platform media sosial, seperti Instagram untuk berinteraksi dengan masyarakat dan mempromosikan layanan perpustakaan.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai layanan perpustakaan dan memperluas jangkauan informasi tentang koleksi buku serta program-program yang diselenggarakan oleh perpustakaan Badan POM.



Gambar 103. Promosi layanan perpustakaan di Media Sosial

3.18.4. PENINGKATAN KOMPETENSI

a. Rapat Kerja dan Seminar Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI)

Pada tanggal 7-9 Juli 2024, Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) telah menyelenggarakan Rapat Kerja Pusat (Rakerpus) XXV dan Seminar Ilmiah Nasional dengan mengangkat tema “Peran Pustakawan dan Perpustakaan dalam Peningkatan Literasi Masyarakat pada Era Transformasi”. Acara ini berlangsung di Four Points Hotel by Sheraton, Bali dan dibuka oleh PJ Gubernur Bali Bapak S.M. Mahendra Jaya. Pustakawan Badan POM turut hadir dalam acara tersebut sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kompetensi di perpustakaan Badan POM.

Kehadiran IPI sebagai organisasi profesi pustakawan, telah banyak memberi kontribusi dalam memajukan kepustakawanan Indonesia. Ikatan Pustakawan Indonesia aktif dalam memajukan kepustakawanan Indonesia, mendorong literasi masyarakat, dan membantu pustakawan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kecerdasan buatan membawa disrupsi sehingga mengharuskan pustakawan harus terus berbenah diri,

agar tetap menjadi profesi penggerak utama melalui transformasi perpustakaan yang inklusif.



Gambar 104. Dokumentasi Rapat Kerja dan Seminar IPI

b. Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke-15

Perpustakaan Badan POM sebagai salah satu perpustakaan khusus instansi pemerintah telah menerapkan teknologi informasi dalam mendukung layanan publik khususnya di bidang perpustakaan. Perpustakaan Badan POM terlibat aktif juga dalam kegiatan kepastakawan yang diselenggarakan oleh organisasi profesi perpustakaan atau pustakawan salah satunya dari Forum Perpustakaan Digital Indonesia. Perpustakaan Badan POM telah mengikuti kegiatan Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke 15 yang diselenggarakan pada tanggal 6-9 Agustus 2024 di Kota Bandar Lampung, Lampung.

Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh pustakawan, tenaga perpustakaan, dan akademisi dibidang perpustakaan dari seluruh jenis perpustakaan yang ada di Indonesia. Pada kegiatan ini juga mempresentasikan sebanyak 12 pemakalah yang telah membuat makalah dengan tema "Artificial Intelligence (AI) dalam Perpustakaan Digital". Hasil dari kegiatan ini memberikan informasi bahwa teknologi informasi berbasis AI dapat menjadi alat yang membantu perkembangan pengetahuan dan pelayanan perpustakaan BPOM bagi masyarakat. Manfaat dari kegiatan ini bagi pustakawan yakni dapat membantu pustakawan dalam proses

pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dalam mendukung proses pelayanan publik di BPOM.



Gambar 105. Konferensi Perpustakaan Digital Indonesia ke 15

c. Sertifikasi Pustakawan

Sertifikasi profesi adalah kegiatan atau proses untuk membuktikan bahwa seseorang memiliki kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, & sikap) yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan spesifik sesuai standar melalui uji kompetensi. Tujuan sertifikasi pustakawan diantaranya adalah untuk menjamin kualitas dan profesionalisme pustakawan dalam menjalankan tugasnya, meningkatkan kepercayaan pemustaka terhadap layanan perpustakaan, menstandarkan kompetensi pustakawan, serta memberikan pengakuan formal terhadap keahlian pustakawan.

Sebanyak 3 (tiga) orang pustakawan yang terdiri dari Asril Sapli, Rakhmat Ari Nugroho, Khafidloh Tri Rusdaniati telah mengikuti sertifikasi pustakawan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Tarumanagara bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional pada tanggal 14-15 Agustus 2024 di Jakarta. Pustakawan BPOM telah mengikuti sertifikasi perpustakaan dalam bidang Layanan Pemustaka. Kegiatan tersebut diharapkan agar meningkatkan kompetensi bagi para pustakawan Badan POM agar memberikan pelayanan bagi seluruh *stakeholder*.



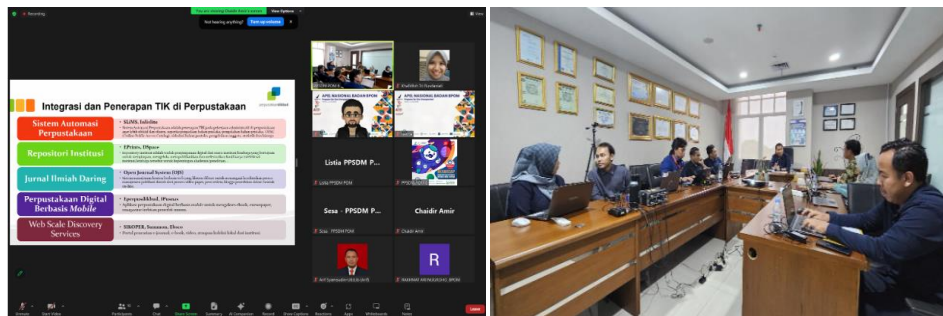
Gambar 106. Dokumentasi Kegiatan Sertifikasi Pustakawan

d. Diskusi Pengembangan Aplikasi Repositori dengan Perpustakaan Kemendikbud

Pada tanggal 1 Juli 2024, perpustakaan Badan POM berdiskusi dengan perpustakaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi terkait dengan pengembangan aplikasi repository di perpustakaan. Diskusi ini dilaksanakan di Ruang Rapat PPSDM dengan mengundang narasumber Bapak Chaidir Amir, S.Sos., M.A. Ada banyak landasan dalam undang-undang yang mengharuskan pengolahan koleksi, layanan, dan kerjasama perpustakaan menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Secara umum penerapan TIK di Perpustakaan Kemendikbudristek meliputi sistem otomasi, repository institusi, jurnal ilmiah daring, perpustakaan digital berbasis mobile, dan web scale discovery service. Beberapa manfaat repository adalah:

1. Stabilitas Data: Konten di repository tidak berubah meskipun ada perubahan pada situs web lembaga.
2. Integrasi: Beberapa situs web lembaga sekarang mengarahkan ke repository untuk menampilkan data seperti laporan, karena lebih aman dan stabil.
3. Pelaporan Detail: Aplikasi repository memungkinkan pelaporan yang lebih detail, misalnya, statistik unduhan berdasarkan unit kerja atau jenis buku.

Dari hasil diskusi ini Perpustakaan Badan POM memiliki rencana tindak lanjut / rencana aksi tahap pembangunan repositori di Badan POM yang mencakup Infrastruktur dan Promosi (Sosialisasi)/ membangun *culture* literasi. Dalam sosialisasi, lakukan kolaborasi dengan Sub Tim Sosmed, buat strategi marketing perpustakaan dan literasi yang baik. Sosialisasi perpustakaan bisa bersamaan dengan sosialisasi knowledge management. Jika dilakukan integrasi data dengan Kemdikbudristek, jelaskan benefit yang diterima atau diperoleh baik untuk internal Badan POM maupun *stakeholder* (Kemdikbudristek).



Gambar 107. Dokumentasi Diskusi Pengembangan Aplikasi Repositori

3.19. MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015 PPSDM POM

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menerapkan QMS ISO 9001:2015. Sistem Manajemen Mutu membantu memelihara dan meningkatkan kinerja organisasi serta menjadi nilai tambah terhadap pelayanan berupa kepercayaan stakeholder. Dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia POM telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Sudah dilakukan Sosialisasi QMS Awareness ISO 9001:2015 kepada seluruh pegawai Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan pada tanggal 22 Mei 2024 di Hotel Aston Kemayoran dengan mengundang Narasumber Desyawati Utami dari PT. ANR Maju Bersama.



Gambar 108. Kegiatan Sosialisasi QMS Awareness ISO 9001:2015

2. Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang diikuti oleh semua pegawai. Rapat Tinjauan Manajemen dilakukan 2 (dua) kali pada tahun 2024, yaitu ketika sebelum dilaksanakannya audit internal yang diadakan pada tanggal 20-21 Mei 2024 di Ruang Aula Lantai 6, Gedung Batik dan ketika setelah dilaksanakan Audit internal yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 di Ruang Aula Lantai 6, Gedung Batik.



Gambar 109. Kegiatan RTM 20 dan 21 Mei 2024

Kegiatan RTM pada tanggal 20 s.d 21 Mei 2024 membahas beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh PPSDM POM serta membahas mengenai kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu di PPSDM POM, diantaranya:

- Tindak lanjut yang telah dilakukan PPSDM POM dari pembahasan RTM sebelumnya, yaitu:
 - a. Pada setiap kegiatan Pelatihan telah dilakukan rapat persiapan pelatihan dengan dihadiri pengelola, panitia, pengajar serta penjamin mutu pelatihan yang terkait. Rapat ini dilaksanakan kurang lebih seminggu sebelum pelaksanaan.
 - b. Asesor tidak hanya berasal dari PPSDM tapi berasal dari unit lain, maka dengan itu hal yang sudah dilakukan adalah koordinasi secara informal

melalui whatsapp. Untuk kedepannya direncanakan akan dilakukan rapat dengan asesor melalui zoom sehingga dapat terdokumentasi dengan baik.

c. Telah dilakukan upaya peningkatan kompetensi pelayanan publik bagi internal PPSDM POM diantaranya:

1. *Benchmarking & Capacity Building* dalam rangka Reformasi Birokrasi pada Juni 2023 yang diikuti hampir seluruh pegawai PPSDM POM dimana salah satu area Reformasi birokrasi adalah Pelayanan Publik.
2. Pelatihan Pelayanan Publik Tingkat Lanjutan pada 05 - 07 Februari 2024 yang diikuti oleh 5 (lima) orang pegawai PPSDM POM.
3. Studi Banding terkait Implementasi Reformasi Birokrasi ke Balai Besar POM di Surabaya serta Unit Pelayanan Publik dan Pengelolaan Perpustakaan ke Perpustakaan Umum Kota Surabaya pada tanggal 6 Mei 2024.
4. Dilakukan kegiatan Forum Konsultasi Publik pada tanggal 17 Mei 2024 di Jakarta sebagai syarat penetapan PPSDM POM sebagai Unit Pelayanan Publik, serta untuk meningkatkan kualitas layanan publik di PPSDM POM. Acara ini bertujuan untuk mereview Draft Standar Pelayanan PPSDM POM bersama dengan *stakeholder*.

d. *Maintenance* aplikasi PPSDM POM dilakukan secara rutin, termasuk monitoring kinerja aplikasi yang dilakukan oleh Pranata Komputer PPSDM POM. Optimalisasi sosial media telah dilakukan pengembangan konten sosial media tentang informasi layanan PPSDM POM dengan terkonsep dan terencana, yaitu melalui pembuatan bank data konten. Sosial media PPSDM POM juga dilakukan monitoring rutin setiap bulan pada tahun 2024. Optimalisasi WA Blast dilakukan melalui integrasi WA Blast dengan aplikasi yang dimiliki PPSDM POM.

e. Melakukan beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan nilai Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), diantaranya:

1. Sosialisasi/internalisasi terkait gratifikasi, benturan kepentingan, dan *Whistleblowing System* kepada seluruh pegawai PPSDM POM.
2. Melakukan *public campaign* terkait pengawasan.

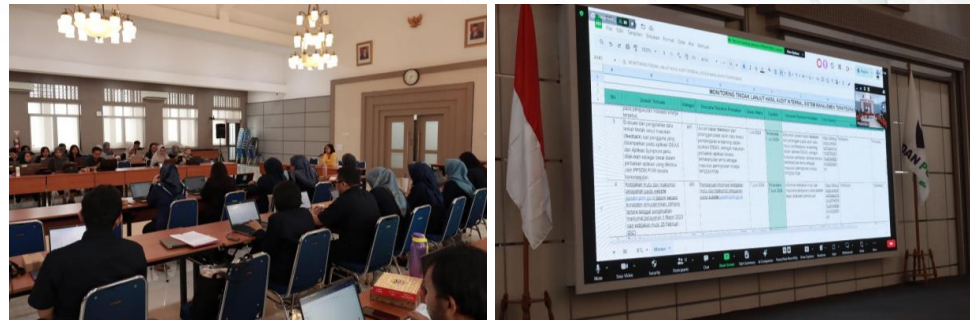
3. Himbauan kepada peserta eksternal pada kegiatan pelatihan/sertifikasi yang dilakukan oleh PPSDM POM bahwa PPSDM POM tidak menerima segala bentuk gratifikasi.
 4. Dilakukan monitoring pelaksanaan pengendalian gratifikasi, identifikasi benturan Kepentingan, dan pelaksanaan *Whistle Blowing System* di PPSDM POM yang dilakukan setiap Triwulan.
- f. Kelanjutan usulan perbaikan SOP Makro terkait Pengembangan Kompetensi Pihak Ketiga tentang PKL (POM.10.01/CFM.01/SOP.04) serta SOP Makro terkait Pengembangan Kompetensi (POM.10.01/CFM.01/SOP.03) yang sudah sesuai diperbaiki disampaikan sebelum dilaksanakannya Audit Eksternal. SOP Makro tersebut sudah dapat diakses melalui subsite QMS Badan POM oleh admin subsite QMS unit.
- g. Hasil survei dari bulan Mei 2023 hingga April 2024 terpantau cukup baik, yaitu dengan indeks SPKP selalu terpenuhi, hanya saja indeks SPAK pada bulan September 2023 tidak terpenuhi yaitu dengan nilai 3,55 dimana Indeks minimal untuk SPKP adalah 3,20 sedangkan untuk SPAK yaitu 3,60. Dengan demikian perlu adanya pengawasan serta upaya untuk meningkatkan nilai indeks tersebut, baik untuk SPKP maupun SPAK. Selain itu jumlah responden yang dibutuhkan adalah 30 responden setiap bulannya, namun seringkali PPSDM POM tidak mencapai target tersebut padahal banyak kegiatan PPSDM POM yang dilaksanakan setiap bulan. Dengan demikian, setiap kegiatan pelayanan melampirkan tautan survei, sehingga mendapatkan jumlah responden sesuai jumlah yang diminta (30 orang).
- Monitoring dan evaluasi pencapaian sasaran mutu membahas terkait hasil evaluasi atas pencapaian sasaran mutu di tahun 2023 yang capaiannya masih dalam kategori "Cukup" yaitu pada indikator "Nilai AKIP PPSDM POM", "Nilai Kinerja Anggaran PPSDM POM", dan "Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM".
 1. Pada "Nilai AKIP PPSDM POM" ini berpengaruh dari hasil penilaian IKPA PPSDM POM di bulan Desember 2023, indikator Deviasi Hal III DIPA memperoleh nilai paling rendah. Hal ini dikarenakan realisasi penarikan dana yang tidak sesuai dengan Rencana Penarikan Dana yang terdapat pada

Halaman III DIPA sehingga menyebabkan terdapat selisih dan deviasi. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan perencanaan yang lebih cermat serta komitmen untuk melakukan kegiatan dan pencairan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, akan dilakukan monitoring secara berkala terkait penyerapan anggaran sesuai dengan RPD.

2. Pada Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran PPSDM POM” yang terjadi adalah capaian Tingkat Efisiensi pada program Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi mencapai 0,92, hal ini dikarenakan tingginya capaian realisasi fisik (output) yang jauh lebih tinggi sebesar 192,31% (seratus sembilan puluh dua koma tiga satu persen) dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran sebesar 100% (seratus persen), sehingga menyebabkan rata-rata Tingkat Efisiensi per program menjadi cukup tinggi yaitu 0,23 (nol koma dua tiga). Pada perhitungan Capaian Tingkat Efisiensi, semakin tinggi Tingkat Efisiensi, maka semakin rendah Capaian Tingkat Efisiensinya
- Peluang peningkatan serta upaya untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu PPSDM POM, diantaranya:
 1. PPSDM POM menjadi acuan unit kerja di Badan POM dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi.
 2. Koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan kompetensi ASN Badan POM yang cukup kuat.
 3. Jumlah SDM POM yang tersertifikasi semakin meningkat sehingga meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan.
 4. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi dalam proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi SDM.
 5. Adanya berbagai generasi yang berinteraksi secara dinamis di dalam lingkungan kerja.
 6. Pengembangan SDM sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintahan yang dituangkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024.
 7. Cakupan ruang lingkup pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Badan POM semakin meningkat, sistem birokrasi yang semakin dinamis, sehingga pemenuhan kompetensi SDM menjadi tanggung jawab PPSDM POM.

8. Undang-Undang ASN No 20 Tahun 2023 menegaskan pentingnya Manajemen Kompetensi yang meliputi penilaian dan pengembangan kompetensi SDM.
 9. Ditetapkannya PPSDM POM sebagai Unit Pelayanan Publik mulai tahun 2024.
 10. SDM merupakan intangible asset bagi instansi, sehingga perlu adanya revitalisasi SDM Badan POM.
 11. Pengajuan Akreditasi Jurnal (Eruditio) untuk meningkatkan kualitas jurnal ilmiah.
 12. Memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut prosedur kerja dan pelayanan sesuai dengan klausul dalam ISO 9001:2015.
 13. Pelaksanaan rapat rutin Subtim Sistem Pengendalian Intern serta Subtim Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran PPSDM POM.
 14. Sosialisasi secara terus-menerus terkait penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 kepada seluruh pegawai PPSDM POM, yang mana telah dilaksanakan Awareness Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 secara hybrid pada 22 Mei 2024 serta Pembelajaran Mandiri Sistem Manajemen Risiko melalui Aplikasi IDEAS (Integrated Development and Training Information System) untuk pegawai PPSDM POM.
 15. Penjajakan terkait ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan.
 16. Penyusunan skema SKKNI pada pada semua komoditi yang diawasi Badan POM secara bertahap.
 17. Mempertahankan dan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan terkait dengan penetapan status akreditasi dan lisensi.
- Dari RTM tanggal 20 s.d 21 Mei 2024 hal- hal yang perlu ditindaklanjuti adalah:
 1. Dilakukan briefing singkat setelah apel mingguan untuk sharing kegiatan dan mengingatkan PIC kegiatan untuk menyebarkan kuisisioner SKM serta SPKP dan SPAK (rencana waktu tindak lanjut: mengingatkan survei setiap minggu serta sharing kegiatan triwulan III-IV tahun 2024).

2. Dilakukan perbaikan pada setiap aspek SAKIP yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja sesuai dengan rekomendasi perbaikan yang disampaikan oleh APIP melalui Surat Plt. Inspektur Utama tanggal 7 Februari 2024 tentang Laporan Hasil Evaluasi SAKIP PPSDM POM Tahun 2023 (rencana waktu tindak lanjut triwulan II-IV tahun 2024).
3. Dilakukan perencanaan yang lebih cermat serta komitmen untuk melakukan kegiatan dan pencairan anggaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan (rencana waktu tindak lanjut selama tahun 2024).
4. Dilakukan monitoring dan evaluasi realisasi penggunaan anggaran secara rutin dan periodik, baik di internal PPSDM POM maupun di lingkup Keseksamaan dengan Sekretaris Utama (rencana waktu tindak lanjut setiap bulan).
5. Realisasi pencairan anggaran sesuai dengan peruntukan/output yang direncanakan (rencana waktu tindak lanjut selama tahun 2024).
6. Penugasan pegawai untuk mengikuti Pelatihan Bahasa Isyarat pada tahun 2024 untuk petugas pelayanan publik (rencana waktu tindak lanjut triwulan IV tahun 2024).
7. Dilakukan briefing sebelum pelaksanaan sertifikasi, untuk memastikan seluruh asesor yang bukan merupakan pegawai PPSDM POM dapat memahami alur proses dan aplikasi yang digunakan untuk sertifikasi (rencana waktu tindak lanjut bulan Juni 2024/setelah RTM).
8. Dilakukan perencanaan dan pengembangan integrasi aplikasi PPSDM POM (rencana waktu tindak lanjut triwulan II-IV tahun 2024).
9. Peningkatan sosialisasi Pelayanan Publik PPSDM POM melalui seluruh media sosial yang dimiliki, peningkatan konten-konten infografis pelayanan (rencana waktu tindak lanjut setiap triwulan tahun 2024).
10. Dilakukan evaluasi terhadap responsibilitas petugas pelayanan PPSDM POM dalam menghadapi keluhan, terutama Pelayanan Uji Kompetensi (rencana waktu tindak lanjut bulan Mei 2024/setelah RTM).
11. Dilakukan reviu terhadap timeline pelayanan dalam SOP yang telah ditetapkan (rencana waktu tindak lanjut triwulan II tahun 2024).



Gambar 110. Kegiatan RTM 22 Juli 2024

Kegiatan RTM pada tanggal 22 Juli 2024 membahas beberapa perbaikan yang harus dilakukan oleh PPSDM POM serta membahas mengenai kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu di PPSDM POM, diantaranya:

- Tindak lanjut yang telah dilakukan PPSDM POM dari pembahasan RTM sebelumnya tanggal 20 s.d 21 Mei 2024, yaitu:
 1. SKM sudah mendapatkan responden sesuai dengan ketentuan dan sudah diolah, akan dibuatkan laporan sebagai data dukung PEKPP. Nanti akan diinfo berapa catatan kualitatif dari saran maupun masukan yang sampaikan dalam survei SKM tersebut.
 2. Dilakukan perbaikan pada setiap aspek SAKIP pada setiap aspek. Pada perencanaan kinerja disusun kertas kerja perubahan/penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja yang berbasis data pada triwulan II. Pada Pengukuran kinerja dilakukan penyampaian notulensi arahan pimpinan yang disampaikan dalam rapat monitoring dan evaluasi, dituangkan dalam laporan evaluasi internal tiap triwulan. Pada Pelaporan kinerja dilakukan penyusunan laporan kinerja interim sesuai dengan format yang ditetapkan Biro Perencanaan dan Keuangan; penyampaian data hambatan dan RTL realisasi kinerja pada aplikasi SIMETRIS sesuai jadwal. Pada evaluasi internal: disusun kertas kerja penghitungan capaian kinerja, penambahan kelengkapan analisis, evaluasi, dan RTL atas hambatan. Pada capaian kinerja dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan dengan Kepala PPSDM POM dan Sestama untuk memastikan setiap target tercapai.
 3. Dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulan dengan Kepala PPSDM POM dan Sestama untuk memastikan setiap target tercapai. Pelaksanaan dilakukan setiap bulan dan triwulan.

4. Sudah dilakukan briefing bersama seluruh asesor baik internal PPSDM maupun eksternal unit. Pada briefing menyampaikan hal-hal teknis yang perlu diketahui asesor terkait aplikasi dan petunjuk pelaksanaan sertifikasi.
 5. Perencanaan dan pengembangan integrasi aplikasi PPSDM POM akan membuat nota dinas ke Pusdatin untuk melakukan pengembangan aplikasi. Kepemilikan aset aplikasi akan dipindahkan ke Pusdatin dengan pengembangan konten oleh PPSDM POM, rencana pengembangan akan dipusatkan ke domain ppsdm.pom.go.id.
 6. Telah dilaksanakan sosialisasi pelayanan yang dimiliki PPSDM POM melalui seluruh media sosial yang dimiliki. Sosialisasi juga dilaksanakan melalui pelaksanaan Forum Konsultasi Publik PPSDM POM pada 17 Mei 2024 di Hotel ASTON Kemayoran mengundang seluruh pengguna layanan dari unsur masyarakat, akademisi, instansi, ormas, dan media massa.
 7. Telah dilaksanakan reviu terhadap SOP Makro dan SOP Mikro PPSDM POM sesuai dengan rekomendasi rapat tinjauan manajemen dan temuan audit internal.
- Dari RTM tanggal 20 s.d 21 Mei 2024 hal- hal yang perlu ditindaklanjuti adalah:
 1. Pegawai di UPT kurang mengetahui keberadaan perpustakaan
Rencana tindak lanjut: Peningkatan sosialisasi tentang perpustakaan agar seluruh pegawai di Pusat dan UPT mengetahui keberadaan perpustakaan (rencana waktu tindak lanjut TW III 2024 - TW II 2025)
 2. Perlu pengembangan aplikasi perpustakaan
Rencana tindak lanjut: Pengembangan aplikasi untuk lebih memudahkan pelanggan dalam melakukan peminjaman buku/e-book (rencana waktu tindak lanjut TW I - TW II 2025)
 3. Kualitas pelayanan pemetaan kompetensi, uji kompetensi, dan umpan balik
Rencana tindak lanjut: Evaluasi dan perbaikan dalam proses uji kompetensi dan umpan balik meliputi evaluasi dalam penjadwalan peserta, penyusunan FAQ uji kompetensi agar tidak banyak pertanyaan berulang, peningkatan responsivitas SDM dalam menanggapi keluhan pelanggan, serta peningkatan pemahaman asesor eksternal terkait media/aplikasi

pengembangan kompetensi yang dapat dimanfaatkan pegawai BPOM (rencana waktu tindak lanjut TW I - TW II 2025)

4. Perlu integrasi aplikasi PPSDM POM

Rencana tindak lanjut: Pengembangan integrasi aplikasi PPSDM POM, dilakukan pemusatan pengembangan dilakukan pada domain ppsdm.pom.go.id (rencana waktu tindak lanjut TW II 2024)

5. Perlu Pelatihan Bahasa Isyarat untuk petugas pelayanan publik

Rencana tindak lanjut: Penugasan pegawai untuk mengikuti Pelatihan Bahasa Isyarat pada tahun 2024 untuk petugas pelayanan publik (rencana waktu tindak lanjut TW II 2024)

6. Pelaksanaan PPID

Rencana tindak lanjut:

1. Pengisian SAQ (*Self Assessment Questionnaire*) mulai dari 17 Juli sd minggu ke-2 Agustus 2024.
2. Menginput permintaan data penelitian ke dalam aplikasi Simpel.
3. Update subsite PPSDM yang mencakup: Menambahkan submenu Sejarah PPID, Mengupdate Maklumat Pelayanan PPID, Menambahkan LHKPN Kepala PPSDM POM, Menginput Laporan PPID, serta Menambahkan submenu kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh PPSDM POM

3. Pelaksanaan Audit Internal yang dilaksanakan pada tanggal 4-5 Juni 2024 yang dilaksanakan oleh Tim Auditor dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat Dan Makanan Nasional. Hasil Audit Internal tersebut tidak ditemukan ketidaksesuaian kategori minor maupun mayor, tim audit hanya menemukan 7 observasi (area for improvement/AFI), adapun saran perbaikan, yaitu:

- Pada laporan monev yang dilakukan oleh tim penjaminan mutu terkait Pelatihan Orientasi P3K yang melibatkan penyelenggara internal dan eksternal (LAN). Pada laporan tersebut waktu penyelesaian laporan monev melebihi timeline yang tercantum pada SOP Mikro mengenai Penjamin Mutu Pelatihan yaitu 5 HK. Untuk itu disarankan untuk melakukan kaji ulang dokumen mutu untuk SOP Mikro dan SOP Makro yang penyelenggaraannya beririsan dengan

pihak eksternal (kendalinya di luar Badan POM) pada bagian mutu baku waktu yang dapat dicapai.

Tindakan perbaikan yang sudah dilakukan:

Tinjau ulang SOP Makro Pengembangan Kompetensi, SOP Mikro Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan SOP Mikro Penjaminan Mutu pada 19 Juni 2024.

- Aplikasi yang dikelola PPSDM POM dan berkontribusi dalam pengukuran indikator kinerja PPSDM POM belum secara jelas tercantum pada bagian definisi operasional pada manual IKU PPSDM POM. Untuk itu disarankan untuk dilakukan reviu dengan penambahan narasi terkait aplikasi-aplikasi yang berkontribusi pada pengukuran indikator kinerja tersebut.

Tindakan perbaikan yang sudah dilakukan:

Dokumen usulan perubahan dalam definisi operasional indikator kinerja utama PPSDM POM periode Renstra berikutnya dengan mengakomodasi kontribusi aplikasi yang digunakan sebagai tools evaluasi kinerja PPSDM POM

- Evaluasi dan pengolahan data terkait tindak lanjut masukan (feedback) dari pengguna yang disampaikan pada aplikasi IDEAS dan Aplikasi Symphoni perlu dilakukan sebagai dasar dalam perbaikan aplikasi yang dikelola oleh PPSDM POM secara berkelanjutan.

Tindakan perbaikan yang sudah dilakukan:

Dokumen usulan kajian feedback dari pelanggan pada salah satu modul pembelajaran e-learning dalam aplikasi IDEAS, sebagai masukan perbaikan aplikasi secara berkelanjutan serta sebagai masukan peningkatan kinerja PPSDM POM.

- Kebijakan mutu dan maklumat pelayanan pada website ppsdm.pom.go.id belum secara konsisten dimutakhirkan, dimana tertera tanggal pengesahan maklumat pelayanan 1 Maret 2023 dan kebijakan mutu 25 Februari

Tindakan perbaikan yang sudah dilakukan:

Informasi kebijakan mutu dan maklumat pelayanan pada subsite telah dilakukan pembaruan

- Telah dilakukan kaji ulang terhadap dokumen SOP Makro dan SOP Mikro tetapi belum seluruhnya dikomunikasikan dan disosialisasikan terutama SOP Mikro

yang diterbitkan pada tanggal 1 Juni 2024 untuk memastikan bahwa seluruh pegawai mengetahui perubahan pada dokumen tersebut.

Tindakan perbaikan yang sudah dilakukan:

Laporan Sosialisasi Dokumen SOP Makro dan SOP Mikro PPSDM POM

- Pada SOP POM-10.01/CFM.01/SOP.03 terkait pengembangan kompetensi pihak ketiga, baik dalam rangka pelaksanaan PKPA (aktivitas 9) maupun pelaksanaan PKL (aktivitas 6) terdapat keterangan terkait penyampaian laporan pelaksanaan PKPA dan PKL oleh Balai Besar dan Balai POM kepada PPSDM pada tahun berjalan. Pada implementasi pelaksanaan tahun 2023 belum seluruh Balai Besar/Balai POM menyampaikan laporan pelaksanaan PKPA dan PKL kepada PPSDM sehingga perlu dilakukan monitoring terkait penyampaian laporan tersebut yang selanjutnya dijadikan bahan penyusunan laporan evaluasi terhadap pelaksanaan PKPA dan PKL di lingkungan Badan POM oleh PPSDM.

Tindakan perbaikan yang sudah dilakukan:

Laporan Penyelenggaraan dan Monitoring Magang/PKL di Lingkungan Badan POM Tahun 2023

- Telah dilakukan pengecekan terhadap kualifikasi asesor eksternal sesuai yang dipersyaratkan tetapi belum terdokumentasi melalui formulir atau checklist yang mudah telusur.

Tindakan perbaikan yang sudah dilakukan:

Dokumen verifikasi kualifikasi asesor teknis JF PFM sesuai persyaratan

4. Audit Sertifikasi QMS ISO 9001:2015 oleh Sucofindo yang dilaksanakan pada tanggal 9 - 10 Oktober 2024. Hasil *Audit Surveillance* saat itu adalah Tim audit tidak menerbitkan ketidaksesuaian baik Mayor maupun minor dan observasi dan terdapat 9 Aspek Positif, maka Organisasi direkomendasikan untuk mempertahankan ISO 9001:2015.



28	Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	Center of Human Resources Development	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan	Human Resource Development of Drug and Food Control	Jl. Percetakan Negara No. 23, Jakarta Pusat 10560, Indonesia	36, 37
----	--	---------------------------------------	--	---	--	--------

Walaupun tidak adanya temuan maupun observasi, akan tetapi Auditor Eksternal memberikan masukan saat diskusi antara lain:

- a. Perubahan iklim yang menjadi persyaratan baru dalam bahasan isu internal dan eksternal pada peninjauan isu terakhir di rapat tinjauan manajemen belum dibahas, direkomendasikan perubahan iklim diterapkan di PPSDM.
- b. Pihak berkepentingan yang relevan dengan perubahan iklim agar dipastikan untuk dapat dicermati kembali, mengingat hal tersebut adalah pokok persyaratan baru yang sudah dimasukkan dalam beberapa standar ISO termasuk ISO 9001: 2015

Sembilan Aspek positif yang dimiliki PPSDM POM antara lain sebagai berikut:

1. Penghargaan Lembaga Pelatihan Pemerintah Pusat Terbaik I Kategori Adaptive Learning Strategy dengan Tema Pengembangan Metode dan Bentuk Pengembangan Kompetensi Non Klasikal Klasifikasi Pemerintah Pusat dari Lembaga Administrasi Negara pada Tanggal 8 Agustus 2023
2. Penghargaan *The Highest Score* Indeks BerAKHLAK dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Tanggal 14 Desember 2023
3. Program Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Memperoleh Akreditasi B dari Lembaga Administrasi Negara dengan Sertifikat Nomor 1382/K.1/PDP/09 Tanggal 24 Oktober 2023 dan Masa Berlaku 3 (Tiga) Tahun sampai 2026
4. PPSDM POM sebagai Lembaga Pengakreditasi Program Pelatihan Teknis Bidang Pengawasan Obat dan Makanan Memperoleh Akreditasi Kategori Terakreditasi dari Lembaga Administrasi Negara dengan Sertifikat Nomor 1381/K.1/PDP/09 Tanggal 24 Oktober 2023 dan Masa Berlaku 5 (Lima) Tahun sampai 2028
5. Standar Kompetensi Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Memperoleh Apresiasi dan Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/111/M.SM.02.00/2024 Tanggal 2 Februari 2024 Hal Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan
6. Standar Kompetensi Jabatan Dukungan Manajemen Memperoleh Apresiasi dan Persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/278/M.SM.02.00/2024 Tanggal 16 April 2024 Hal Persetujuan Standar Kompetensi Jabatan Dukungan Manajemen
7. Penghargaan dari Pemerintah Kota Batam atas Kerja Sama Pelaksanaan Asesmen Pejabat Eselon IV dan Jabatan Fungsional Ahli Muda Tahun 2023
8. Penghargaan Peringkat II BKN Award Kategori Elemen Implementasi Manajemen ASN: Pengembangan Kompetensi Non Kementerian Tipe Besar dari Badan Kepegawaian Negara pada Tanggal 30 Mei 2023
9. Penghargaan Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara Kategori Sangat Baik dengan Nilai 400 (Tertinggi) dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) pada tanggal 17 Mei 2024

BAB IV KENDALA

Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) POM telah melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan sesuai dengan Rencana Strategis Badan POM dan ketersediaan anggaran yang tercantum dalam DIPA 2024. Meskipun demikian, dalam pelaksanaan tugas tersebut, terdapat beberapa kendala yang dihadapi yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan. Kendala-kendala ini perlu mendapatkan perhatian lebih agar program yang direncanakan dapat berjalan dengan lebih optimal.

Salah satu kendala utama adalah terbatasnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan kompetensi SDM di PPSDM POM. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan pengembangan kompetensi yang seharusnya memenuhi standar minimal 20 Jam Pelajaran (JP) untuk seluruh SDM Badan POM, tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan melalui kegiatan pembelajaran tatap muka. Sebagai alternatif, pembelajaran mandiri melalui aplikasi IDEAS digunakan, namun pelaksanaannya tidak terjadwal dengan baik, sehingga kurang efektif dalam meningkatkan kompetensi SDM sesuai kebutuhan.

Selain itu, belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian program kerja turut memengaruhi capaian indikator kinerja di PPSDM POM. Tanpa adanya pemantauan yang menyeluruh dan evaluasi yang tepat waktu, sulit untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Keberadaan aplikasi-aplikasi yang digunakan dalam program pengembangan kompetensi juga masih terpusat pada server yang dikelola oleh Kementerian Informasi dan Digital. Hal ini menyebabkan PPSDM POM tidak dapat bertindak secara langsung untuk mengatasi kendala teknis yang terjadi pada server, seperti gangguan sistem yang mempengaruhi kelancaran operasional.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia, terutama narasumber atau widyaiswara yang dimiliki, juga menjadi tantangan tersendiri. Beberapa pelatihan yang direncanakan, khususnya yang berkaitan dengan manajerial, sosial kultural, dan pelatihan teknis tingkat kesulitan II dan III, belum dapat dilaksanakan secara mandiri karena kurangnya tenaga pengajar yang memadai. Kondisi ini membatasi kapasitas PPSDM POM untuk memberikan pelatihan yang lebih komprehensif dan bervariasi sesuai dengan kebutuhan peserta.

Sebagai Unit Pelayanan Publik, PPSDM POM juga menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa seluruh SDM di Badan POM memahami jenis-jenis layanan yang dapat diberikan oleh PPSDM POM. Pemahaman yang kurang mendalam terhadap layanan ini dapat mengurangi

efektivitas penyampaian dan pengelolaan layanan kepada seluruh stakeholder. Selain itu, belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PPSDM POM juga menjadi kendala dalam penyelenggaraan penilaian maupun pengembangan kompetensi yang sesuai dengan standar akreditasi lembaga diklat. Sampai saat ini, beberapa kegiatan pelatihan masih dilaksanakan di luar fasilitas Badan POM, yang tentunya mempengaruhi kualitas dan integritas program pelatihan.

Keterbatasan anggaran juga mempengaruhi kemampuan PPSDM POM untuk menjalankan seluruh program kerja secara maksimal. Tanpa anggaran yang memadai, beberapa rencana yang telah disusun tidak dapat terwujud secara penuh sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Terakhir, pelaksanaan pelatihan penulisan KTI Tingkat Dasar Tahun 2024 yang dilakukan secara online juga belum mencapai hasil yang optimal. Kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil menjadi penghambat bagi beberapa peserta pelatihan, sementara beban tugas kantor yang masih harus dijalankan juga mengurangi fokus peserta dalam mengikuti pelatihan tersebut.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Laporan Tahunan PPSDM POM Tahun 2024 menyajikan gambaran yang komprehensif mengenai pencapaian kinerja yang telah diraih dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja PPSDM POM. Dari sepuluh sasaran strategis yang ditetapkan, tujuh sasaran memperoleh kriteria pencapaian "Sangat Baik", satu sasaran dengan kriteria "Baik", dan dua sasaran dengan kriteria "Cukup". Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar indikator pencapaian PPSDM POM telah memenuhi target yang ditetapkan melalui berbagai program dan kegiatan sepanjang tahun 2024.

Laporan ini juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program-program PPSDM POM dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan laporan ini, beberapa kesimpulan yang dapat diambil antara lain:

1. PPSDM POM berhasil menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan kompetensi SDM sepanjang tahun 2024 dengan rata-rata realisasi anggaran mencapai 99,98% dan pencapaian indikator kompetensi SDM pengawasan obat dan makanan yang mencapai 100%.
2. Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa kegiatan yang semula direncanakan secara tatap muka beralih ke format daring. Meskipun ini menjadi solusi alternatif, efektivitasnya berkurang akibat minimnya interaksi langsung yang diperlukan dalam proses pembelajaran.
3. Pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran, meskipun memiliki potensi besar, terkendala oleh gangguan teknis pada server. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kontrol yang dimiliki PPSDM POM terhadap infrastruktur teknologi yang sepenuhnya dikelola oleh PUSDATIN.
4. Sarana dan prasarana yang belum memadai, khususnya dalam mendukung akreditasi lembaga pelatihan, menjadi hambatan yang perlu segera diatasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan yang diberikan.

5.2. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan yang telah dipaparkan, dibutuhkan langkah-langkah strategis dan inovatif yang dapat memperbaiki kualitas pelaksanaan program serta meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa langkah yang dapat diambil antara lain:

1. Menyempurnakan aplikasi IDEAS dengan menambahkan materi yang lebih beragam, baik untuk pengembangan teknis jabatan maupun materi yang bersifat manajerial, sosial, dan kultural. Selain itu, perlu adanya komitmen bersama dengan pimpinan Unit Kerja di Badan POM untuk mendukung pemanfaatan IDEAS, seperti dalam program pembelajaran mandiri bagi pegawai Badan POM.
2. Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian program dengan memanfaatkan teknologi digital. Selain itu, penting untuk meningkatkan literasi dan kompetensi digital dalam pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence, big data, dan teknologi informasi lainnya guna meningkatkan layanan publik serta efisiensi internal.
3. Untuk menghindari gangguan teknis pada server yang dapat menghambat kelancaran pembelajaran daring, PPSDM POM sebaiknya memiliki server cadangan yang dapat digunakan sebagai backup dalam kondisi darurat, khususnya apabila terjadi masalah pada jaringan atau sistem informasi.
4. Memberikan kesempatan pelaksanaan program magang, on-the-job training, dan praktik terbaik bagi pegawai PPSDM POM. Hal ini bertujuan untuk pengembangan SDM dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses bisnis serta pengalaman di bidang pekerjaan di Badan POM